



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	1-1
1.1	Latar Belakang.....	1-1
1.1.1	Penjelasan Umum.....	1-1
	a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1-1
	b. Data Geografis Wilayah.....	1-1
	c. Jumlah Penduduk.....	1-4
	d. Jumlah Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi).....	1-4
	e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	1-5
	f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	1-5
1.1.2	Perencanaan Pembangunan Daerah.....	1-6
	a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	1-6
	b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	1-6
	c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	1-7
	d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	1-9
1.1.3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	1-23
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	11-1
2.1	Capaian Kinerja Makro.....	11-1
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	11-4
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	11-4
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	11-28
2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	11-34
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	11-36

BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
1.	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	III-1
2.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi.....	III-1
3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III-2
3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi.....	III-4
3.1.1	Target Kinerja.....	III-4
3.1.2	Realisasi.....	III-9
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota.....	III-53
3.2.1	Target Kinerja.....	III-53
3.2.2	Realisasi.....	III-53
3.3	Permasalahan dan Kendala.....	III-53
3.4	Saran dan Tindak Lanjut.....	III-53
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1	Urusan Pendidikan.....	IV-1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-1
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-1
4.1.3	Realisasi.....	IV-2
4.1.4	Alokasi Anggaran.....	IV-5
4.1.5	Dukungan Personil.....	IV-9
4.1.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-9
4.2	Urusan Kesehatan.....	IV-9
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-9
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-9
4.2.3	Realisasi.....	IV-11
4.2.4	Alokasi Anggaran.....	IV-13
4.2.5	Dukungan Personil.....	IV-13

4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-14
4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-14
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-14
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-14
4.3.3	Realisasi.....	IV-15
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	IV-16
4.3.5	Dukungan Personil.....	IV-18
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-18
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-18
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-18
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-19
4.4.3	Realisasi.....	IV-19
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	IV-21
4.4.5	Dukungan Personil.....	IV-22
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-22
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-22
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-22
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-23
4.5.3	Realisasi.....	IV-23
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	IV-24
4.5.5	Dukungan Personil.....	IV-29
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-29
4.6	Urusan Sosial.....	IV-30
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-30
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-30
4.6.3	Realisasi.....	IV-33
4.6.4	Alokasi Anggaran.....	IV-37

4.6.5	Dukungan Personil.....	IV-40
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-41
4.7	Program dan Kegiatan.....	IV-42
4.7.1	Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan.....	IV-42
4.7.2	Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan.....	IV-44
4.7.3	Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-44
4.7.4	Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat	IV-45
4.7.5	Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-45
4.7.6	Program dan Kegiatan Urusan Sosial	IV-46
BAB V	PENUTUP	V-1

KATA PENGANTAR

Assalamu `alaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal II ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 memuat capaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026.

Kami sampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik untuk tahun selanjutnya,

Wassalamualaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh.

Pangkalpinang, Maret 2024

**Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Dalam penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan pelaksanaan EPPD telah mengalami perubahan, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi LPPD dan EPPD memuat data dan informasi secara elektronik yang akan digunakan Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan Otonomi Daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui LPPD dan EPPD tersebut akan menjadi umpan balik yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

1.1.1. Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang ke 32 (tiga puluh dua), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada awal terbentuknya provinsi, terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

b. Data Geografis Wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 105°50' sampai 108°30' Bujur Timur dan 1°50' sampai 3°10' Lintang Selatan. Kepulauan

Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, *land management* dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh *geological formation*, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

1) Batas Wilayah

Berdasarkan batas wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata di sebelah Timur;
- Laut Jawa di sebelah Selatan;
- Selat Bangka di sebelah Barat; dan
- Laut Natuna di sebelah Utara.

2) Luas Wilayah

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Kabupaten Bangka luas wilayah | : 2.950,68 km ² |
| - Kabupaten Bangka Barat luas wilayah | : 2.820,61 km ² |
| - Kabupaten Bangka Tengah luas wilayah | : 2.155,77 km ² |
| - Kabupaten Bangka Selatan luas wilayah | : 3.607,08 km ² |
| - Kabupaten Belitung luas wilayah | : 2.293,61 km ² |
| - Kabupaten Belitung Timur luas wilayah | : 2.506,91 km ² |
| - Kota Pangkalpinang luas wilayah | : 89,40 km ² |

Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa;
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa;
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa;
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa;

- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa;
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa;
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

3) Topografis

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari dataran, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

4) Geologi

Kondisi geologi di *wilayah* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (quartz) dan bilitonite (dikenal dengan nama "satam"). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

5) Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain: Sungai Baturusa, Sungai

Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

6) Klimatologi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 67,9 mm sampai dengan 409 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 238,45 mm. Pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 23,5 °C sampai dengan 32,1 °C dengan kelembaban udara terendah 72-73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 mencapai 1.494.621 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,47.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
Bangka	330.793	337.337	326.265	329.911	334.344
Belitung	186.155	189.824	182.079	184.004	186.331
Bangka Barat	209.011	213.163	204.612	206.786	209.413
Bangka Tengah	192.429	196.196	198.946	201.861	205.510
Bangka Selatan	205.901	209.973	198.189	200.051	202.263
Belitung Timur	127.064	129.572	127.018	128.564	130.463
Pangkalpinang	208.520	212.727	218.569	221.988	226.297
Kepulauan Bangka Belitung	1.459.873	1.488.792	1.455.678	1.473.165	1.494.621

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, serta 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka

Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Bangka	Sungailiat	8	8	8	8	8
Kab. Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
Kab. Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6
Kab. Bangka Selatan	Toboali	8	8	8	8	8
Kab. Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
Kab. Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7
Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	7	7	7	7
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		47	47	47	47	47

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023)

- e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memiliki Perangkat Daerah Sebanyak 27, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah: 1 unit
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Inspektorat : 1 unit
Pergub Nomor 5 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Dinas : 18 unit
Pergub Nomor 6 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Badan : 6 unit
Pergub Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka.
5. Sekretariat DPRD : 1 unit
Pergub Nomor 4 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jumlah pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 sebanyak 6100 orang.

- f. Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebesar Rp. 3.489.688.502.087,00 dengan realisasi Rp.3.181.870.672.150,00

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan Daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Sejumlah permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diidentifikasi sebagai faktor yang perhatian untuk pembangunan di masa mendatang

Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.

1. Rendahnya PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Rendahnya PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Rendahnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian
4. Rendahnya PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan
5. Rendahnya PDRB Sub Sektor Perdagangan
6. Rendahnya Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik
7. Rendahnya Ekspor
8. Belum maksimalnya nilai investasi (PMA/PMDN) daerah
9. Rendahnya Pembangunan Manusia
10. Menurunnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga dalam demokrasi
11. Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan
12. Kurangnya ketersediaan infrastruktur
13. Rendahnya kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang
14. Tingginya risiko bencana.
15. Belum optimalnya pembangunan kawasan pedesaan
16. Lambatnya penurunan laju pertumbuhan penduduk
17. Lambatnya penurunan kemiskinan
18. Rendahnya kesempatan kerja

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPd yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen

Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun.

Tujuan pembangunan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi Daerah
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Untuk mencapai ke 6 (enam) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 19 (sembilan belas) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan
5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan
6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestic
7. Meningkatnya Ekspor
8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah
9. Meningkatnya Pembangunan Manusia
10. Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
12. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur
13. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang
14. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana
15. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan
16. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
18. Meningkatkan Kesempatan Kerja
19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dan ditetapkan, selain sebagai solusi penyelesaian masalah dan isu strategis, maka yang utama adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan dukungan strategi dan arah kebijakan.

Program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah. Dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS), telah dirumuskan

dan ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) Program Pembangunan Daerah, yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program unggulan pembangunan daerah tersebut sebagai berikut:

1. PEMBANGUNAN EKONOMI

Fokus kegiatan pada pemulihan pasca pandemic Covid-19 dalam rangka mengembalikan sektor ekonomi dengan sasaran pada beberapa sektor antara lain sektor Pertanian, Sektor Perikanan, sektor Pertambangan dan Pengecilan, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, sektor Pariwisata, Ekspor, dan Nilai Investasi. Hal tersebut guna meningkatkan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung dengan cara pemulihan pada sektor yang mempengaruhi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan kualitas hidup untuk dapat mewujudkan SDM yang tangguh dan mempunyai daya saing.

3. PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang memiliki tingkat demokrasi yang tinggi dengan cara meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan dan meningkatkan kapasitas lembaga dalam demokrasi guna meningkatkan kebebasan demokrasi, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

4. PEMBANGUNAN PEMERINTAH

Fokus kegiatan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara peningkatan akses data dan informasi, transparansi terhadap layanan dan pengadaan barang atau jasa dan peningkatan terhadap reformasi birokrasi agar menjadi pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. PEMBANGUNAN WILAYAH

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat guna memberikan pembangunan yang berkeadilan dengan cara meningkatkan ketersediaan infrastruktur, kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang, Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana, pembangunan kawasan perdesaan dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar pembangunan merta dan tepat sasaran.

6. PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Fokus kegiatan membangun pemerataan pendapatan masyarakat agar tidak terjadinya ketimpangan dengan cara menurunkan tingkat kemiskinan dan

meningkatkan kesempatan kerja yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pendapatan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Fokus kegiatan Mengembangkan pembangunan yang mengedepankan lingkungan agar terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah hingga kegiatan prioritas pembangunan daerah. Adapun kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
Program Penge lolaan Energi Terbarukan	Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi	Urusan ESDM
Program Penge lolaan Ketenagalistrikan	Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	Urusan ESDM
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab/Kota	Urusan PUPR
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Urusan Pangan
		Urusan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Urusan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Urusan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Urusan Pangan

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai dengan 30 GT	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga kerja Asing	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi)	Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Urusan UMKM

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Urusan UMKM
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Urusan UMKM
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Ke anggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Urusan UMKM
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kab/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Urusan UMKM
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Urusan UMKM
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Urusan Pertanian
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Urusan Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Urusan Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Urusan Pertanian
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Urusan Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Urusan Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kab/Kota	Urusan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Urusan Pertanian

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Urusan Pertanian
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Urusan Modal dan PTSP
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Urusan Modal dan PTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Urusan Modal dan PTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab / Kota	Urusan Modal dan PTSP
	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Urusan Modal dan PTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Urusan Modal dan PTSP
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Modal dan PTSP
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Tenaga Kerja
	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Urusan Tenaga Kerja
		Urusan Tenaga Kerja

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota	Urusan Tenaga Kerja
		Urusan Tenaga Kerja
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Urusan Tenaga Kerja
	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 Daerah Provinsi	Urusan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kab/Kota	Urusan Tenaga Kerja
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 Daerah Provinsi	Urusan Tenaga Kerja
	Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kab/ Kota, dan Upah Minimum Sektoral Kab/ Kota	Urusan Tenaga Kerja
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Urusan Tenaga Kerja
Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam Provinsi	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 Daerah Kab/Kota dalam Provinsi	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Urusan DP3ACSKB
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	Urusan DP3ACSKB

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Urusan DP3ACSKB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Urusan DP3ACSKB
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Urusan DP3ACSKB
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Urusan DP3ACSKB
Program Pemberdayaan Sosial	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Urusan Sosial
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Urusan Sosial
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Urusan Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kab/Kota Asal	Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Urusan Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Urusan Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Urusan Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Urusan Sosial
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Urusan Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Urusan Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Urusan Sosial

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Urusan Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Urusan Sosial
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Kesehatan
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Kesehatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Urusan Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Urusan Kesehatan
	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Urusan Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Layanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Kesehatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Urusan Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Kesehatan

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Urusan Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknik Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Kesehatan
Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Urusan Pendidikan
Program Guru Dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Urusan Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Urusan Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Urusan Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Urusan Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Urusan Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Urusan Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Urusan Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Urusan Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Urusan Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Urusan Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Urusan Pendidikan
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Urusan DP3ACSKB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Urusan DP3ACSKB
Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Urusan DP3ACSKB
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Urusan DP3ACSKB

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Urusan DP3ACSKB
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Urusan DP3ACSKB
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Urusan DP3ACSKB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Urusan DP3ACSKB
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Urusan DP3ACSKB
Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Urusan DP3ACSKB
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Urusan DP3ACSKB
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Program Pemberdayaan Sosial	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Urusan Sosial
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Urusan Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kab/Kota Asal	Urusan Sosial

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Urusan Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Urusan Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Urusan Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Urusan Sosial
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Urusan Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Urusan Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Urusan Sosial
Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Urusan Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Urusan Sosial
Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	SATPOL PP
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Gubernur	SATPOL PP
	Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	SATPOL PP
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	SATPOL PP
Program Pengembangan Kebudayaan	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pembinaan Sejarah	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Permuseuman	Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Kearsipan dan Perpustakaan
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota	Urusan PUPR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota	Urusan PUPR
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pem bangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Urusan PUPR
Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Urusan ESDM
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab/Kota	Urusan PUPR
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Urusan PUPR

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Urusan Perhubungan
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Urusan Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Urusan Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Urusan Perhubungan
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	Urusan ESDM
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Urusan Kominfo
		Urusan Kominfo
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Urusan Kominfo
	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Urusan Kominfo
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi	Urusan Kominfo
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Urusan Kominfo
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Urusan Kominfo
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Urusan Lingkungan Hidup

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
Lingkungan	Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Lingkungan Hidup
Program Pem binaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Ling kungan Hidup (PPLH)	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Urusan Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Hutan	Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Urusan Kehutanan
	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi diLuar Kawasan Hutan Negara	Urusan Kehutanan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Urusan Lingkungan Hidup
Program Pem binaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Urusan Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penye lesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Urusan Lingkungan Hidup
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bakuda
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bakuda
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bakuda

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Bakuda
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Bakuda
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Bappeda
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
Program Penataan Organisasi	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Biro Organisasi
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM

PROGRAM	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM

Sumber : RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

II.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sama-sama wajib menerapkan SPM untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lebih lanjut penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan terkait dengan mutu pelayanan dasar, pengaturan lebih rinci ditetapkan oleh masing-masing Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh Menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Untuk itu, mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, namun mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan pada pengumpulan data secara empiris, penghitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya dilakukan oleh pemerintah

daerah. Dalam rangka memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat.

Penerapan SPM oleh Pemerintah Provinsi dipandang perlu agar pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi lebih terukur. Hal ini dikarenakan SPM sudah disertai tolok ukur pencapaian target kinerja yang logis dan riil, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /Prt/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

a. Pengumpulan Data Pendidikan

FORM 1.A.1

REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI PROVINSI

FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI							
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG							
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK)		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 16 SAMPAI DENGAN 18 TAHUN		WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN (MELALUI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN INKLUSIF)	
		JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG MENENGAH	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN YANG SEDANG BELAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS YANG BERSEKOLAH	PENYANDANG DISABILITAS PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	60.866	64.751	55.073	64.751	-	-
2	Pendidikan Khusus	-	-	-	-	1265	2.460

- Jumlah Peserta Didik bersumber dari data Kemdikbudristek
 - Jumlah Penduduk Usia Sekolah bersumber dari data Kemdikbudristek
 - Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

FORM 1.A.3

REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI

FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
PROVINSI: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG							
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SMA/SMK/PAKET C/ DIKSUS)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS (SMA/SMK/PAKET C/DIKSUS)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI PROVINSI YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C)	652	652	0,4	0,6	0	22
2	Pendidikan Khusus	87	87	0,42	0,6	0	4

- Jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari data Kemdikbudristek
 - Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan bersumber dari data Kemdikbudristek
 - Indeks distribusi guru tahun N dan N-1 bersumber dari data Kemdikbudristek
 - Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari data Kemdikbudristek
 - Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang bersangkutan bersumber dari data Kemdikbudristek
 - Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

FORM 1.A.5

REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR PROVINSI

FORM 1.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR					
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	-5,34	74,81	8,04	48,88
2	Pendidikan Khusus	0	50	0,71	64,29

- Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek

- Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional didik bersumber dari data Kemdikbudristek

- Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek

- Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek

- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

FORM 1.A.6

REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KEJURUAN PROVINSI

FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KEJURUAN					
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TINGKAT PENYERAPAN LULUSAN SMK		KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK	
		TOTAL JUMLAH INDIVIDU LULUSAN SMK YANG BEKERJA ATAU BERWIRSAUSAHA ATAU MELANJUTKAN STUDI	TOTAL JUMLAH INDIVIDU LULUSAN SMK PADA TAHUN TERTENTU BERDASARKAN RAPOR PENDIDIKAN	TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA PADA TAHUN N TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK	TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA PADA TAHUN N-1 TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMK)	21806	24964	54,7	33,3
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah individu lulusan SMK yang bekerja atau berwirausaha bersumber dari data Kemdikbudristek - Tingkat kepuasan dunia kerja bersumber dari data Kemdikbudristek - Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek 					

FORM 1.A.8

REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI PROVINSI

FORM 1.A.8 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI									
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI-LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI-LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1,93	1,93	1,93	1,93	1,78	1,78	1,78	1,78
2	Pendidikan Khusus	2,06	2,06	2,06	2,06	2,13	2,13	2,13	2,13

- Rata-rata skor literasi peserta didik laki-laki bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik laki-laki bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

FORM I.A.10

REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR PROVINSI

FORM 1.A.10 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR					
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	72,21	78,11	69,5	63,52
2	Pendidikan Khusus	70,24	80,24	69,47	62,72

- Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N dan N-1 bersumber dari data Kemdikbudristek
 - Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N dan N-1 dari data Kemdikbudristek
 - Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan

FORM 1.D.3

REKAPITULASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA

FORM 1.D.3 REKAPITULASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG							
NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN (%)					
		PAUD	PENDIDIKAN DASAR		PENDIDIKAN MENENGAH	SLB	KESETARAAN
			SD	SMP			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Bangka	81,70%	91.08 %	91.08 %	-	-	91.40 %
2	Kabupaten Belitung	84.92 %	96%	96%	-	-	90%
3	Kabupaten Bangka Selatan	63,17%	94,88%	94,88%	-	-	11,55%
4	Kabupaten Bangka Tengah	95,31%	100%	100%	-	-	85,94%
5	Kabupaten Bangka Barat	98,25%	99,40%	99,40%			96,48%
6	Kabupaten Belitung Timur	85,34%	95.08 %	95.08 %			77,66%
7	Kota Pangkalpinang	92,43%	95,70%	95,70%	-	-	100%

c. Capaian Target SPM Pendidikan (Rekapan)

FORM 1.E.1

CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									
NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/ TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Menengah/Kejuruan	55073	55073	80	100	99,21	19.21 %	97,74%	TUNTAS UTAMA
2	Pendidikan Khusus	1265	1265	80	100	96,27	16,27	97,74%	TUNTAS UTAMA

FORM 1.E.2

PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (PROVINSI)

FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									
NO.	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU PENDIDIKAN			PENERIMA MANFAAT		PARTISIPASI PESERTA DIDIK		HASIL PENCAPAIAN SPM
		SATUAN PENDIDIKAN	PENDIDIK	PERLENGKAPAN DASAR	UMUR 16 - 18	UMUR 4 - 18	UMUR 16 - 18	UMUR 4 - 18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Menengah / Kejuruan	128	4949	55073	55073		55073		
2	Pendidikan Khusus	9	252	1265		1265		1265	

2. Urusan Kesehatan

a. Pengumpulan Data Kesehatan

FORM 2.A.1

DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

FORM 2.A.1 DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI										
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG										
NO.	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA			KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)			KETERANGAN
				JENIS BENCANA	SASARAN PENDUDUK PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN		JENIS KLB	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK (SAKIT)	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK DAN BERISIKO PADA KONDISI KLB	
					PRA-KRISIS	TANGGAP DARURAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan

FORM 2.B.1

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEGIATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEGIATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG								
NO.	KEGIATAN	KOMPONEN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana							
	A. Tahap Pra-Krisis Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
1	Edukasi pengurangan resiko krisis	-	-	-	-	-	-	-
	B. Tahap Tanggap Darurat Krisis	-	-	-	-	-	-	-
1	Tanggap darurat saat kritis kesehatan bencana karhutla dan banjir	-	-	-	-	-	-	-
II.	Penanggulangan KLB							
1	Investigasi Kasus	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

FORM 2.B.2**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/ALAT UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI**

FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/ALAT UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG								
NO.	BARANG/ALAT	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana							
1	Makanan Pendamping (Biskuit)							
2	Obat-obatan							
3	Masker Bedah							
4	Masker N95							
II.	Penanggulangan KLB							
1	Bahan Obat-obatan Penanggulangan KLB							
2	Pengiriman Spesimen KLB							
3	Penyelidikan Epidemiologi KLB							

FORM 2.B.3**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI**

FORM 2.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
NO	SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH SDM TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana				
1	Dokter	-	-	-	-
2	Perawat	-	-	-	-
3	Bidan	-	-	-	-
4	Tenaga Kesmas	-	-	-	-
5	Tenaga Keswan	-	-	-	-
6	Tenaga Penyuluh	-	-	-	-
II.	Penanggulangan KLB				
A	Diluar Fasilitas Yankes TGC Provinsi oleh TGC				
1	Dokter	-	-	-	-
2	Tenaga Kesmas Epid	-	-	-	-
3	Tenaga Kesmas Kesling	-	-	-	-
4	Tenaga Kesmas Entomologi	-	-	-	-
5	Tenaga Laboratorium	-	-	-	-
6	Tenaga Penyuluh	-	-	-	-
B	Di Fasyankes				
1	Dokter	-	-	-	-
2	Perawat	-	-	-	-
3	Petugas Radiologi	-	-	-	-
4	Petugas Laboratorium	-	-	-	-

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan

FORM 2.C.1

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI

FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN																					
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																					
NO.	KODE*)				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM*)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
								TAHUN-N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				K
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13
1	1				Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 2.C.2

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI

FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI																					
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																					
NO.	KODE*)				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN*)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13
1	1				Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	02	02	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	02	02	1.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	02	02	1.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan

FORM 2.D.1

CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG										
NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

e. **Capaian Target SPM Kesehatan**

FORM 2.E.1

REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI

FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									
NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM PROVINSI)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Pengumpulan Data Pekerjaan Umum

FORM 3.A.1

KONDISI SPAM REGIONAL PROVINSI

FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG								
NO.	NAMA SPAM REGIONAL	LOKASI SPAM REGIONAL	UNIT AIR BAKU			UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN (PDAM/UPTD/BADAN USAHA/KP SPAM)
			NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 3.A.2

KONDISI SPALD REGIONAL PROVINSI

FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG										
NO.	NAMA SPALD REGIONAL	LOKASI SPALD REGIONAL	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN			AKSES			
				KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
							(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum

FORM 3.B.1

RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL PROVINSI

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG													
NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total										-	-	-	-

FORM 3.B.2

RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL PROVINSI

FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG															
NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	KONDISI		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT						MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total									-	-	-	-	-	-	

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum

FORM 3.C.1

RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI

FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG								
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional	-	%	-	-	-
	Curah Lintas Kabupaten/ Kota	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional	-	%	-	-	-

FORM 3.C.2

RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI

FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN			OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)		
1	2	2	3	4	5	6	7		8
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional	-	%	-	-	-	-
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional	-	%	-	-	-	-

d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum

FORM 3.D.1

CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM PROVINSI

FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG							
NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI	
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
Total *)					-	-	-

FORM 3.D.2

CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI

FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG							
NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI	
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
Total *)							

e. Capaian Target SPM Pekerjaan Umum

FORM 3.E.1

REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM PROVINSI

FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM PROVINSI: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM REGIONAL	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-

FORM 3.E.2**REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI**

FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
No	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM REGIONAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-

4. Urusan Perumahan Rakyat

a. Pengumpulan Data Perumahan Rakyat

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

FORM 4.A.1

IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI

FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA													
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG													
NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK		STATUS	
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BANJIR	TINGGI	BELITUNG TIMUR	GANTUNG	SELINSING	6,95	97	97	245	-	97	-	-
2	BANJIR	TINGGI	BELITUNG TIMUR	GANTUNG	LENGGANG	2,92	41	41	106	-	41	-	-
3	BANJIR	TINGGI	BELITUNG TIMUR	GANTUNG	GANTUNG	0,21	3	3	8	-	3	-	-
4	BANJIR	TINGGI	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	LALANG	0,07	1	1	4	-	1	-	-
5	BANJIR	TINGGI	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	BARU	0,08	1	1	2	-	1	-	-
6	BANJIR	TINGGI	BELITUNG TIMUR	KELAPA KAMPIT	PEMBAHARUAN	0,07	1	1	2	-	1	-	-
Total *)						10,30	144	144	367	-	144	-	-

FORM 4.A.2

IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PROVINSI

FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL						
SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA						
PROVINSI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG						
NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PANGKALPINANG	GABEK	SELINDUNG	110,751	MASYARAKAT	
2	PANGKALPINANG	GERUNGGANG	TUA TUNU	7,311	MASYARAKAT	
3	PANGKALPINANG	GIRIMAYA	BUKITBESAR	4,625	MASYARAKAT	
4	PANGKALPINANG	GIRIMAYA	BUKITBESAR	4,283	MASYARAKAT	
5	BANGKA	PEMALI	AIR RUAI DAN PEMALI	275,330	MASYARAKAT, PDAM BUMD DAN KAWASAN HUTAN PEMERINTAH	
6	BANGKA	SUNGAILIAT	SINAR JAYA JELUTUNG DAN SINAR BARU	345,531	MASYARAKAT, KAWASAN HUTAN PRODUKSI	
7	BANGKA TENGAH	KOBA	PADANG MULIA	53,365	PEMDA BANGKA TENGAH	
8	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	JERUK	26,806	YAYASAN, MASYAKARAT	
9	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	DUL	38,940	PEMDA BANGKA TENGAH	
10	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	123,859	MASYARAKAT DAN AREA KONSERVASI LAHAN	
11	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	PADANG	206,086	MASYARAKAT	
12	BANGKA BARAT	JEBUS	RANGI ASAM	71,906	MASYARAKAT	
13	BANGKA BARAT	MUNTOK	AIR LIMAU	52,430	MASYARAKAT	
14	BANGKA SELATAN	TOBOALI	GADUNG	291,999	MASYARAKAT	
15	BANGKA SELATAN	TOBOALI	BIKANG	30,000	MASYARAKAT	

FORM 4.A.3**PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI**

FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG											
NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total *)											

2. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

FORM 4.A.7

IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI											
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG											
NO.	KAWASAN PENGEMBANGAN	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA				MBR	Non MBR	Legal	Illegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total *)					-	-	-	-	-	-	-

FORM 4.A.8**IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10-15 HA)**

FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 HA)								
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH								
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG								
NO.	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 4.A.9

PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI

FORM 4.A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG													
NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI
							MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total *)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	

b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

FORM 4.B.1

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI

FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																																		
NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM									
												MBR	NON MBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUB SIDI UANG SEWA	RELOKASI/ PEMBANGUNAN BARU											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Total *)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 4.B.2

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI

FORM 4.B.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA			
PROVINSI BANGKA BELITUNG			
NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	Survei sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data wilayah administrasi penanganan	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		Survei primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data aset lahan pemda	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	3. Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp (Sub Total)
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi standar teknis penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi rapat	Orang*kali
		Penggandaan materi pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali

C.	Pembentukan tim satgas		Rp (Biaya C1)
	1. Pelatihan tim satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi rapat	Orang*kali
		Penggandaan materi pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan cepat		Rp (Sub Total)
	1. Pengisian form A dan B	Surveyor	Orang*Hari
		Penggandaan form	Eks
		Pengolahan data	Orang*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
F.	Penyusunan rencana aksi		Rp (Biaya F1)
	1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan	Konsumsi rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp

H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
	3. Penyusunan DED pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana	Rembug Desa	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi rapat	Orang*kali
	4. Pembangunan rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp
I.	Pembangunan baru/relokasi korban bencana		Rp (Sub Total)
	1. Pengadaan lahan	Pembebasan lahan	Rp
	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Rembug warga	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi rapat	Orang*kali
		4. Tenaga ahli	
		5. Tenaga ahli perencana	Orang*bulan
		6. Tenaga ahli arsitektur	Orang*bulan
		7. Tenaga ahli teknik sipil	Orang*bulan
		8. Tenaga ahli ME	Orang*bulan
		9. Tenaga ahli plumbing	Orang*bulan
	3. Pembangunan rumah khusus + PSU	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp

J.	Penyusunan laporan pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan laporan pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota.	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Orang*kali
		Survei lapangan	Orang*kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

2. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

FORM 4.B.5

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI

FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																					
NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M ²)	LUAS TANAH (M ²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN		
										MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total *)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 4.B.6

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PROVINSI

FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH			
PROVINSI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			
NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder: Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer: Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder: Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer: Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder: Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
		Survey primer: Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	4. Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data: Tenaga Ahli Geografi/Geodesi Tenaga Ahli Statistik	Orang*Bln Orang*Bln
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Paket meeting	Orang*Kali
	2. Rapat Sinkronisasi dokumen	Paket meeting	Orang*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang*Hari Orang*Kali
	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang*Hari Orang*Kali

4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi		Rp (Sub Total)	
1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi			
	Penggandaan Formulir		Eks	
	ATK		Rp	
	Transportasi		Orang*Hari	
	Konsumsi		Orang*Kali	
	2. Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga		
		Media diskusi		Rp
		Transportasi		Orang*Hari
		Konsumsi		Orang*Kali
		Penggandaan dokumen		
Penggandaan dokumen		Eks		
5	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)	
1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi			
	Penggandaan Formulir		Eks	
	ATK		Rp	
	Transportasi		Orang*Hari	
	Konsumsi		Orang*Kali	
	2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi		
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)		Eks
		Transportasi		Orang*Hari
		Konsumsi		Orang*Kali
	3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti		
		Tenaga Ahli Jasa Appraisal		Orang*Bln
		Transportasi		Orang*Hari
		Konsumsi		Orang*Kali
	4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi		
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)		Eks
		Transportasi		Orang*Hari
		Konsumsi		Orang*Kali
	6	Subsidi Uang Sewa		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi		
		Penggandaan Formulir		Eks
ATK			Rp	
Transportasi			Orang*Hari	
Konsumsi			Orang*Kali	
2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni			
	Konsumsi		Orang*Kali	
3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa			
	Total Subsidi Uang Sewa		Rp	
	Penggandaan dokumen		Eks	

7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		Rp (Sub Total)	
	1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi		
		Penggandaan Formulir	Eks	
		ATK	Rp	
		Transportasi	Orang*Hari	
		Konsumsi	Orang*Kali	
		2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembug Warga	
			Media diskusi	Rp
			Transportasi	Orang*Hari
			Konsumsi	Orang*Kali
			Tenaga Ahli	
			Tenaga Ahli Perencana	Orang*Bln
			Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*Bln
		3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*Bln
			Tenaga Ahli ME	Orang*Bln
			Tenaga Ahli Plumbing	Orang*Bln
	Rembug Warga			
	Media diskusi		Rp	
	5. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Transportasi	Orang*Hari	
		Konsumsi	Orang*Kali	
		Pembangunan fisik Rumah Susun		
	6. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Biaya konstruksi	Rp	
		Biaya MK	Rp	
		Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah		
	8 Pelaporan Penerapan SPM	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln	
		Penggandaan dokumen	Eks	
			Rp (Sub Total)	
	1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM			
		Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali	
	9 Pembinaan Penerapan SPM	Penggandaan dokumen laporan	Eks	
			Rp (Sub Total)	
	1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan		
		Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali	
		Penggandaan dokumen laporan	Eks	
		Praktisi/ Narasumber	Orang*Kali	
	10 Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)	
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp	
		2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Orang*Kali
	11 Evaluasi Penerapan SPM	Survei lapangan	Orang*Kali	
			Rp (Sub Total)	
	1. Evaluasi Penerapan	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali	
		Penggandaan Materi	Eks	
		Narasumber	Orang*Kali	

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

FORM 4.C.1

RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI

FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG													
NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN									
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembangunan kembali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan rumah relokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Pengadaan lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Pembangunan baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah *)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

FORM 4.C.3

RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI

FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG						
NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	PEMBIAYAAN		
				APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	-	-	-	-	-
2	Penyediaan rumah layak huni	-	-	-	-	-
Jumlah *)						

d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

FORM 4.D.1

RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI TAHUN-N

FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA TAHUN-N PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA																
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																
NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	TOTAL RUMAH RUSAK (unit)	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			TARGET				REALISASI				
					RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI
					(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total *)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase layanan **)												-	-	-	-	-
Capaian SPM Total ***)												-				

2. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

FORM 4.D.3

RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI TAHUN-N

FORM 4.D.3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH TAHUN-N PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG													
NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				
					TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	BELUM TERLAYANI	
					(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total *)					-	-	-	-	-	-	-	-	
Persentase layanan **)					-	-	-	-	-	-	-	-	
Capaian SPM Total ***)					-	-	-	-	-	-	-	-	

e. Capaian Target SPM Perumahan Rakyat

FORM 4.E.1

CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI

FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
2	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

5. Urusan Tranibumlinmas

a. Pengumpulan Data Tranibumlinmas

FORM 5.A.1

PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA						
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG						
NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

FORM 5.A.2**PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**

FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA			
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			
NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

FORM 5.A.3**REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA**

FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA				
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG				
NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

FORM 5.A.4**REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP**

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP				
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG				
NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

FORM 5.A.5**REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)**

FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)						
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG						
NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

FORM 5.A.6**REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN**

FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KETERANGAN
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

FORM 5.A.7**REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER**

FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1		3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

FORM 5.A.8**REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER**

FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER					
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Tranibumlinmas

FORM 5.B.1

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM					
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN TRANTIBUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Trantibum	-	-	-	-
2		-	-	-	-
3		-	-	-	-

FORM 5.B.2**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP**

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP PROVINSI BANGKA BELITUNG					
NO.	JENIS SOP	KEBUTUHAN SOP		HARGA SATUAN KEGIATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		SOP BARU	PEMBAHARUAN SOP		
1	2	3	4	6	7
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

FORM 5.B.3**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS**

FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG												
NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP				JUMLAH KEBUTUHAN PPNS				JUMLAH SATLINMAS		
		DIKLAT DASAR	DIKLAT TEKNIS LAIN	HARGA SATUAN PER JENIS DIKLAT	BESARAN BIAYA	EKSISTING	KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA	BIMTEK	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 5.B.4**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP**

FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG						
NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-

FORM 5.B.5**PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK**

FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK									
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									
NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN LAIN-LAIN	PERKIRAAN KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN
		CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGOBATAN	ASET RUSAK RINGAN	ASET RUSAK SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PERBAIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Tranibumlinmas

FORM 5.C.1

RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN PROVINSI

FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN									
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									
NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

FORM 5.C.3

RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP PROVINSI

FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									
NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 5.C.5**RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA**

FORM 5.C.5 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PROVINSI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									
NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Tranibumlinmas

FORM 5.D.1

REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA PROVINSI

FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA											
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG											
NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 5.D.3

REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PROVINSI

FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP											
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG											
NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 5.D.5

REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP PROVINSI

FORM 5.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA											
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG											
NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

e. Capaian Target SPM Trantibum

FORM 5.E.1

CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM									
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									
NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

6. Urusan Sosial

a. Pengumpulan Data Sosial

FORM 6.A.1

DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS																
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																
NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KELUARGA /MASYARAKAT/ SESEORANG TIDAK MENGURUS	KONDISI KETRE	LANTRAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyanggung Disabilitas																
1	Marzuki		Laki - laki	-	Aik Merbau	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
2	Adha Firmansyah		Laki - laki	-	Perawas	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
3	Bery		Laki-laki	-	Kejaksaan	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
4	Dwi Wahyono		Laki- laki	-	Sungai Baru	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
5	Bambang Utoyoy		Laki- laki	-	Tanjung	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
6	Thomas Edyson		Laki- laki	-	Pagarawan	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
7	Santia		Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
8	Arini		Perempuan	-	Koba	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
9	Rizal Ptimayandi		Laki - laki	-	Kejaksaan	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
10	Heru Subagio		Laki - laki	-	Selindung Baru	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
11	George Van Der Star		Laki - laki	-	Pasir Putih	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
12	Suryadi		Laki - laki	-	Toboali	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
13	Sumhari		Laki - laki	-	Air Seruk	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
14	Susanto		Laki - laki	-	Aik Payak	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
15	M.Muslimin		Laki - laki	-	Pending	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
16	Inglie Satriah		Laki - laki	-	Aik Pelempang	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
17	Ramandinto		Laki - laki	-	Pal Satu	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
18	Avendo		Laki - laki	-	Pal Satu	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
19	Adela		Perempuan	-	Baru	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
20	Surita		Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
21	Zarkasih		Laki - laki	-	Kota Waringin	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
22	Hairullah		Laki - laki	-	Nbung	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
23	Andri Deswanto		Laki - laki	-	Sinar Bulan	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
24	Aldi Saputra		Laki-Laki	Perumahan Duren 14 Februari 1998	Pangkal Beras Rt/RW 001/004 .Kel. Desa Pangkalan Beras kec. Kelapa Kab.Bangka Barat	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
25	Amaliah		Perempuan	Kisarar, 21-02-1982	Dusun Kebintik3 RT/RW 003/- Kel. Kebintik, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
26	Ima		Perempuan	Pangkalpinang 13-12-1980	Dusun Pedindang, RT/RW 004/000 Kel. Pedindang, Kec. Pangkalan Baru	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-

27	Marlina		Perempuan	Sarang mandi 24-05-1997	RT/ Rw 006/ 002 Kel. Sarang Mandi , Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
28	Nur Hayati		Perempuan	Cempaka Putih, 03-07-1990	Ds. Cempaka putih RT/RW 14/001, Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
29	Muhammad Ihsan		Laki-Laki	Sungailiat, 18 Desember 2001	Jl. Sri Menanti I RT.001 Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
30	Raden Muhammad		Laki-Laki	Mesujian Jalur (surnsel), 30 Juni 2001	Kp. Palembang Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
31	Wandi		Laki-Laki	Teluk Limau, 06 Desember 2004	Dusun Pala Desa Teluk Limau RT. 011 RW. 002 Kec. Paritiga Kab. Bangka Barat	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
32	Juliantoro		Laki-Laki	Pangkalpinang, 24 Juli 2001	Gang Satam IX RT. 009 RW. 003 Kel. Semabung Baru Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang.	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
33	Eky Sanjaya		Laki-Laki	Pangkalpinang, 01 Juli 2005	Jl. Rustam Effendi Dalam RT. 006 RW. 002 Kelurahan Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang.	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
34	STEVEN		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
35	HOLAN		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
36	SOPANDI		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
37	EDI		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
38	DIKI		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
39	ANDI CANDRA		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
40	GARA		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
41	BIMA		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
42	ANDI HENDERA		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
43	REDY		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
44	ZARKAZI		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
45	AGUN GUNTARA		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
46	FERIYADI		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
47	LUTFI		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
48	AHMAD FADILA		Laki-Laki	-	YAYASAN REHABILITASI MENTAL MOELIYA SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA	-	-	-	-	-	-	-	Disabilitas Mental	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL																	

Anak															
1	MEGITA LESTARI	PEREMPUAN	PANGKALPINA NG/ 10/05/2011	UPTD PSBS DINSOSPMID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	REVIRA	PEREMPUAN	PANGKALPINA NG	UPTD PSBS DINSOSPMID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SASYA	PEREMPUAN	PALEMBANG	UPTD PSBS DINSOSPMID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BINTANG	LAKH-LAKI	PANGKALPINA NG	UPTD PSBS DINSOSPMID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NIPAH	PEREMPUAN	PANGKALPINA NG	UPTD PSBS DINSOSPMID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JUANRI PRATAMA	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	DHADY MUSLIM	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AIDL	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	M. IBRAHIM	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	A. DA'ROB	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	M. ARROHIM	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DESTA	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	RIZKI	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RARI JUNIOR	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	AZHAR	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	YUSUF AL HANDANI	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DAIDUR RAHMAT	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	GOIN AGUSTA	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	FIVERAHAYU	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	GANJISKA LAILUAH	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KURNIA PUTRI	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	JULI	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	HELMI MARYANI	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	MIRANDA	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RESTI VIRNANDA	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SINTA	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SUTI NURAZIAH	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	MARNI MUSTIKA	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BAIM	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	A. KUMADI	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ANSORI	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KORESYA	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	ADITTYA	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	WALYAN HUZAN	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	A. NASIRN AMIN	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	IRFAN SA PUTRA	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	FAJARIL SIDIQ	Laki - Laki	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	NANDA LESTARI	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	ZULAIKA	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	AYU MATA	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	RISKA	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	CIKI KUNLIASARI	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	SERLINA	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	SELA ANGGERI	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PRIANI	Perempuan	-	LKSA AL KAUTSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

111	RUSPA	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	SYEREN	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	RANI	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	PUTRI	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	BELA	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	TASYA	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	MILDA	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	AMI	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	FITRI	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	ALENTA	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	ISTI	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	HASANAH	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	NURJ	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	AISYAH	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	ATUI	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	SANNIAH	PEREMPUAN	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	IRPAN	Laki - Laki	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	APRIL	Laki - Laki	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	ANDI	Laki - Laki	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	GUNAWAN	Laki - Laki	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	ANGGI	Laki - Laki	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	FAHM	Laki - Laki	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	RIZKI	Laki - Laki	-	LKSA AD DHUHA PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	FAHM	Laki - Laki	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	DAHID	Laki - Laki	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	SUNIL	Laki - Laki	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	AKROM	Laki - Laki	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	REZA	Laki - Laki	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	PUTRI	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	AQILA	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	NABILA	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PUTRA	LAKI - LAKI	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	MIZAN	LAKI - LAKI	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	FIKA	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	INKAN	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	RIFKI	LAKI - LAKI	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	FANESSA	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	SHANIA	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	ZAHRA	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	AMEL	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	NABILA Z	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	ADE	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	ZASKIA	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	ALFAN	LAKI - LAKI	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	CIKA	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	INDRAWATI	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	ANGGUN	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	WARDA	PEREMPUAN	-	LKSA AL KHOIRYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	SEHAN	LAKI - LAKI	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	AKRAM	LAKI - LAKI	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	PAJRI	LAKI - LAKI	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	DAPI	LAKI - LAKI	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	MEMEY	PEREMPUAN	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	JOSE	LAKI - LAKI	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	NOVELA	PEREMPUAN	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

166	RAISA	PEREMPUAN	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	TRIXIE	PEREMPUAN	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	JEFFRI	LAKI - LAKI	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	INDRA AGUS	LAKI - LAKI	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	FESSA F	PEREMPUAN	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	PUTRI	PEREMPUAN	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	VERONICA V	PEREMPUAN	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	SIDNEY	PEREMPUAN	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	SANI NRUNU	PEREMPUAN	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	MELI	PEREMPUAN	-	LKSA RUTH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	SARAH MITCHELC	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	JELIAN N	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	BEKU	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	IKA	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	VELLA	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	VIRGAN ARDIANSYAH	LAKI - LAKI	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	ROMI	LAKI - LAKI	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	AMBRI	LAKI - LAKI	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	MUHAMMAD	LAKI - LAKI	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	SAFRI	LAKI - LAKI	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	M. ROMDON	LAKI - LAKI	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	BAHRI	LAKI - LAKI	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	MAUGHFOROH	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	LAIKA SANTIKA	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	MARWAH JULIANI	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	HALIPAH	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	NABILA	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	MARLIN OKTAVIA	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	MULIYAWATI	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	DONA AYUDIA	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	ZATURA KURANATI	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	ANIN ANGGREATI	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	YULITA	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	SUSILAWATI	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	INDRI GUNAWAN	PEREMPUAN	-	LKSA BAITURAHMAH ANNUR PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	NILAM SAPUTRI	PEREMPUAN	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	SANIA	PEREMPUAN	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	SAHRI ROMDANI	LAKI - LAKI	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	M. ALI	LAKI - LAKI	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	ANDREAS S	LAKI - LAKI	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	DIKI	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	RYAN	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	FARHAN	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	ADIL FAJRI	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	HABI BRAHMAN	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	SAIFAN	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	ARUA	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	M. NUR YATIM	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	RANNGA SAPUTRA	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	HEN GUNAWAN	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	RUDI YANTO	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	DONNY	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	ABIMAYU	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	RIFKY AGUSTIAN	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	NOVRI ARRAZAQ	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	ZHARUDIN	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

222	PATOLI	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	DAVINO	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	EVAN ANTONI	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	DO'A IBTIDAL	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	BULIAIDI	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	SEPTA PORNANDO	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	M. SOLBH	Laki - Laki	-	LKSA MUHAMMIDIYAH PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	RIDHO	Laki - Laki	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	IBRAHIM	Laki - Laki	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	FAREL	Laki - Laki	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	ZAKI ERMAWAN	Laki - Laki	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	JOPANDI	Laki - Laki	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	Dinar Sugara	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	Indah Safitri	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	Raisa	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Mulia	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	Upih	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Kasih	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Iessya Amanda	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	Alvina Damayanti	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Lisa Ratna Sari	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	Tysta Anggraini	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Piola	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	Nabilla	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Eka	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	Keyla Ananda	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	Putri Sulistiani	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	Aziz	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Rizki	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	Adhan Farrezza	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	Erik	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Fauzan	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	Ariel	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Nathania.Z	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	Kania	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	Rolita	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	Ika	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Nuria	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Destriana	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Melani	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	Yulia Mega	Perempuan	-	LKSA Aisyiyah Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	Zahira	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	Aisha	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Sri Kusmawati	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	Yang Harnani	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	Rika Wardani	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	R.A.Drayoga	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	Takwa	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Rifqi	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Azam	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	Basron	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	R.A Prayogi	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Rozan Yahya	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	Saidina Baim	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	M.Sholahuddin Mubarak	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	Ahmad Sahrul Apriyadi	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	Noval Hardiansyah	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	Safnat Fuani	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Rifa G	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	Sukardi	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Rafa Saputra	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	Maulidir Rizky	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	Mahesa	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	Ridho Septian	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

286	Darsuki	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	Wira	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	Azhar	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	Pandu P.N	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Arifka	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	Ananda Mustika	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Tania	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	Rela Angraini	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	Yumita	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Bintang Fitriani	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Devita maharani	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	Afika Nurfauziyah	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	Risa	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	Elmah	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Feni	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	Olivia Surdani	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	Nurfazah	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	Salsabila Nurjanah	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Princeshani meisita	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	Dea Rahma Dani Putri	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	Salsabila Syahrini	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	Amindah Rahayu.N	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	Sherin Andini	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	Yusnita	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Nazwa Khumaira.M	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	Dini	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	Laila Tisyari	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Siti Mei Syarah	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Desilawati	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Cici Cahya	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	Nohua Lestari	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Devita maharani	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	Amar	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Andi Rahmat	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Iqbal hakim	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	Raffi Agustan	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Reza Andrian	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Riduan	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	Sanjaya	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	Bayu	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	Deskyan Rafkyandri	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Diki Novandra	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	Doni Pratama	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	Duta Fernandi	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Jeffri Saputra	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Ahmad Abyyanfaqh	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Dyon Suprayitno	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Moh Agung Saputra	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	Iqbal Al-Farizi	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Aran Shaza	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	Muhammad Khisan	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	Abdul Wahid	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Abdullohim	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	Abie Garra	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Ahmad Habibi	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	Alfino Ramadana	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Anri Wijaya	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Bayu Anggela	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	Billal alvino	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	Frezi Valean	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

346	Insan Badrun Kusuma	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	La Khairul Azzam	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	M.Wayudin	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	Muhammad Yusuf Firza	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	Mulia Putra	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	Rabbihis zahkri arrasy	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	Refaldi	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Ultra Duniardi	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	alvin saputra	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Azam Fadillah	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	ArgaDinata	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Arjuna	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Devin alrisqi	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	Dimas Winto Wicaksono	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	Dofer Armansyah	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	Harith Haziq	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	Hafnan Rafasya	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	Jeftian Pratama	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	Laskar Alf Muhammad	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	Mikhsan	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	M.Fareza	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	Muhammad Rio	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	Muhammad Rizky	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	Novian Tri Saputra	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	Raka zuhdi Naufal	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	Rizky nefri Tilova	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	Rua Infriansyah	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	Sulthan Nadhif Zulkarnain	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	Yuda	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	Azzam Al-Hakim	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	Faiz Akbar Mubarak	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	Ikhwan M. Ruffi	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	Muhammad Maulidir Rizki	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	Noval Hardiansyah	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	Rhandy Aidil Prayoga	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	Rhendy Aidil Prayogi	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	Rhidho Septian	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	Baim Wong	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	M. Wiraw ichiantara	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	Moh. Ashari	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	Muhammad Rizki	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	Muhammad Sholahuddin Mul	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	Pitung Arapka	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	Rifqi Rahasyam Husnaidi	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	Shafnat Fuani	Laki-Laki	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	Aisyafa Aulia	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	Andi Mariana	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	Dwi Asmi Maurira	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	Kirana Putri Saptia	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	Nada Lorenza	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Salwa Fazluna	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	Tantri Yuliana	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	Tia Kirana	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	Zafira Salsabila	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Annisa	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

401	Ummu Zakia Adesti	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	Andanda Mustika	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	Delfi Safitri	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	Eka Sari	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	Melisa Genovic	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	Mini Lestari	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	Mujiati	Perempuan	-	LKSA Hidayatullah Teru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	Nur Azzizah	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	Nur Izza Rahmah	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Wahyuni	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Alhauriza Shadarifah	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	Cerli Amanda	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	Refa Audia	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Fatima Aprilia	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Wulan Aprilia	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	Safira Rahmadhani	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	Naizila Adha	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	Zahara Bela Safitri	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419	Intan S	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Zardani	Laki - Laki	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	Assuna	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	Zahra	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Della	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	Imam Krama	Laki - Laki	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	Sri Riyani	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	Okta	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	Petri Marsanda	Perempuan	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	Muhammad Al-Hafic	Laki - Laki	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	Rian	Laki - Laki	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Noviansyah	Laki - Laki	-	LKSA Nurul Ihsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	Baistul Hasanah	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	Siti Aminah	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	Siska	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	Eka Pratiwi	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	Ufika Ulami	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	Sherli	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	Elmah	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	Bunga Anggraeni.H	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	Naba Aulia	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	Azza Zakira	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Fitri Rahmadani Harahap	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	Fajar Rahmadani	Laki - laki	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	Fare	Laki - laki	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Nisa Amelia Harahap	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	Dimas	Laki - laki	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	Sayid	Laki - laki	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	Ratna	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	Leoni	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	Enjel	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	Rahma	Perempuan	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	Jumari	Laki - laki	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	Redi	Laki - laki	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	Andan	Laki - laki	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	Abdul	Laki - laki	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	Nawar	Laki - laki	-	LKSA NUR RAHMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL																			

Lanjut usia																
1	Maryati	Perempuan	Semarang, 04 Mei 1939	Dusun Keceper RT/RW 000/000 Kel.Penyamun Kel.Pemali Sungailiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ambo	Laki-Laki	Bone, 01 Juli 1956	Gg. Npah IV RT/RW 006/002 Kel.Pasir Putih Bukit Intan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Poniman	Laki-Laki	Mentok, 01 Juli 1958	Kp.Jawa Lama RT/RW 001/001 Kel. Desa Sungai Daerah Kec.Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Hon Nyuk Tam	Perempuan	Air duren, 31 Desember 1943	Jl.Dokter Soetomo Kel Air RT/RW 009/000 I Air Duren/ Kec Pemali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Juliyah	Perempuan	Pangkalpinang, 14 Juni 1950	Jl. Kayu Putih R/Rw 002/001 Kel. Bukit Baru Kec. Gerunggang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sunety	Perempuan	Bandung, 14 April 1939	Jl. Mayor Busni A. Rachman RT/RW 005/002 Kel. Air kepala 7 Kec. Gerunggang Pangkalpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sunarsi	Perempuan	Citacap, 01 Juli 1940	Kp. Sidorejo RT/RW 001/001 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sumarni	Perempuan	Jakarta, 25 November 1961	Jl. Sriwijaya n0.240 B RT/RW 001/001 Kel.Asam Kec. Rangkui Pangkalpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Yulinar	Perempuan	Padang, 27 Juli 1942	Jl.Uzman Ambon, RT/RW 001/003 Kel. Kejaksanaan. Kec. Taman Sari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Irwansyah	Laki-Laki	Lampung, 07 Juli 2023	Jl. Luar Batang, RT/ RW 006/001 Kel.Penjar, Kec. Penjarangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sulaiman	Laki-Laki	Simpang yul, 17-08-1980	Simpang yul, RT/ RW 006/03 Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Airasyid	Laki-Laki	Sulawesi Selatan, 06 Agustus 1959	Jl. Adhyaksa Wicaksana RT/RW 005/002 Kel. Sinar Bulan, Kec. Bukit Intan Pangkalpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Chairul Anam	Laki-Laki	Mentok, 12-10--1961	Kampung Senang Hati R/ Rw 003/002 Kel. Sungai Daeng kec. Muntok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sofiah	Perempuan	Pangkalpinang	Air Itam, pangkalpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Siti Nuraeni	Perempuan	Pangkalpinang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SUBAKTI	Laki-laki	-	LKS LU AL MAA'ULIN TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	AHMAD YANI	Laki-laki	-	LKS LU AL MAA'ULIN TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ADI JAYUSMAN	Laki-laki	-	LKS LU AL MAA'ULIN TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	HAMDANI	Laki-laki	-	LKS LU AL MAA'ULIN TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	LIE SAN	Laki-laki	-	LKS LU AL MAA'ULIN TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NETY	Perempuan	-	LKS LU AL MAA'ULIN TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	HALIMAH	Perempuan	-	LKS LU AL MAA'ULIN TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SOPYA	Perempuan	-	LKS LU AL MAA'ULIN TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	LLUSIANI	Perempuan	-	LKS LU AL MAA'ULIN TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ROHANI	Perempuan	-	LKS LU AL MAA'ULIN TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	AISYAH	Perempuan	-	LKSLU RUMAH BERBAGI AL MUGHNI KABUPATEN BANGKA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	DHARI	Laki-laki	-	LKSLU RUMAH BERBAGI AL MUGHNI KABUPATEN BANGKA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RISMAWATI	Perempuan	-	LKSLU RUMAH BERBAGI AL MUGHNI KABUPATEN BANGKA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ALI	Laki-laki	-	LKSLU RUMAH BERBAGI AL MUGHNI KABUPATEN BANGKA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ZALDI	Laki-laki	-	LKSLU RUMAH BERBAGI AL MUGHNI KABUPATEN BANGKA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MURNAH	Perempuan	-	LKSLU RUMAH BERBAGI AL MUGHNI KABUPATEN BANGKA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	AIDA	Perempuan	-	LKSLU RUMAH BERBAGI AL MUGHNI KABUPATEN BANGKA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	FAUZIAH	Perempuan	-	LKSLU RUMAH BERBAGI AL MUGHNI KABUPATEN BANGKA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	JUMAI	Perempuan	-	LKSLU RUMAH BERBAGI AL MUGHNI KABUPATEN BANGKA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	SAMILAH	Perempuan	-	LKSLU RUMAH BERBAGI AL MUGHNI KABUPATEN BANGKA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL																

Gelandangan Pengemis																	
1	WIRA SANJAYA		Laki-Laki	Bitar, 14 Desember 1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dipulangkan ke daerah asal pada tanggal 22 Februari 2023
2	FENY VITRILYAH		Perempuan	Palembang, 13 November 2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dipulangkan ke daerah asal pada tanggal 22 Februari 2023
3	DENI		Laki-Laki	Palembang, 18 Oktober 1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dipulangkan ke daerah asal pada tanggal 2 Maret 2023
4	DEWI MASHITA		Perempuan	Surabaya, 18 Desember 1977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dipulangkan ke daerah asal pada tanggal 7 Mei 2023
5	WILLYZAR		Perempuan	Medan, 28 Agustus 1959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dipulangkan ke daerah asal pada tanggal 7 Mei 2023
6	SITI NORMA		Perempuan	Jakarta, 1 Juli 1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dipulangkan ke keluarga pada tanggal 13 Juni 2023
7	DENI		Laki-Laki	Palembang, 23 April 1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dipulangkan ke daerah asal pada tanggal 16 Juni 2023
8	ANSELI BADA		Perempuan	Palembang, 14 Januari 1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dipulangkan ke daerah asal pada tanggal 16 Juni 2023
9	LUSIANI		Perempuan	Tanjungpandan, 20 Juni 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2023
10	SURYATI		Perempuan	Tanjungpandan, 1 Juli 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ANDREI RAHANYU		Perempuan	Makasar, 17 Desember 1978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	FAZRIN ABDI KAMARULLAH		Laki-Laki	Papalia, 5 November 1991	Jl. Kebun Cengkhih Rt01/09 Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SEPTI WULANDARI		Perempuan	Banjarmasin, 30 November 1994	Dayan Masjid Rt04 Desa Pancor Kec. selong Kab. Lombok Timur Prov. NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MAWARDI		Laki-Laki	Dasan Gundul, 19 oktober 1990	Dasan Gundul Desa Menemeng Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah Prov. NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SAPWAN		Laki-Laki	Ampenan, 04 Agustus 1993	Jl. Adi Sucipto Batu Raja Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram Prov. NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	REFAI		Laki-Laki	Pidada, 01 Juli 1985	Dusun Pidada Desa sintung Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah Prov. NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	LALU RIZKI ANTONI		Laki-Laki	Sintung, 10 November 1998	Pidada desa sintung Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah Prov. NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ARIANSYAH		Laki-Laki	22 Tahun	Desa Namang Kec. Namang Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KIMAWAN SUTANDI		Laki-Laki	Jakarta, 17 April 1963	Raw asari Rt007/004 Kel. Raw asari Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. Uku Timur Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	IRWANSYAH		Laki-Laki	Lampung, 07 Juli 1978	Jl. Luar Batang Rt006/001 Kel. Paringan Kec. Penjarangan Jakarta Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	WIRA SANJAYA		Laki-Laki	26 tahun	Kampung Teladan Sebelum SPBU Toboali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL																	

FORM 6.A.2**REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI DALAM PANTI DAN/ATAU LEMBAGA BAIK MILIK PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT**

FORM 6.A.2 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI DALAM PANTI DAN/ATAU LEMBAGA BAIK MILIK PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG										
NO	KABUPATEN /KOTA	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (FISIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (INTELEKTUAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (MENTAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (SENSORIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (GANDA)	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTA	GELANDANGAN PENGEMIS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	48	-	-	455	35	21	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 6.A.3**REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/ KOMUNITAS)**

FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/KOMUNITAS) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG												
NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (FISIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (INTELEKTUAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (MENTAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (SENSORIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (GANDA)	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTAR	GELANDANGAN PENGEMIS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 6.A.4**REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI**

FORM 6.A.4 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																
NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KONFLIK SOSIAL	AKSI TEROR	KEBAKARAN	WABAH/ EPIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	53	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 6.A.5**REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA**

FORM 6.A.5 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																
NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KONFLIK SOSIAL	AKSI TEROR	KEBAKARAN	WABAH/ EPIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 6.A.6

DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS)

FORM 6.A.6 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									
NO	NAMA	JENIS SDM KESOS (PEKSOS/PENSOS/TKS/RELAWAN SOSIAL)	NAMA KELEMBAGAAN/ SARANA PRASARANA TEMPAT BEKERJA	STATUS SDM		REKRUITMEN DAN PEMBINAAN			KET
				ASN	MASYARAKAT	PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandngan Pengemis di dalam panti/lembaga									
1	Medyharto, S.Psi, MM	Peksos	- UPTD (Panti Sosial Penyandang Disabilitas) PSBS dan PSBLH	1	-	-	-	-	-
2	Zulya Efriani, S.Sos, MPA	Peksos		1	-	-	-	-	-
3	Pratikto Wiratama, SST,	Peksos		1	-	-	-	-	-
4	Safitri, S.TR.Sos	Peksos		1	-	-	-	-	-
	Total			4	-	-	-	-	-
Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dst	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total								

FORM 6.A.7

DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI

FORM 6.A.7 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI												
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG												
NO	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	NAMA SARANA DAN PRASARANA	STATUS KEPEMILIKAN		AKREDITASI	KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN			KET
			PEMERINTAH	MASYARAKAT		SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RENDAH	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sosial											
1)	Jumlah total disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di dalam panti/ lembaga disabilitas	Nama panti sosial penyandang disabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total panti penyandang disabilitas yang ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah panti penyandang disabilitas yang dibutuhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti sosial											
1)	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di dalam panti/lembaga anak	Nama panti sosial anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	UPTD PSBS Dinsospmd	Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total panti anak yang ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah panti anak yang dibutuhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti sosial											
1)	Jumlah total lansia yang memerlukan layanan di dalam panti/lembaga lansia	Nama panti sosial lanjut usia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total panti lansia yang ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah panti lansia yang dibutuhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti sosial											
1)	Jumlah total gepeng yang memerlukan layanan di dalam panti/lembaga gepeng	Nama panti sosial gepeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total panti gepeng yang ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah panti gepeng yang dibutuhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi											
1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total sarpras yang ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah sarpras yang dibutuhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial

FORM 6.B.1

PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG							
1 NO	2 JENIS LAYANAN	3 PENERIMA LAYANAN	4 STANDAR LAYANAN	5 INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	6 TARGET/ PEMENUHAN SPM	7 KOMPONEN BIAYA	8 PERHITUNGAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Penyandang Disabilitas Terlantar di Wilayah Provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = X/Y x 100%
			A. Standar Biaya Pribadi Disabilitas	a. Penyediaan Permakanan		(a) jumlah penyandang Disabilitas Terlantar penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) indeks permakanan perorang per hari; (d) pengadaan sarana prasarana dapur; dan (e) bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = a x b x c Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = (a x b x c) + d Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
			B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial	b. Penyediaan Sandang		(a) pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) pembelian kebutuhan khusus untuk: anak perempuan, balita, dan yang mengalami bedridden setiap bulan; (d) pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per tahun; dan (f) transportasi petugas.	RUMUS = a+b+c+d+e+f
			1. Standar SDM	c. Penyediaan asrama yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = b Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas dan mampu menyediakan anggaran. RUMUS = a+b Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c

			2. Standar sarana dan prasarana	d. Penyediaan alat bantu	(a) kursi roda, (b) kaca mata, (c) pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu, (d) alat bantu dengar, (e) kruk, (f) tripod, (g) tongkat putih, (h) reglet (alat tulis untuk tuna netra), dan (i) transport petugas.	Sesuai kebutuhan
				e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	(a) obat psikiatri; (b) obat umum; (c) tensimeter; (d) timbangan; (e) pengukur tinggi badan; (f) pengukur gula darah; (g) termometer; (h) honor perawat; (i) biaya kunjungan dokter; (j) biaya kunjungan psikiater; dan (k) biaya kunjungan pekerja sosial medis.	Sesuai kebutuhan
				f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
				g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
				h. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan	(a) biaya transportasi pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang disabilitas.	RUMUS = a + b
				i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	(a) biaya transportasi pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang disabilitas.	RUMUS = a + b
				j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
				k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	(a) biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport penyandang disabilitas terlantar; dan (c) biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya

FORM 6.B.2

PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/ PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantardi Dalam Panti	Anak Terlantar di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Anak Terlantr di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = X/Y x 100%
			A. Standar BiayaPribadi Anak	a. Pengasuhan		(a) Jumlah tenaga kesejahteraan sosial; (b) Jangka waktu pemberian layanan; (c) Indeks honor	RUMUS = a x b x c
			B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial	b. Penyediaan permakanan		(a) Jumlah anak terlantar penerima permakanan di dalam panti per tahun;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = a x b x c
			1. Standar SDM			(b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanan per orang per hari;	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = (a x b x c) + d
			2. Standar sarana dan prasarana			(d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; (e) Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi.	Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial sosial Anak Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
				c. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel,pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan balita setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per tahun; (f) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d + e + f

			d. Penyediaan asrama yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasarana untuk pantimilik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = b Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar dan mampu menyediakan anggaran. RUMUS = a + b
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c
			e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		(a) Obat umum; (b) Tensimeter; (c) Timbangan; (d) Pengukur tinggi badan; (e) Termometer; (f) Honor perawat; (g) Biaya kunjungan dokter.	Sesuai dengan kebutuhan
			f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat bermain anak; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat peraga; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak		(a) Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Biaya transport anak.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Biaya transport anak; (c) Perlengkapan sekolah terdiri atas buku, tas sekolah, dan alat tulis.	RUMUS = a + b + c
			j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport anak terlantar; dan (c) biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
			l. Akses ke layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti		(a) Biaya perjalanan atau transport Pekerja Sosial Profesional; (b) Biaya transport anak terlantar.	Sesuai dengan standar biaya

FORM 6.B.3
PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

FORM 6.B.3 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG							
NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/ PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIA YA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Lanjut Usia Terlantar di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Lanjut Usia Terlantr di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = X/Y x 100%
			A. Standar Biaya Pribadi Lanjut Usia	a. Penyediaan Permakanan		(a) Jumlah Lanjut Usia Terlantar penerima permakanan di dalam panti per tahun;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlnatar. RUMUS = a x b x c
			B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial			(b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun;	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar. RUMUS = (a x b x c) + d
			1. Standar SDM			(c) Indeks permakanan per orang per hari;	Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
			2. Standar sarana dan prasarana	b. Penyediaan Sandang		(d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; (e) Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi.	(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu)stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) pembelian kebutuhan khusus untuk lanjut usia yang mengalami bedridden setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama per tahun;
		c. Penyediaan asrama yang mudah diakses			(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasrana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlnatar. RUMUS = b Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar. RUMUS = a + b Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c	

				d. Penyediaan alat bantu	(a) Kursi roda, (b) kaca mata, (c) pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu dengar, (d) kruk, (f) Lansia w alker; (g) tripod, (h) tongkat; (i) transport petugas.	Sesuai dengan kebutuhan
				e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	(a) Obat umum; (b) Obat khusus; (c) Tensimeter; (d) Timbangan; (e) Pengukur gula darah, kolesterol, dan asam urat; (f) Termometer; (g) Honor perawat; (h) Biaya kunjungan dokter; (i) Biaya kunjungan psikiater;	Sesuai dengan kebutuhan
				f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor; Pembelian bahan/ alat pengisi w aktu luang.	RUMUS = a + b + c + d
				g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	(a) Honor pekerja sosial profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
				h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport lanjut usia.	RUMUS = a + b
				i. Akses ke layanan kesehatan dasar	(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport lanjut usia.	RUMUS = a + b
				j. Pemberian pelayanan k. penelusuran keluarga	Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
				l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport lanjut usia terlantar; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
				m. Pemulasaraan	(a) Paket biaya pemulasaraan; (b) Transport petugas.	RUMUS = a + b

FORM 6.B.4

PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Gelandangan dan Pengemis di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti		<p>RUMUS:</p> <p>X = Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Y = Populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti.</p> <p>Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$</p>
			A. Standar Biaya Pribadi Gelandangan dan Pengemis	a. Penyediaan Permakanan		(a) Jumlah gelandangan dan pengemis penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = $a \times b \times c$
			B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial			(c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur;	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = $(a \times b \times c) + d$
			1. Standar SDM			(e) Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.	Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
			2. Standar sarana dan prasarana	b. Penyediaan Sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan balita setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agamanya per tahun; (f) Transport petugas.	RUMUS = $a + b + c + d + e + f$

				c. Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat.	-Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = b -Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = a + b -Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c
				d. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		(a) Obat umum; (b) Tensimeter; (c) Timbangan; (d) Pengukur tinggi badan; (e) Termometer; (f) Honor perawat; (g) Biaya kunjungan dokter.	Sesuai dengan kebutuhan
				e. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat bermain anak (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
				f. f. Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b
				g. Pemberian bimbingan keterampilan dasar		(a) Honor instruktur; (b) Bahan keterampilan; (c) Alat keterampilan.	RUMUS = a + b + c
				h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport gelandangan dan pengemis.	RUMUS = a + b
				i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport gelandangan dan pengemis serta keluarganya;	RUMUS = a + b + c
				j. Pemulangan ke daerah asal		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial;	RUMUS = a + b

FORM 6.B.5

PENGHITUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI WILAYAH PROVINSI

FORM 6.B.5 PENGHITUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG							
NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/ PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIA YA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah provinsi	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah provinsi	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah provinsi		RUMUS: X = Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
			A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyediaan permakanaan		(a) Paket pembelian bahan permakanaan/makanan siap saji; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanaan per kejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; (f) Indeks permakanaan per orang per hari.	RUMUS = a + b + c *a = d x e x f
			B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang		(a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanaan per kejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; (f) Indeks permakanaan per orang per hari.	RUMUS = a + b + c *a = d x e
			1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tempat penampungan pengungsi.	RUMUS = a + b + c *a = d x e
			2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan permakanaan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus.	RUMUS = a + b + c *a = d x e
				e. Pelayanan dukungan psikosial		(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikosial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesehatan sosial/relawan sosial; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; (e) Indeks dukungan psikosial.	RUMUS = a + b + c *a = d x e

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial

FORM 6.C.1

RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI

FORM 6.C.1.RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																								
NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N+5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SOSIAL	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaman sesuai dengan gizi maksimal kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun kewenangan patroli	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Jumlah orang yang terakses asrama yang layak huni kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian bimbingan fisik mental, spritual, dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mentan dan spritual kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian bimbingan aktivitas sehari-hari	Jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aktivitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian layanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK TERLANTAR DALAM PANTI

FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK TERLANTAR DALAM PANTI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																								
NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUM BER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG ANAK TERLANTAR DALAM PANTI															KONDISI AKHIR TAHUN N+5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	SOSIAL	Pengasuhan	Jumlah orang yang mendapatkan	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan peranakan sesuai dengan kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dna kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan asrama yang mudah diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian bimbingan fisik, mental spritual dan sosial	Jumlah pesertabimbingan fisik, mental dan spritual kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aktifitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Jumlah orang yang mendapatkan pengasuhan keluarga pengganti kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 6.C.3

RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI

FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																								
NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PLANSIA TERLANTAR DALAM PANTI															KONDISI AKHIR TAHUN N+5
									TAHUN N+1			TAHUN N+2			TAHUN N+3			TAHUN N+4			TAHUN N+5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 6.C.4

RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS LANSIA DALAM PANTI

FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS LANSIA DALAM PANTI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																									
NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS LANSIA DALAM PANTI															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5	
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5				
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
1	SOSIAL	Penyediaan makanan	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang di dalam panti	rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang di dalam panti	rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan asrama yang mudah diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang di dalam panti	rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang di dalam panti	rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang di dalam panti	rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian bimbingan fisik, mental spritual dan sosial	Jumlah pesertabimbingan fisik, mental dan spritual kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang di dalam panti	rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang di dalam panti	rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan bagi penyandang disabilitas	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan bagi lanjut usia terlarang kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang di dalam panti	rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akdfitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang di dalam panti	rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang di dalam panti	rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang di dalam panti	rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemulasaran	Jumlah pemulasaran kewenangan provinsi	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang di dalam panti	rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlarang di dalam panti	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial anak terlarang di dalam panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlarang di dalam panti	rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 6.C.5

RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DIWILAYAH PROVINSI

FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DIWILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																								
NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial

FORM 6.D.1

REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PANTI

FORM 6.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PANTI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG											
NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 6.D.2**REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI**

FORM 6.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG											
NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 6.D.3**REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI**

FORM 6.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG											
NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja pada tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022 (N-1)	Capaian Kinerja Tahun 2023 (N)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,5	74,09	0,80
2	Angka Kemiskinan	4,61	4,52	-1,95
3	Angka Pengangguran	4,77	4,56	-4,40
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,4	4,38	-0,45
5	Pendapatan Perkapita	63.871.646	67.885.258	6,28
6	Ketimpangan Pendapatan	0,255	0,245	-3,92

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 sebesar 74,09 mengalami perubahan dengan adanya peningkatan sebesar 0,8% dari tahun 2022 sebesar 73,5. Selama 2020–2023, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata meningkat sebesar 0,62 persen per tahun. Peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang terkait sumber daya manusia oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap konsisten bahkan semakin baik, terbukti dari tahun ke tahun mampu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya.

2.2.2 Angka Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Angka Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 sebesar 4,61 dan pada tahun 2023 sebesar 4,52 mengalami perubahan dengan penurunan sebesar -1,95, Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 4,52 persen, menurun 0,09 persen poin terhadap September 2022 namun meningkat 0,07 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 68,69 ribu orang, menurun seribu orang terhadap September 2022 namun meningkat 1,91 ribu orang terhadap Maret 2022. Dari data tersebut, Bangka Belitung berada di posisi keempat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah se-Indonesia. Upaya penyelesaian persoalan kemiskinan adalah tanggungjawab bersama dari seluruh lini pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota melalui program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. Keterlibatan stakeholder penting dalam mengurangi kemiskinan salah satunya dengan program CSR yang diarahkan untuk mendukung prioritas dalam mengurangi kemiskinan. Diharapkan dengan sinergi dan kerjasama antar stakeholder, antar lembaga pemerintah, antar level pemerintahan mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi hingga angka kemiskinan dapat ditekan lagi dan bahkan diturunkan ditahun mendatang

2.2.3 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Secara umum, TPT menunjukkan perkembangan yang positif, dibuktikan dengan tren penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Angka Pengangguran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 4,77 tahun 2023 sebesar 4,56 mengalami perubahan dengan penurunan sebesar -4,40. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 785.627 orang, naik 18.024 orang dibanding Agustus 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 749.815 orang, naik sebanyak 18.843 orang dari Agustus 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Akomodasi Makan dan Minum (1,35 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian (2,47 persen poin). Sebanyak 382.928 orang (51,07 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 1,44 persen poin dibanding Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,56 persen, turun sebesar 0,21 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Salah satu cara untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah melalui penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sektor atau sektor.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 4,4 dan tahun 2023 sebesar 4,38 mengalami perubahan dengan penurunan sebesar -0,45.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi 13,90 persen, disusul lapangan usaha informasi dan komunikasi 13,82 persen, serta usaha jasa lainnya tumbuh 10,97 persen.

Struktur PDRB Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni industri pengolahan 21,15 persen; pertanian, kehutanan dan perikanan 19,49 persen; perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,69 persen; konstruksi 9,50 persen serta pertambangan; dan penggalian sebesar 7,64 persen. Penyumbang terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 1,92 persen, namun melambat dibandingkan pertumbuhan 2022 mencapai 5,14 persen. Perlambatan usaha industri pengolahan ini karena adanya kontraksi yang terjadi pada subkategori industri logam dasar sebagai salah satu penyumbang terbesar kategori tersebut. Rendahnya harga logam timah di pasar dunia serta adanya penertiban tata kelola pertimahan berdampak pada pengurangan produksi baik bijih maupun logam timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2.5 Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pendapatan Perkapita (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 63.871.646 dan tahun 2023 sebesar 67.885.258 mengalami perubahan sebesar 6,28 %. PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2023 (rupiah) dapat terlihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 2.2
PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021-2023 (Rupiah)

Uraian	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku			
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	58.406.067	63.871.646	67.885.258

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Dari tabel di atas memperlihatkan PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai angka sekitar Rp. 58.406.067,-, tahun 2022 telah mencapai angka sekitar Rp. 63.871.646,- dan tahun 2023 PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai angka sekitar Rp. 67.885.258. Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami kenaikan, hal ini merupakan indikasi bahwa umumnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membaik setiap tahun.

2.2.6 Ketimpangan Pendapatan

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketimpangan Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 0,255 dan tahun 2023 sebesar 0,245 mengalami perubahan dengan penurunan sebesar - 3,92. Gini Rasio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2023 dapat terlihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 2.3
Gini Rasio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021-2023

Provinsi	Gini Rasio		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Bangka Belitung	0.256	0.236	0.245

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,245. Angka ini menurun 0,010 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2022 yang sebesar 0,255 namun naik 0,009 poin dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2022 yang sebesar 0,236. Bila dibandingkan dengan angka koefisien rata-rata Gini Rasio Nasional pada Maret 2023 yaitu sebesar 0,388 maka Gini Rasio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih lebih rendah. Hal ini menandakan bahwa tingkat pemerataan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih lebih baik daripada nasional.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	69		
2		Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	9127		
3		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	8313		

4		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1000		
5		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1000		
6		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	1875		
7		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1683		
8		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	1024		
9		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1026		
10		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	532		
11		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	532		
12		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	74		
13		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	56		
14		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	56		
15		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) dan sertifikat pendidik	972		
16		Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	66		
17		Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	54		
18		Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2		
19		Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1		
20		Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1		
21		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	31		
1		Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	9		

2		Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	268		
3		Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	237		
4		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	197		
5		Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	80		
6		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	63		
7		Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	10		
8		Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) dan sertifikat pendidik	75		
9		Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	5		
10		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2		
1	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	5		
1		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6		
1		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	28,477		
2		Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	13		
3		Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	31		
4		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100		
5		Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	2		
1		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	799		
2		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	44		
3		Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	1		
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	33461,41		

2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	5968,8		
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)	30,1		
4		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	1657		
5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	0		
6		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	0		
7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	7138,2		
1		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	87		
2		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	74		
3		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0		
1		Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	1		
2		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	0		
3		Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	0		
4		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0		
5		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	0		
1		Jumlah SPALD Regional	0		
2		Total kapasitas SPALD Regional	0		
3		Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	0		
4		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	0		
5		Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	0		
1		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	850,99		
2		Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	0		
3		Panjang jalan yang dibangun	0		
4		Panjang jembatan yg dibangun	0		
5		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	55,75		
6		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0		
7		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0		

8		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0		
9		Panjang jalan yang dipelihara	850,99		
10		Panjang jembatan yang dipelihara	3787,86		
1		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	2		
2		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	1916		
3		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1610		
4		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	1		
5		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	1		
6		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	1		
7		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	1		
8		Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	1		
9		Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	1		
10		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1		
11		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1		
12		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		
13		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		
14		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0		
2		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0		

3		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0		
4		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
5		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
6		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		
7		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		
8		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		
9		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		
1		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
2		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
3		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
4		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
1		Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh \geq 10-15 Ha	154,6		
2		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	85		
3		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	3,164		
1		Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	383		
2		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
3		Jumlah pengembang yang teregistrasi	0		
4		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	37		
2		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1100		
3		Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	1287		
4		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5		
5		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	8		
6		Jumlah SDP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan	21		

		Trantibum			
1		Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1		
2		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1		
3		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	1		
1		Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	1		
2		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	1		
1		Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	0		
2		Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	1		
3		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	1		
4		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	3		
1	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	48		
2		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	48		
3		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	3		
4		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	44		
5		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	77		
6		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	12		
7		Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	0		
8		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	0		
9		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	3		
10		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	33		
11		Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	4		
12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	0		
13		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	8		

14		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	31		
15		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	18		
1		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	12		
2		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	105		
3		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	24		
4		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0		
5		Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	42		
6		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	6		
7		Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	4		
8		Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
9		Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	3		
10		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	2		
11		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1		
12		Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	0		
13		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0		
14		Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	0		
15		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0		
1		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	35		
2		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	30		
3		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	3		
4		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	40		
5		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	25		

6		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	6		
7		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	140		
8		Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
9		Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	3		
10		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	8		
11		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	0		
12		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	3		
13		Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	3		
14		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0		
15		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	2		
1		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	21		
2		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	0		
3		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	10		
4		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0		
5		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0		
6		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	6		
7		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	10		
8		Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
9		Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	3		
10		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0		
11		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	7		

12		Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	0		
13		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	5		
14		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	0		
15		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0		
1		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	0		
2		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0		
3		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0		
4		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		
5		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		
6		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	0		
1	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi.	1		
2		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	25		
3		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	0		
4		Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan.	7		
1		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi.	19,04		
2		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	94,1		
3		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	5,1		
4		Persentase penganggur yang dilatih	0,93		
5		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	9,5		
6		Persentase penyerapan lulusan.	40,2		
7		Persentase LPK yang terakreditasi	27,03		
8		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	0		
9		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0		
1		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0		
2		Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	0		

3		Data tingkat produktivitas total.	34.848595		
1		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).	27,8		
2		Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB.	96,9		
3		Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n.	15.034		
4		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	31,01		
5		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	26,2		
6		Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.	0,37		
7		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,2		
8		Jumlah mogok kerja	0		
9		Jumlah penutupan perusahaan	9		
10		Jumlah perselisihan kepentingan	2		
11		Jumlah perselisihan hak	85		
12		Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0		
13		Jumlah Perselisihan PHK	224		
14		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	224		
15		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	11		
16		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	1		
17		Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.	3,64		
18		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	16,3		
1		Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	0		
2		Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0		
3		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	0		
4		Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	1.018		
5		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	0		
6		Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	17		
7		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.	0		
8		Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.	0		

9		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).	0		
10		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepeulngannya.	0		
11		Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan.	0		
12		Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepeulngan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	0		
1		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	80		
2		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI).	137		
3		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	106		
4		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.	132		
5		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.	180		
6		Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	122		
7		Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.	1		
8		Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.	8,029		
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	40		
2		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	125		
1		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0		
2		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1		
3		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100		
4		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	20		
5		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	0		
1		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPD pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	4		

2		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	2		
3		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100		
4		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	2		
5		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	0		
1	Pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1		
2		Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1		
3		Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	621,78		
4		Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	0		
5		Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	4		
6		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	1		
7		Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1		
8		Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	0		
9		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	0		
10		Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	21		
1	Pertanahan	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	0		
2		Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	0		
3		SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	0		
4		Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	0		
1a	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	57,51		
1b		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,15		
1c		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	0		
1		Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	49		
2		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	10,2		
3		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	0		
4		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	100		

5		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	100		
6		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	100		
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi pelayanan Adminduk	100		
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	309		
2		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	6		
3		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	150		
4		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	309		
1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1		
2		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,4		
3		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	35,6		
4		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	76,9		
5		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	23		
1		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	13,98		
2		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15,1		
3		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1		
4		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	57,52		
1		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	59,3		
2		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	30,99		
1	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	0		
2		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan	0		

		perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi			
1		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	0		
1	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	96,3		
2		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	96,3		
3		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1		
1		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100		
2		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100		
3		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100		
4		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100		
5		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	3,38		
6		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100		
7		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100		
8		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100		
9		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100		
10		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai rencana kominfo)	100		
11		Persentase data yang dapat berbagi pakai	94,18		
12		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	74,07		
13		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah	100		

		pengelolaan Dinas Kominfo			
14		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1		
1		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	92,96		
2		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100		
3		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	96,92		
1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
2		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
3		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	35,71		
4		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	22,67		
5		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	7,24		
6		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,17		
7		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
8		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	14,29		
9		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah	0		

		kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
10		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
11		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
12		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
1		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	5,07		
2		Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	52,63		
3		Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	4,91		
4		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,54		
5		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,34		
6		Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	23,53		
7		Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	7,53		
1	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	6		
2		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1		
3		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1		
4		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0		
5		Kegiatan pameran penanaman modal	1		
6		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0		
7		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	0		
8		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1,291		
9		Laporan realisasi penanaman modal	9.0336927		
10		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	300		
11		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	87		
12		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi	45,607		
1	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	27		
2		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan	0		

		kewirausahaan			
3		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kade pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	153		
1		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	1		
1		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	2		
2		Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	18		
3		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	5		
4		Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	61		
5		Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1		
1	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1		
2		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	8		
3		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3		
4		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	8		
5		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	3		
6		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100		
7		Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100		
1	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0		
2		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	86,84		
3		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	86,84		
4		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100		
1	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	316		
2		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	1		
3		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter	7		

		bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)			
4		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	1		
5		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	38		
6		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	1		
7		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0		
8		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	7		
9		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	7		
10		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	12		
11		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0		
12		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0		
13		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	6		
14		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	7		
15		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0		
16		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	3		
17		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0		
18		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0		
19		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1		
1	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1,12		
2		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	5,98		
3		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,27		
4		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,92		
5		Jumlah masyarakat gemar membaca di masyarakat	20,134		
6		Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	1,058		
7		Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	13		
8		Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam	1,266		

		katalog induk daerah			
9		Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	131		
1		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	1		
2		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		
3		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	10		
1	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100		
2		persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100		
3		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100		
4		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	1,61		
1		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1,709		
2		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	60		
3		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	122		
4		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	321		
5		Pencarian arsip statis yang pengelolannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0		
6		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0		
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	711		
2		Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 - 30 GT	0		
3		Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	10		
4		Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	0		
5		Jumlah kapal yang terdaftar	96		
6		Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	0		
1		Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4259119,3		
2		Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau	5		

		kecil yang dikelola			
3		Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	166		
4		Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	9		
5		Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	10		
6		Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	9		
7		Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	64		
8		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	0		
1	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1		
2		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	2		
3		Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	10.650.000.000		
4		Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	3		
5		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	0		
6		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	4.269		
7		Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	445.951		
8		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	4.269		
9		Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	445.951		
10		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	3		
11		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	3		
12		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	4		
13		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	100		
14		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	90,9		
15		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	5		
1	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang	95		

		diberikan			
2		Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	53		
3		Dokumen pengawasan benih yang beredar	1		
4		Prasarana pertanian yang digunakan	7		
5		Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	830,9		
6		Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	250,5		
7		Penerbitan izin usaha pertanian	20		
8		Persentase sarana pertanian yang digunakan	100		
9		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100		
10		Persentase jumlah usulan usaha pertanian	100		
1	Kehutanan	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	13		
2		Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	1		
3		Luas lahan kritis yang direhabilitasi	5619,91		
4		Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	2945,72		
5		Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	12414,04		
6		Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6	1		
7		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	1		
8		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	445		
9		Pemulihan ekosistem pada Tahura	25		
10		Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0		
11		Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	13		
12		Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	33		
13		jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	0		
14		Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	0		
15		terusunya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	6		
16		Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	3		
1	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0		
2		Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	1		
3		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	2		
4		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	2		

5		Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	1		
6		Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	1		
7		Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	1		
8		Perda/Pergub terkait IUJP	1		
9		Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	1		
10		Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0		
11		Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	0		
12		SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	0		
13		Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	1		
14		Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	1		
15		Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	1		
16		Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0		
17		Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	0		
18		Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	0		
1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	55,56		
2		Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	50		
3		Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	37,31		
4		Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	4,48		
5		Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	0		
1		Jumlah penanganan pengaduan konsumen	41		
2		Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	96		
1		Jumlah komoditi potensial yang dipantau	1		
2		Indeks Kinerja BPSMB	3		
1		Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0		

2		Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	0		
3		Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0		
4		Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	0		
5		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100		
1		Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	97,21		
1		Jumlah barang beredar yang diawasi	45		
1a		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi	80		
1b		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi	80		
1c		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Beroperasinya pusat industri	80		
1d		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	80		
2		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	8,44		
3		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100		
1	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	1		
1		Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	100		
2		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri besar yang diterbitkan	0		
3		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0		
1		Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	100		
1	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1		
2		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	2.843		
3		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	1.256		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	95,70%		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	65,52%		
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,64		
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100		
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0,39		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	15,29		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	51,37		
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0		
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0		
		Rasio kemantapan jalan	92,85		
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	63,08		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100		
		Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	2,04		
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	69,63		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100		
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100		
		Persentase penanganan pra bencana	100		
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100		
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100		
		Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	57,14		
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	31,68		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	80470516		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	31,72		
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	51,76		
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan bidang ketenagakerjaan	9,44		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	11,20		
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2,70		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPD per 100.000 penduduk perempuan	21,83		
9	Pangan	Persentase Cadangan Pangan	51,47		
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0		
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	0		
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	0		
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71,64		
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	18,94		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100		
		Pemanfaatan data kependudukan	92,60		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100		
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	79,46		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,18		
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	76,73		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,80		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas provinsi	0,815		
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,18		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	96,30		
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	75		
		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	81,35		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	29,49		
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	26,53		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	10,56		
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,07		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,07		
		Peningkatan Prestasi Olahraga	1. 37 emas 2. 30 perak 3. 39 perunggu =106 medali		
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	56,89		
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	80		
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66,17		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	77,5		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75,4		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	66,67		
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	94,48		
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	75,50		
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	46,19		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	-1,75		
		Tingkat hunian akomodasi	15,27		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3.197.7084		
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4,26		
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-88,99		
28	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	20		
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	2,35		
		Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	3,36		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100		
		Persentase Desa yang Teraliri Listrik	100		
30	Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	-22,32		
		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100		
		Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	98,20		
		Tertib Usaha	0		
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	97,20		
		Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	18,51		
		Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	8,44		
31	Perindustrian	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	2,63		
		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP	82,58		
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	48,68		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		Surat keterangan
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	95		
32	Transmigrasi		0		Tidak ada IKK

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	12,65		
		Rasio PAD	39,12		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	56,99		
		Opini Laporan Keuangan	WTP (6)		
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3		
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		
2	Pemerintahan (Pengadaan)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0		
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	36,22		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	47,50		
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	58,02		
3	Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	87,67		
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	37,40		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	58,02		
4	Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	8,82		
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	4,29		

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? Ya 2. Apakah ada manual untuk Menyusun daftar asset tetap? Ya 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Ya 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? Ya		
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	7,55		
5	Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>information on resources available to frontline service delivery units</i>)	91,15		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>public access to fiscal information</i>)	100		

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 2.3.1
Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	3,79	3,85	8,59* (TW III)	223,11%	4,60	186,73%
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-3,59	4,03	-0,03 *	-0,74%	5,2	-69,04%
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor pertambangan dan Penggalian	0,37	2,95	-1,27 *) (Data TW 3)	-43,05	0,46	-276,09
4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,15	1,86	1,46**	78,49%	4,55	32,09%
5.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	10,63	6,50	1,31**	20,15%	5,55	23,60%
6.	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	45,93	2,70	8,92*)	330,37	2,50	356,80
7.	Meningkatnya Ekspor	-1,20	8,13	-20,07**	-246,86%	6,53	-307,35%
8.	Pertumbuhan Investasi		25,00	10,15	40,6	34,12	29,75
9.	Indeks Pembangunan Manusia	73,50	71,91	74,09	103,03	72,57	102,09
10.	Indeks Demokrasi Indonesia	74,11	77,39	76,55	98,91	80,42	95,19

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Provinsi						
11.	Indeks Reformasi Birokrasi	69,53	68,25	69,53 *	101,87	70,50	98,62
12.	Persentase ketersediaan infrastruktur	0	25,50	19,89	78 %	100	19,89
13.	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0	0,65	0,6	92,31	0,8	75
14.	Indeks Risiko Bencana	158,52	160,48	158,52	101,24%	158,08	99,71
15.	Indeks Desa Membangun	0,710	0,721	0,721	100,00	0,748	96,39
16.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,52%	1,79 %	1,39	122,34%	1,68%	120,86%
17.	Persentase Angka Kemiskinan	4,40	4,30	4,30	100,00	4,01	93,26
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,77	4,47	4,56	102	4,19	91,89
19.	Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	71,67	75,43	71,64	94,98	77,5	92,44

***) data tahun 2022**

**) angka sangat sementara*

Sumber : LAKIP Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2023

Analisis capaian kinerja dan dukungan program terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 setiap indikator kinerja berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian

Kinerja sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian diukur dengan indikator Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian. Capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 8,59 atau sebesar 223,12% dari target 3,85%.

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian adalah sebagai berikut:

- Capaian 8,59, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 223,11 % tercapai.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 3,79 %, terdapat peningkatan sebesar 4,8 %.
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian sudah mencapai 186,74 %.

Capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan sasaran kinerja Peningkatan Produktivitas Pertanian, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini sama bila dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%.
 - b. Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura. Capaian kinerja indikator ini 4,82% dari target 2,5% atau sebesar 192,90%.
 - c. Persentase peningkatan luas tanam perkebunan. Capaian kinerja indikator ini 2,45% dari target 1,5% atau sebesar 163,33%.
 - d. Persentase pertambahan angka populasi ternak. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 5% dari target 5% atau sebesar 100%.
 - e. Persentase Peningkatan produksi benih bermutu. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 3,85% dari target 2,5% atau sebesar 153,85%. (*Perhitungan berdasarkan angka sementara*)
 - f. Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 5% dari target 5% atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- b. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran petani tentang pentingnya bibit tanaman berlabel dan bersertifikat;
- c. Meningkatnya nilai angka ketersediaan suplay bibit ternak ayam merawang tahun 2023;
- d. Meningkatnya luas tanam hortikultura komoditas cabai kecil karena tingginya harga cabai.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan tambang;
- b. Cuaca ekstrim sehingga produksi pertanian menurun.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Memberikan penyuluhan kepada petani terkait penyesuaian jadwal tanam dengan musim tanam;
- b. Melakukan edukasi/pendekatan kepada petani agar lahan pertanian tidak dialih fungsikan menjadi lahan tambang.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan sasaran kinerja Peningkatan Produktivitas Pertanian, dengan indikator kinerja:
 - a. Rasio ketersediaan prasarana pertanian. Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%; (*Perhitungan berdasarkan angka sementara*)
 - b. Rasio ketersediaan prasarana pertanian UPTD. Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 87,5%. (*Perhitungan berdasarkan angka sementara*)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Terakomodirnya fasilitas pertanian prasarana pra panen seperti embung, jalan usaha tani, irigasi dan perpompaan sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian;
- b. Terakomodirnya fasilitas pertanian pasca panen seperti bangsal pasca panen dan rehab screen house sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Jumlah prasarana pertanian baik yang pra panen atau pasca panen disetiap kabupaten/kota belum memenuhi semua kebutuhan semua kelompok tani di kabupaten/kota.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penambahan jumlah fasilitas prasarana pra panen dan pasca panen pertanian kepada kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan sasaran program Peningkatan Produksi Peternakan dengan indikator Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dengan target penurunan 2%. Capaian indikator kinerja adalah 89% dari target sebesar 2%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar -78.68%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pelaksanaan vaksin dan pemberian obat kepada hewan ternak sapi, kambing, dan kerbau untuk mencegah perluasan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku dan *Lumpy Skin Disease*.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Penyakit Mulut dan Kuku dan *Lumpy Skin Disease* sudah ditetapkan sebagai wabah dan penyebarannya yang masif sehingga beberapa hewan ternak seperti sapi dan kambing banyak yang terjangkit.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Eduksi kepada peternak tentang untuk meningkatkan kesadaran peternak akan bahaya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku dan *Lumpy Skin Disease*.
- b. Pelaksanaan vaksinasi kepada hewan ternak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengurangi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku dan *Lumpy Skin Disease*.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan sasaran program Peningkatan Produktivitas Pertanian dengan indikator kinerja:

- a. Dokumen laporan pengendalian dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Capaian kinerja pada tahun 2023 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebanyak 1 dokumen atau tercapai 100%.
- b. Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen atau tercapai 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Adanya kegiatan yang mendukung penanganan Organisme Pengganggu Tanaman seperti Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
- b. Adanya teknologi pengendalian OPT berupa PGPR, Trichoderma, sp., Pestisida Nabati, dan MS Paenibacillus.
- c. Adanya sosialisasi dan pendampingan dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kebrau (AUTS/K).

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih kurangnya pengetahuan petani terkait pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
- b. Kurangnya kesadaran petani dan peternak untuk mengasuransikan usaha tani dan ternaknya.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Pelaksanaan Sekolah Lapang yang bisa memberikan pengetahuan kepada petani dalam menangani Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
- b. Edukasi kepada petani dan peternak tentang manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kebrau (AUTS/K).

5. Program Penyuluhan Pertanian dengan sasaran program Peningkatan Produktivitas Pertanian dengan indikator Persentase Peningkatan Metode, Teknologi Informasi dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Capaian indikator kinerja inikator ini adalah 90%dari target sebesar 100%. (*Perhitungan berdasarkan angka sementara*)

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya fasilitasi pembiayaan melalui KUR untuk meningkatkan permodalan kelompok tani;
- b. Adanya peningkatan kinerja penyuluh pertanian lapangan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani;
- c. Banyaknya sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan informasi yang dapat di akses dari media online untuk menambah/meningkatkan ilmu dan pengetahuan SDM (petani/penyuluh).

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Rendahnya kesadaran SDM (petani) terutama yang berkaitan dengan aspek psikologis dan budaya;
- b. Kelompok tani sering dijadikan sebagai alat atau wadah untuk memberikan bantuan/subsidi yang berkaitan dengan program pemerintah sehingga pembentukan dan penumbuhan kelompok tani banyak dilakukan karena adanya proyek bantuan tersebut, sehingga berakhir kelompok tani tidak meningkat kelas kemampuannya atau bahkan tidak berungsi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM (petani) melalui berbagai kegiatan pendampingan dan Latihan oleh penyuluh pertanian lapangan;
- b. Meningkatkan kapabilitas ketenagaan dan kelembagaan penyuluh pertanian

6. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan sasaran program Peningkatan Produktivitas Pertanian dengan indikator kinerja Dokumen Perizinan Usaha Pertanian. Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dari target sebesar 1 dokumen.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Tingginya antusiasme para stakeholder untuk mendaftarkan usaha pertanian miliknya.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum tersosialisasi secara luas tentang pentingnya perizinan usaha pertanian.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Sosialisasi kepada pelaku usaha pertanian tentang pentingnya izin usaha pertanian.

7. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan sasaran program Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam dengan indikator Persentase Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama (beras). Capaian indikator kinerja adalah 7,63% dari target sebesar 2.85% atau persentase capaian sebesar 287.64%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Tingginya minat petani untuk melakukan usaha budidaya padi.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Faktor cuaca ekstrim dan alih fungsi lahan pertanian

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Menerapkan kebijakan terkait optimalisasi lahan sawah untuk meningkatkan produktivitas.
- b. Melibatkan penyuluh pertanian provinsi untuk melakukan pendampingan ke petani

8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran program Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Capaian indikator kinerja adalah 87.9 dari target sebesar 83.1 dengan persentase capaian 105, 78%. Capaian kinerja tahun 2023 ini meningkat bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 yang sebesar 81.1.
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Gencarnya promosi tentang penganekaragaman konsumsi pangan lokal.
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi ideal masyarakat yang dianjurkan.
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- Menggiatkan upaya-upaya dalam meningkatkan Skor PPH konsumsi pangan lokal khususnya kacang-kacangan, sayur dan buah melalui advokasi, kampanye, sosialisasi, dan promosi.
9. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan sasaran program Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam dengan indikator Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan. Capaian indikator kinerja adalah 2 Daerah dari target sebanyak 1 Daerah atau persentase capaian sebesar 200%.
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Menurunnya tingkat angka kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung yang berimbas kepada kemampuan masyarakat dalam akses pangan.
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan sangat tergantung dengan ketersediaan pasokan pangan dari luar daerah.
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- Mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat daerah rentan rawan pangan.
10. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan sasaran program Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam dengan indikator Persentase Pangan yang Aman Dikonsumsi. Capaian indikator kinerja adalah 85.77% dari target sebesar 86% atau persentase capaian sebesar 99.73%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 90.6% dikarenakan terjadi perubahan rumus perhitungan indikator.
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Tingginya tingkat kesadaran stakeholder/ pelaku usaha pertanian untuk mendaftarkan usahanya guna mendapatkan sertifikat prima 3.
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- Penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengakibatkan produk pertanian yang dihasilkan memiliki kadar kandungan bahan kimia yang tinggi.
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- Melakukan sosialisasi Teknik budidaya pertanian yang sesuai dengan Good Agriculture Practice (GAP).

Perbandingan dengan Realisasi Nasional Tahun 2023

PROVINSI / NASIONAL	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
Provinsi	8,59
Nasional	7,05

2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan

Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan. Capaian kinerja sasaran ini adalah -0,03 atau sebesar -0,74% dari target 2,95. (*Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah*)

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Capaian -3,59%*, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar -73,26% tidak tercapai.
- b. PDRB Sub Sektor Perikanan masih menggunakan data tahun 2022 sehingga tidak bisa dibandingkan antara tahun 2022 dengan 2023
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan tercapai -0,69%

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan sasaran kinerja Meningkatnya Lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan, dengan indikator kinerja Lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk Peningkatan Investasi di Perairan Bangka Belitung. Formula perhitungan indikator ini adalah jumlah lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Bangka Belitung. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 73 lokasi dari target 25 lokasi.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Sebagian Pelaku usaha sudah tersosialisasi terkait perizinan pemanfaatan ruang laut.
- b. Sebagian sarana dan prasarana survey sudah tersedia sehingga memudahkan peninjauan lapangan.
- c. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan ruang laut

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Ada sebagian pelaku usaha yang belum melaksanakan ketentuan peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang laut
- b. Terjadinya konflik pemanfaatan ruang sehingga akan menghambat investasi yang memanfaatkan ruang laut

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan identifikasi dan monitoring terkait adanya pemanfaatan ruang laut yang belum memiliki persetujuan
- b. Melakukan koordinasi dengan pengawas perikanan guna penindakan terhadap kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi persetujuan ruangnya.
- c. Melakukan sosialisasi di lokasi yang belum mendapatkan pengetahuan terkait adanya persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan sasaran program Meningkatnya Volume Produksi Perikanan Tangkap dengan indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap. Capaian indikator kinerja ini adalah 226.450,27 Ton dari Target sebesar 235.650 Ton. Capaian kinerja ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 222.062.Ton.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kondisi perairan Bangka Belitung masih sangat mendukung dalam kegiatan penangkapan ikan, walaupun area tangkapan semakin jauh, tetapi kondisi di lapangan masih menjanjikan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Permodalan masih menjadi kendala utama bagi nelayan dimana banyak nelayan yang terikat pada pakter/tauke.
- b. Masih sulitnya nelayan memperoleh BBM bersubsidi, dimana aturan yang terbaru nelayan yang ingin mendapatkan BBM harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perikanan.
- c. Kuota BBM di SPDN masih sangat kurang, kadang nelayan yang telah memiliki rekomendasi tidak kebagian jatah dari SPDN.
- d. Cuaca yang berubah-ubah membuat nelayan agak bingung jika hendak pergi melaut.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perlu dilakukan sosialisasi terkait permodalan melalui KUR yang difasilitasi oleh perbankan maupun lembaga permodalan lainnya.
- b. Percepatan Fasilitasi proses check fisik kapal dalam rangka percepatan rekomendasi perizinan perikanan tangkap
- c. Perlu dilakukan pembatasan hasil tangkapan terutama pada komoditas yang disinyalir telah over eksploitasi.

- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan sasaran program Meningkatnya Volume Produksi Perikanan Budidaya dengan indikator Volume Produksi Perikanan Budidaya. Capaian indikator kinerja adalah 10.379,5 Ton dari target sebesar 15.000 Ton. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 11.165 Ton.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Sudah tersedianya sarana yang sudah dimiliki oleh pelaku pembudidaya
- b. Sumber daya lingkungan mendukung proses budidaya ikan
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pembudidaya yang memahami proses budidaya

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Pasar untuk budidaya kerapu masih dimonopoli oleh supplier sehingga pelaku usaha kesulitan dalam memasarkan hasil budidayanya
- b. Masih kurangnya staf pengelola untuk pengadministrasian dokumen

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan Stake holder terkait dengan ketersediaan benih yang sesuai yang dibutuhkan
- b. Berkoordinasi dengan Kabupaten / Kota untuk menetapkan data calon penerima
- c. Mengundang stakeholder atau pihak ketiga untuk mengadakan bimbingan teknis
- d. Menambah staff pengelola untuk pengadministrasian dokumen

- 4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan sasaran program Meningkatnya Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan dengan indikator Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%). Capaian indikator kinerja adalah 75,49% dari target sebesar 70%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 72,83.%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kesadaran pelaku usaha untuk melengkapi dokumen perizinannya sudah meningkat.
- b. Kemudahan dalam mengurus perizinan cukup membantu pelaku usaha

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Jumlah anggaran yang terbatas sehingga hari operasi sangat terbatas.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perlu adanya sosialisasi ketaatan pelaku usaha perikanan terus menerus, mengingat aturan yang berubah-ubah.
- b. Memperbanyak gerai perizinan di titik sentra pelaku usaha sehingga memudahkan para pelaku usaha melengkapi dokumen perizinannya.

- 5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan sasaran program Meningkatkan Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dengan indikator Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan. Capaian indikator kinerja adalah 62.729,54 Ton dari target sebesar 22.410 Ton. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 45.897,74 Ton

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pasca covid, pasar produk olahan meningkat.
- b. Geliat pelaku usaha baru muncul ikut mendorong peningkatan produksi

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Harga Bahan baku yang cukup tinggi terutama jenis ikan ekonomis tinggi membuat pelaku usaha bersaing harga dengan eksportir ikan/pengumpul.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perlu peran pemerintah untuk mengatur kuota ekspor dengan memperhatikan kebutuhan pelaku usaha pengolahan.

Perbandingan dengan Realisasi Nasional Tahun 2023

PROVINSI / NASIONAL	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
Provinsi	-3,59
Nasional	2,79

3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian

Kinerja sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian. Capaian kinerja indikator sasaran ini adalah -0,46 (data TW 3) dari target 2,95 %. (*Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah*).

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian adalah sebagai berikut:

- a. Capaian -1,27*, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar -43,05 tidak tercapai.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 0,37, terdapat penurunan *) sebesar -1,64
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja ini masih diangka minus -276,09

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dengan sasaran kinerja Peningkatan Pengelolaan Pertambangan dengan indikator kinerja Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 20,24% dari target 85% atau sebesar 23,81%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tertib administrasi perusahaan pengelola pertambangan yang semakin baik.
- b. Pembinaan dan pengawasan yang tepat sasaran.
- c. Rekomendasi yang dilakukan pada saat pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan baik oleh pihak perusahaan.
- d. Adanya sinergitas antara Dinas ESDM dengan Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Jumlah SDM yang melakukan pembinaan dan pengawasan masih terbatas.
- b. Jumlah IUP yang relatif banyak, sedangkan penganggaran terkait pembinaan dan pengawasan relatif kecil.
- c. Terlalu banyak aspek pengawasan yang harus diawasi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Adanya penambahan anggaran yang signifikan terkait pengawasan dan pembinaan.
- b. Adanya penambahan pegawai teknis untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

- 2) Program Pengelolaan Kegeologian dengan sasaran program Peningkatan Kepatuhan Penataan Izin Air Tanah dengan indikator Persentase Kepatuhan Penataan Izin Air Tanah. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 96%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Terbitnya peraturan-peraturan terkait air tanah.
- b. Pemerintah pusat mendukung kegiatan atau usaha Pemerintah Daerah terkait penatausahaan perizinan air tanah.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Cekungan air tanah di Pulau Bangka berada di wilayah sungai strategis nasional yang menjadi kewenangan pusat. Sedangkan Cekungan air tanah di pulau Belitung berada di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memiliki kewenangan di Pulau Belitung.
- b. Pembagian skala usaha Badan Usaha untuk proses perizinan menentukan persyaratan perizinan air tanah.
- c. Aturan perizinan air tanah yang baru belum terbit dan belum tersosialisasi dengan baik.
- d. Anggaran Kegiatan yang masih kurang.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Sosialisasi peraturan air tanah terkait standarisasi perizinan air tanah.
- b. Meningkatkan anggaran Kegiatan karena lokus kewenangan adalah di pulau Belitung.
- c. Koordinasi dan Konsultasi ke Badan Geologi dan stakeholder terkait.

- 3) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan Sasaran Program Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik dengan indikator Rasio Elektrifikasi. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Meningkatnya suplay tenaga listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Terbangunnya jaringan listrik tegangan rendah dan menengah.
- c. Terbangunnya pemukiman baru dan banyak peminat perumahan.
- d. Permohonan sambungan baru tenaga listrik yang meningkat (tinggi).

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kekurangan material untuk pembangunan jaringan tenaga listrik pada akhir tahun.
- b. Anggaran yang bersumber dari APBD untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan masih kurang.
- c. Anggaran yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan tidak ada.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perlu ditambahkan anggaran APBD untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan.
- b. Perlu diusulkan anggaran APBN untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan.
- c. Perlu adanya kolaborasi dengan PT. PLN terkait pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan.

- 4) Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan Sasaran Program Peningkatan Penggunaan Bauran Energi dengan indikator Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan. Capaian indikator kinerja adalah 17,58% (capaian ini merupakan angka capaian tahun 2022 yang dirilis September 2023) dari target sebesar 10,94%. Capaian kinerja pada tahun 2022 ini lebih tinggi) dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 17,27%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya pembangunan PLT Biomassa dan PLT Biogas oleh pihak swasta dalam penyediaan energinya.
- b. Pemakaian FAME (B30) sebagai bahan bakar minyak, dimana 30% merupakan energi terbarukan sebagai campuran minyak solar.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap konservasi energi Badan Usaha agar tetap dilaksanakan.
- b. Tetap mendorong Badan Usaha agar meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam penyediaan energinya.

4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan

Kinerja sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan. Capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 1,46 atau sebesar 78,49% dari target 1,86. (*Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah*).

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan adalah sebagai berikut:

- a. Capaian 1,46, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 78,49% tidak tercapai*.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 5,15, terhadap target tahun lalu sebesar 2,0 terdapat penurunan sebesar -179,01%
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tercapai 32,09%

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan sasaran kinerja Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan unit usaha industri.
 - a. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 3,04% dari target 2,5 atau sebesar 121,45%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 2,00%.
 - b. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 98,88% dari target 60,00% atau sebesar 164,80%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 100,00%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pertumbuhan pada subkategori industri makanan dan minuman,
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana terhadap mesin dan peralatan agar dapat menghasilkan produk kemasan IKM yang berkualitas tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada para pelaku usaha IKM,

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum optimalnya hilirisasi industri berbasis sumber daya alam,
- b. Belum optimalnya penyebaran informasi tentang pemanfaatan fasilitas layanan promosi dan kemasan di Kab/Kota,
- c. Keterbatasan teknologi mesin dan peralatan serta keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku IKM,
- d. Belum adanya dukungan intervensi secara regulasi untuk mengarahkan pemanfaatan layanan kemasan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Percepatan hilirisasi produk-produk dalam RPIP dengan melibatkan stakeholder terkait,
- b. Upgrading skill Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sumber Daya Mesin dan Peralatan yang dimiliki,
- c. Perlunya intervensi regulasi yang sifatnya himbauan dalam rangka pemanfaatan layanan kemasan secara maksimal.

- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan sasaran program Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri mempunyai Indikator:

- a. Persentase Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 60 %. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini secara persentase sama jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 100% namun secara kuantitas melebihi dari tahun sebelumnya.
- b. Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri. Capaian indikator kinerja adalah 48,68% dari target sebesar 50%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 46,05% %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan pemerintah proses penerbitan perizinan berusaha melalui OSS RBA,
- b. Kesadaran pelaku usaha pentingnya perizinan yang dimiliki.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi teknologi,
- b. Belum optimalnya pengembangan industri prioritas.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor terhadap pengendalian izin usaha industry,
- b. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia/ Tenaga Kerja Industri.

- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan sasaran program Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan indikator Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas. Capaian indikator kinerja adalah 81,59% dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 65,79%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan peraturan perundangan,
- b. Kesadaran pelaku usaha dalam penginputan data industri.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Keterbatasan pengembangan usaha industri hilirisasi produk,
- b. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha industri besar dalam penyampaian data industri,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mengoptimalkan pengembangan usaha industri hilir,
- b. Optimalisasi pelaksanaan edukasi kepatuhan penyampaian data industri bagi pelaku usaha.

5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan

Kinerja sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri. Capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 1,31 atau sebesar 20,15% dari target 6,50. (*Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah*).

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan adalah sebagai berikut:

- a. Capaian 1,31, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 20,15% tidak tercapai*.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 10,63, terhadap target tahun lalu sebesar 2,0 terdapat penurunan sebesar -511,35%
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tercapai 23,60%.

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan sasaran kinerja Meningkatnya Ketertiban dalam Penerbitan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan indikator kinerja Persentase Tertib Usaha. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100,00% dari target 2 yang ditetapkan.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Terpantaunya terhadap komitmen pelaku usaha dalam memiliki perizinan perdagangan,
- b. Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan perdagangan yang mereka miliki serta memfasilitasi pemenuhan komitmen surat izin usaha perdagangan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami tentang perizinan perdagangan,
- b. Masih adanya pelaku usaha yang enggan untuk koordinasi kepada petugas dalam hal untuk pengurusan perizinan perdagangan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penyelenggaraan edukasi dan advokasi pelaku usaha yang efektif,
- b. Memfasilitasi Penyediaan sistem pelayanan melalui elektronik,
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan administrasi perizinan terhadap pelaku usaha perdagangan.

- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan sasaran program Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik. Capaian indikator kinerja adalah 84,21% dari target sebesar 75,00% atau sebesar 112,28%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 80,00%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Semakin baiknya sistem distribusi,
- b. Meningkatnya jumlah pasokan barang kebutuhan pokok.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih lemahnya sistem pengumpulan data dan informasi,
- b. Tidak tersedianya pusat perdagangan grosir.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan pelaku usaha distribusi,
- b. Membuat suatu sistem informasi terpadu terkait data informasi perdagangan.

- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan sasaran program Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indikator Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok. Capaian indikator kinerja adalah 8,44 atau 100,71% dari target sebesar 8,5%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 6,00%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Melakukan Operasi Pasar dan Pasar Murah untuk antisipasi dan menekan laju inflasi,
- b. Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Terhambatnya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dari produsen ke distributor di daerah hingga ke agen dan toko-toko,
- b. Masih terdapat distributor dan agen yang menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan pengawasan kepada distributor dan agen-agen agar tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting di saat terjadi kelangkaan barang,
- b. Edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying apabila mendapat informasi tentang kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

4) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan sasaran program Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen mempunyai indikator:

4.A Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen. Capaian indikator kinerja adalah 100,00% dari target sebesar 42,00.

4.B Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku dengan indikator $(\text{Jumlah komoditas yang memenuhi standardisasi(N)}/\text{Jumlah komoditas potensial(N)}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah 100,00% dari target sebesar 1 atau sebesar 100,00%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Peningkatan pemahaman masyarakat akan Hak-nya sebagai konsumen untuk berani melaporkan setiap kerugian atas transaksi pembelian/konsumsi yang dilakukan, terutama kerugian yang berdampak luas kepada masyarakat.
- b. Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan peredaran barang/jasa, dengan cara meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- c. Peningkatan pelayanan pengujian komoditi potensial berdasarkan SNI (Lada, CPO dan Mikrobiologi) yang terakreditasi KAN sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap Laboratorium Pengujian BPSMB.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui lembaga perlindungan konsumen. Sehingga perlu adanya edukasi dan sosialisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia kepada masyarakat melalui pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
- b. Ketersediaan regulasi layanan pengujian kesadaran pengusaha atas produk ber SNI masih rendah.
- c. Masih banyak stakeholders' yang belum mengetahui pelayanan pengujian mutu barang oleh Laboratorium BPSMB yang sudah terakreditasi KAN.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penyelenggaraan edukasi dan advokasi konsumen yang efektif,
- b. Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan peredaran barang/jasa, dengan cara meningkatkan pengenalan kepada konsumen mengenai lokasi dan fungsi dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen, mulai dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), termasuk Kementerian Perdagangan selaku leading sector perlindungan konsumen.
- c. Penyampaian informasi mengenai Laboratorium terakreditasi KAN melalui berbagai media elektronik.

5) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan sasaran program Mengikatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan indikator Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar.

a. Capaian indikator kinerja adalah 200,00% dari target sebesar 110 UMKM. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 100,00%

b. Capaian indikator kinerja adalah 58,76% dari target sebesar 40,00% atau sebesar 146,90%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022

yang sebesar 100,00%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Terjalin kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder yang mendukung pemasaran produk,
- b. Kualitas media pendukung pemasaran produk seperti kemasan dan media promosi,
- c. Fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis pengenalan marketplace e-commerce melalui platform seperti Bukalapak, Tokopedia, Shoopee dsbnya;
- d. Fasilitasi Promosi melalui Video ke pelaku usaha yang potensial;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan Sosialisasi Kecintaan Generasi Muda dalam penggunaan produk Indonesia.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih minimnya kesadaran atau usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk secara mandiri. Pelaku usaha cenderung sangat bergantung dengan kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait,
- b. Masih minimnya kesadaran pelaku usaha untuk membangun citra dan kualitas produk, sehingga berakibat minimnya daya saing produk dipasar nasional,

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan kegiatan promosi yang tepat sasaran,
- b. Melakukan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait guna mendukung pemasaran produk,
- c. Melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap peningkatan kualitas usaha dan produk,
- d. Melakukan koordinasi sinergi dan kolaborasi pemberdayaan UMKM seperti pendampingan kepada pelaku UKM melalui Forum UMKM terutama yang prematur dalam menjalankan usaha.

6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik

Kinerja sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan. Capaian kinerja indikator sasaran ini sebesar 8,92 dari target 2,70. (*Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah*).

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan adalah sebagai berikut:

- a. Capaian 8,92*, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 330,37 tercapai*.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 45,93 terdapat penurunan sebesar -37,01
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Laju Pertumbuhan kunjungan wisata tercapai 356,80.

Jumlah kunjungan tamu hotel bintang (asing dan domestik 2022) = 456.823 orang dibandingkan dengan jumlah kunjungan tamu hotel bintang (asing dan domestik 2021) = 313.033 orang.

Jumlah kunjungan tamu hotel bintang (asing dan domestik Jan-Okt 2023) = 400.266 orang dibandingkan dengan jumlah kunjungan tamu hotel bintang (asing dan domestik Jan-Okt 2022) = 367.477 orang

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- 1) Program Pemasaran Pariwisata dengan sasaran kinerja Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisata. Capaian kinerja untuk

indikator ini adalah 0,25% dari target 15 yang ditetapkan.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah

- a. Kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB dijadikan indikator Tercapainya pembangunan daerah

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Terbatasnya dukungan Dana APBN
- b. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital.
- c. Data Keparawisataan kurang lengkap
- d. Masih kurangnya aksesibilitas, amenities, acillary dan atraksi pariwisata di daerah
- e. Masih banyak SDM pariwisata yang belum memiliki sertifikasi

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. memanfaatkan teknologi digital.
- b. Melengkapi data keparawisataan
- c. Melengkapi aksesibilitas, amenities, acillary dan atraksi pariwisata di daerah

7. Meningkatnya Ekspor

Kinerja sasaran Meningkatnya Ekspor diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan. Capaian kinerja indikator sasaran ini adalah -20,07 atau sebesar -246,86% dari target 8,13. (Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah). (Sumber: BPS, BRS No. 96/12/19/Th. XXI, 1 Desember 2023, *Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Oktober 2023, **angka sangat sementara*)

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Laju Pertumbuhan Ekspor adalah sebagai berikut:

- a. Capaian -20,07, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar -246,86% tidak tercapai.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar -1,2, terhadap target tahun lalu sebesar 4,00 terdapat penurunan sebesar -216,86%
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekspor tercapai -307,35%

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Ekspor dengan sasaran kinerja Meningkatnya Pertumbuhan dan Pengembangan Ekspor Produk Unggulan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan nilai ekspor. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah -20,07% dari target 4,00% atau sebesar -246,86%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar -1,20%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya pelabuhan yang lebih referensiatif dan memadai untuk aktifitas ekspor.
- b. Adanya diversifikasi produk ekspor.
- c. Dukungan fasilitasi promosi dari pemerintah pusat/daerah.
- d. Pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor daerah.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Harga jual rata - rata logam timah LME sepanjang tahun 2023 sebesar USD26.470 per metrik ton, turun 15,90% dibanding tahun 2022 sebesar USD31.474 per metrik ton .
- b. Belum tersediannya pelabuhan yang referensiatif dan memadai untuk aktifitas ekspor.
- c. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Komoditas karet tidak melalui Bangka Belitung

dikarenakan Kelangkaan container yang dapat mempengaruhi jadwal keberangkatan atau pengiriman barang ekspor ke negara tujuan, Freight naik sangat tinggi dari 3.500 USD/container sebelumnya menjadi 4.500 USD/container atau naik sebesar 31,42 persen, Transportasi pengangkutan harus via Jakarta sehingga dibutuhkan biaya pengangkutan yang begitu besar karena membutuhkan 2 kali stuffing.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor.
- b. Meningkatkan promosi produk ekspor daerah,
- c. Mendukung peningkatan fasilitas dan sarpras pendukung kegiatan ekspor,
- d. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder pendukung ekspor.
- e. Diharapkan kedepan Bangka mempunyai lebih ekspedisi untuk kontainer reefer dengan harga yang sesuai.
- f. Pengadaan BIMTEK peningkatan kapasitas ekspor dan Pemasaran dengan ITPC dan ATDAG.

8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah diukur dengan indikator Pertumbuhan Investasi. Capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 7,8 Trilyun Rupiah (Realisasi Investasi berdasarkan Press Release Kementerian Investasi TW III tahun 2023) atau sebesar 312% dari target 2,5 Trilyun Rupiah. *(Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah).*

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Realisasi Investasi adalah sebagai berikut:

- a. Capaian 10,15, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 40,6 tidak tercapai.
- b. Tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun lalu karena Pertumbuhan Investasi merupakan indikator baru di dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Pertumbuhan Investasi tercapai 29,75

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- 1) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sasaran kinerja Meningkatnya Kepatuhan Investor terhadap Regulasi Investasi dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Perusahaan yang Patuh Terhadap Perundang-undangan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 69,38%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya kegiatan pengawasan ke tempat Pelaku Usaha guna pembinaan terkait LKPM dan realisasi investasi perusahaan yang sudah berjalan.
- b. Pelaku Usaha yang mulai menyadari bahwa terdapat kewajiban pelaporan LKPM di tiap triwulannya.
- c. Diadakannya penginputan langsung realisasi investasi Pelaku Usaha pada saat diselenggarakannya bimbingan teknis/sosialisasi pada saat periode pelaporan LKPM tiap triwulannya.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih adanya ketidakpatuhan dari Pelaku Usaha dalam melaporkan realisasi investasi mereka di LKPM pada saat sudah mendapatkan izin berusaha.
- b. Pelaku Usaha terkendala akan hilangnya *username* ataupun password pada saat pertama kali pembuatan izin berusaha/bukan pelaku usaha atau pemilik langsung yang mengurus

perizinan berusaha.

- c. *Error system* di website penginputan LKPM sering juga terkendala pada saat masa pelaporan yang hanya 10 hari, mengingat banyaknya pelaku usaha se-Indonesia yang melaporkan LKPM.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Masih perlu diadakannya pengawasan ke pelaku usaha guna membina mereka terkait LKPM dan mengetahui sejauh mana progres perizinan/pun realisasi investasi perusahaan.
- b. Masih tetap harus dibina serta dibimbing para pelaku usaha untuk tetap melaporkan ada tidaknya realisasi investasi di usaha mereka.

- 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan sasaran program Meningkatnya Iklim Penanaman Modal Provinsi dengan indikator Banyaknya investor yang menanamkan modal. Capaian indikator kinerja adalah banyaknya investor yang menanamkan modal target sebesar 23 Investor tahun 2023. Capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebanyak 51 investor ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai 125 investor atau lebih rendah sebesar 59,2%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Telah disusunnya peta potensi dan peluang investasi daerah pulau bangka maupun pulau belitung yang merupakan sinergi potensi/peluang investasi kabupaten/kota sehingga menjadi satu data yang disiapkan ditawarkan kepada investor;
- b. Memberikan kemudahan berinvestasi kepada pelaku usaha dan calon investor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Melaksanakan Fasilitasi Kemitraan Usaha antara usaha besar dengan UMKM dan Koperasi.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum adanya kejelasan status lahan yang akan ditawarkan kepada calon investor yang terkendala masalah sertifikasi, zonasi, Lahan serta harga lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Upah tenaga kerja yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain;
- c. Masih kurangnya infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri antara lain Pelabuhan yang representatif, sarana angkut, air bersih dan pengumpulan sampah.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Merevisi dan mengimplementasikan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah terkait dengan perizinan dan penanaman modal;
- b. Memberikan fasilitas/Insentif dan Kemudahan berinvestasi kepada pelaku usaha;
- c. Melaksanakan proses pelayanan perizinan melalui OSS-RBA.

- 3) Program Promosi Penanaman Modal dengan sasaran program Meningkatnya Peluang Promosi Penanaman Modal. Capaian indikator kinerja adalah 2 peluang investasi dari target sebesar 2 Peluang atau 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Peningkatkan kualitas dan efisiensi layanan promosi penanaman modal, dan ada koordinasi dengan beberapa kabupaten kota di Bangka Belitung;
- b. Pemberian kemudahan informasi kepada investor, seperti informasi kemudahan perizinan, pembebasan pajak, dan informasi lainnya terkait peluang investasi; dan
- c. Adanya peningkatan realisasi investasi yang inklusif dengan menetapkan target realisasi investasi yang jelas dan terukur

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Jumlah SDM yang melaksanakan promosi penanaman modal masih sedikit;
- b. Kompetensi dan kemampuan SDM promosi penanaman modal masih rendah, terutama dalam kemampuan untuk melaksanakan promosi penanaman modal secara online atau digital; dan
- c. Anggaran pelaksanaan promosi penanaman modal yang masih relative kecil. Dimana pada tahun 2023 pelaksanaan promosi penanaman modal secara offline dengan mengikuti pameran keluar daerah hanya 1 (satu) kali.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan OPD Teknis dan Kabupaten/Kota di Bangka Belitung;
- b. Meningkatkan kualitas layanan dan kompetensi SDM yang melaksanakan promosi penanaman modal;
- c. Menyiapkan data peluang penanaman modal yang siap ditawarkan agar lebih menarik minat investor.

- 4) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan sasaran program Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Capaian indikator kinerja adalah 125,47 %. (*Data per November 2023*) dari target sebesar 950 Pelaku Usaha. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 105,12%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Inisiatif;
- b. Kreatif; dan
- c. Kerjasama TIM

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Keterbatasan SDM;
- b. Motivasi kerja; dan
- c. Sarana dan Prasarana kurang memadai.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan rapat penyusunan program dan kegiatan Bidang melibatkan seluruh pegawai yang terlibat dalam tim,
- b. Melakukan rapat evaluasi kinerja per 3 bulan sekali untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,
- c. Mengajukan anggaran terkait penyediaan sarana dan prasarana.

- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan sasaran program Meningkatnya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan. Capaian indikator kinerja adalah 100 % dari target sebesar 1 Dokumen.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Inisiatif,
- b. Kreatif,
- c. Kerjasama TIM

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Keterbatasan SDM;
- b. Motivasi kerja;
- c. Sarana dan Prasarana kurang memadai dan
- d. Terlambatnya penetapan APBD Perubahan sehingga anggaran yang akan direalisasikan belum tercapai dan pelaksanaan tugas terhambat.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan rapat penyusunan program dan kegiatan Bidang melibatkan seluruh pegawai yang terlibat dalam tim,
- b. Melakukan rapat evaluasi kinerja per 3 bulan sekali untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,
- c. Mengajukan anggaran terkait penyediaan sarana dan prasarana

9. Meningkatnya Pembangunan Manusia

Kinerja sasaran Meningkatnya Pembangunan Manusia diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 74,09 atau sebesar 103,03 dari target 71,91. *(Sumber data didapat dari Badan Pusat Statistik)*

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Capaian 74,09, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 103,03 %.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 73,50 (kolom 4), terhadap target
- c. Tahun lalu sebesar 71,69, terdapat peningkatan sebesar 0,53 persentase capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu.
- d. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja 72,57 tercapai 102,09 %.

Dengan dirilisnya angka hasil SP2020 Long Form, maka pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia dirilis menggunakan UHH hasil Long Form SP2020. IPM Hasil Long Form SP2020 dibackcasting dari tahun 2020-2023

Data IPM yang menggunakan UHH SP2010 seperti tahun sebelumnya dapat diakses di <https://babel.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>. (IPM 2022 (UHH SP2010)=72,24, IPM 2023 (UHH SP2010)=72,85)

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- l) Program pengelolaan pendidikan dengan sasaran kinerja Meningkatnya APK SMA, APK SMK dan APK Pendidikan Khusus dengan indikator kinerja APK SMA, APK SMK, APK Pendidikan Khusus. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah:
 - a. APK SMA (46,5 %) dari target 41,25%
 - b. APK SMK (38,6 %) dari target 36,27 %
 - c. APK PENDIDIKAN KHUSUS (87,42 %) dari target 77,25%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Dukungan anggaran APBD untuk peningkatan layanan akses pendidikan melalui pemberian beasiswa, penambahan ruang kelas baru, pengadaan sarana mobilitas, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Pemenuhan standar guru dan tenaga kependidikan mulai dari kompetensi, kualifikasi, sertifikasi serta sebaran dan jumlah guru dan tenaga kependidikan.
- c. Bantuan keuangan bidang pendidikan ke kabupaten/kota untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dll

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah cukup tinggi
- b. Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah masih rendah
- c. Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat terbatas
- d. Belum terpenuhinya standar Guru dan Tenaga Kependidikan mulai dari kompetensi, kualifikasi, sertifikasi serta sebaran dan jumlah guru dan tenaga kependidikan
- e. Masih ada anak berkebutuhan khusus yang belum teridentifikasi
- f. Terbatasnya jumlah Satuan pendidikan khusus

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mencegah siswa putus sekolah dengan meningkatkan fungsi pengawasan sekolah
- b. Secara bertahap pemenuhan sarana pendidikan seperti unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, pengadaan sarana mobilitas
- c. Secara bertahap pemenuhan guru dan tenaga kependidikan
- d. Memberikan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan ke kabupaten/kota seperti pemberian insentif kepada guru honor, bantuan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- e. Memberikan beasiswa kepada siswa yang ekonomi orang tuanya kurang mampu
- f. Bekerja sama dengan DUKCAPIL dan BPS untuk Pendataan Penduduk yang berkebutuhan khusus
- g. Membangun Pusat Layanan Autis di setiap kabupaten/kota atau menambah jumlah SLB di Kabupaten/Kota.

- 2) Program Pengembangan Kurikulum dengan sasaran kinerja Meningkatnya Dokumen Kurikulum yang Terintegrasi dengan Kurikulum Nasional dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Kurikulum yang Terintegrasi dengan Kurikulum Nasional. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100% atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Dukungan anggaran APBD
- b. Pengembangan kurikulum berbasis Science, Technology, Engineering, Arts dan Maths (STEAM/STEM) dan kearifan Lokal

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. belum semua sekolah mengintegrasikan kurikulum muatan lokal dengan kurikulum nasional
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- a. Meningkatkan Jumlah sekolah yang mengintegrasikan kurikulum muatan lokal dengan kurikulum nasional

- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan sasaran kinerja Meningkatnya Guru yang Mengajar sesuai dengan Kompetensi dengan indikator kinerja Persentase Guru yang Mengajar sesuai dengan Kompetensi. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 82% dari target 82% atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Dukungan anggaran APBD
- b. Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi sesuai dengan kompetensi

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum terpenuhinya standar Guru dan Tenaga Kependidikan mulai dari kompetensi, kualifikasi, sertifikasi serta sebaran dan jumlah guru dan tenaga kependidikan

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Dukungan anggaran APBD
- b. Menganalisa kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Kompetensi.

Tabel Perbandingan dengan Realisasi Nasional Tahun 2023

PROVINSI / NASIONAL	Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi	74,09
Nasional	74,39

10. Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam Demokrasi

Kinerja sasaran Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam Demokrasi dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. Capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 76,55 atau sebesar 98,91% dari target 77,39%. (*Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah*).

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Capaian 76,55, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 98,91% tidak tercapai;
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 74,11% terdapat kenaikan sebesar 2,44%
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi tercapai 95,19%.

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sasaran kinerja Menurunnya Konflik yang Berlatarbelakang Ideologi dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Konflik yang berlatarbelakang Ideologi. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0% kasus atau 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kondisi suasana kerja dan hubungan relasi yang kondusif;
- b. Hubungan dengan Masyarakat, mitra atau Stakholder yang harmonis;

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- c. Tidak ada.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mempertahankan Kinerja dengan usaha yang sudah dilaksanakan.

- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan sasaran program Pembinaan Politik di Daerah dengan indikator Persentase Pembinaan Politik di Daerah. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 30%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini tetap dibandingkan pada tahun 2022 yang juga sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kondisi suasana kerja dan hubungan relasi yang kondusif;
- b. Hubungan dengan masyarakat, mitra atau stakholder yang harmonis;
- c. Anggaran yang memadai.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Tidak Ada.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mempertahankan keadaan terhadap usaha yang sudah dilaksanakan.

- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sasaran program Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dengan Indikator Indeks Kinerja Ormas. Capaian indikator kinerja adalah 50 dari target sebesar 50. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini tetap dibandingkan pada tahun 2022 yang juga sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kondisi suasana kerja dan hubungan relasi yang kondusif;
- b. Hubungan dengan Masyarakat, Mitra dan Ormas yang harmonis;
- c. Anggaran yang memadai.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Tidak adanya acuan angka indek ormas yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang;
- b. Hasil Perhitungan indeks ormas dari lembaga yang berwenang tidak dimunculkan
- c. Dalam menentukan indek tersebut dilaksanakan mandiri dengan menghitung Pemberdayaan yang sudah dilaksanakan terhadap ormas yang ada di Bangka Belitung.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mendesak lembaga terkait dalam rangka menerbitkan indek sebagai standar penghitungan.

- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sasaran program Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah dengan indikator Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah. Capaian indikator kinerja adalah 30% dari target sebesar 30%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini tetap dibandingkan pada tahun 2022 yang juga sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kondisi suasana kerja dan hubungan relasi yang kondusif;
- b. Hubungan dengan Masyarakat, mitra atau Stakholder yang harmonis;
- c. Anggaran yang memadai.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

Tidak Ada.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mempertahankan keadaan terhadap usaha yang sudah dilaksanakan.

- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan sasaran program Daerah Terlibat Konflik Sosial di Daerah dengan indikator Persentase Daerah Terlibat Konflik. Capaian indikator kinerja adalah 74,285 % dari target sebesar 75%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kondisi suasana kerja dan hubungan relasi yang kondusif;
- b. Hubungan dengan Masyarakat, mitra atau Stakholder yang harmonis;
- c. Anggaran yang memadai.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mempertahankan keadaan terhadap usaha yang sudah dilaksanakan.

11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 69,53* atau sebesar 101,88 dari target 68,25. (*Data realisasi menggunakan data tahun 2022, dikarenakan hasil evaluasi RB tahun 2023 oleh Kemen-PANRB belum rilis*).

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Capaian 69,53*), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101,87
- b. Perbandingan dengan data capaian tahun lalu tidak dapat dibandingkan karena realisasi tahun 2023 belum dirilis oleh KEMENPAN-RB)

Keberhasilan capaian indikator tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- 1) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sasaran kinerja Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah adalah 75% dari target 75% atau tercapai sebesar 100% .

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Merupakan kegiatan rutin yang ada pada Biro Pemerintahan.
- b. Terjalannya kerjasama yang baik diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah lainnya serta Pihak ketiga;

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Lambatnya respon dari perangkat daerah pemrakarsa kerjasama,
- b. Kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait pelaksanaan kerjasama daerah;

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Terus meningkatkan keterampilan dari ASN agar dapat berkualitas
- b. Akan dilakukan pelatihan untuk para ASN agar lebih baik;

- 2) Program Kesejahteraan Rakyat dengan sasaran kinerja Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Usulan Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 105 % dari target 160 atau sebesar 85 %.

- b. Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dikeluarkan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100 % dari target 110 atau 85 %.

- c. Persentase Rumusan Kebijakan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dikeluarkan, 100 % dari target 36 atau 85 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya anggaran pelaksanaan program yang sesuai dengan target indikator program.
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk pencapaian indikator program.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Belum cukup tersedianya sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi individu guna menunjang pencapaian target indikator program.
- b. Belum terbentuknya struktur organisasi tambahan guna menghadapi peningkatan sasaran kinerja perangkat daerah.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- a. Memberikan pelatihan peningkatan kompetensi ASN yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat khususnya perumusan usulan kebijakan daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Dilakukannya penambahan struktur organisasi khususnya di tingkat sub koordinator pada koordinator pelayanan dasar.

- 3) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, sasaran kinerja Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah Dibidang Hukum dengan indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Hukum yang tersusun. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 99% dari target 85% atau sebesar 99%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Komitmen,
- b. Pelayanan Prima,
- c. Kompeten
- d. Profesionalisme
- e. Kerjasama

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Sarana dan Prasarana,
- b. Kurangnya SDM

- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sasaran kinerja Meningkatkan Akuntabilitas PD Sekretariat Daerah dengan indikator kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 77,5 % atau terealisasi sebesar 100 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan ketersediaan dana
- b. Melaksanakan agenda dan kebijakan pembangunan yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat
- c. Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian terkait perekonomian

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kurang Optimalnya kemampuan SDM dalam melakukan evaluasi Perencanaan Anggaran
- b. Penerapan regulasi dan pembaharuan sistem aplikasi mempengaruhi dana transfer dari pusat.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Memaksimalkan koordinasi dengan Bappeda, Bakuda dan Inspektorat dan lebih insentif dengan Kementerian Keuangan
- b. Melakukan pengembangan kemampuan terhadap SDM secara rutin.

- 5) Program Perekonomian dan Pembangunan, sasaran kinerja Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 75 % atau terealisasi sebesar 100 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan ketersediaan dana
- b. Melaksanakan agenda dan kebijakan pembangunan yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat

- c. Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian terkait perekonomian

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kurang Optimalnya kemampuan SDM dalam melakukan evaluasi Perencanaan Anggaran
- b. Penerapan regulasi dan pembaharuan sistem aplikasi mempengaruhi dana transfer dari pusat.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Memaksimalkan koordinasi dengan Bappeda, Bakuda dan Inspektorat dan lebih insentif dengan Kementerian Keuangan
- b. Melakukan pengembangan kemampuan terhadap SDM secara rutin.

- 6) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, sasaran kinerja Kebijakan Administrasi Pembangunan mempunyai dengan indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 75 % atau terealisasi sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan ketersediaan dana
- b. Melaksanakan agenda dan kebijakan pembangunan yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat
- c. Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala terkait realisasi anggaran dan pembangunan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kurang Optimalnya kemampuan SDM dalam melakukan evaluasi Perencanaan Anggaran
- b. Penerapan regulasi dan pembaharuan sistem aplikasi mempengaruhi dana transfer dari pusat

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Memaksimalkan koordinasi dengan Bappeda, Bakuda dan Inspektorat dan lebih insentif dengan Kementerian Keuangan
- b. Melakukan pengembangan kemampuan terhadap SDM secara rutin.

- 7) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, sasaran kinerja Meningkatkan Usulan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 80% atau terealisasi sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan,
- b. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik,
- c. Dukungan Pimpinan,
- d. Dukungan anggaran baik melalui APBD,
- e. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi,
- f. Peningkatan Kompetensi Pelaku Pengadaan barang jasa

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya kebijakan dan aturan yang berubah, tidak update dan aturan yang tumpang tindih,

- b. Kurangnya kompetensi SDM,
 - c. Tidak konsisten dalam manajemen waktu dalam penyelesaian target kegiatan untuk sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,
 - d. Kebijakan kepegawaian menunggu pembagian pegawai yang sesuai kebutuhan.
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- a. Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan, antar OPD dan pelaku pengadaan barang dan jasa lainnya,
 - b. Meningkatkan Komitmen bagi seluruh pegawai untuk mewujudkan sasaran dan target kinerja tepat waktu dan lebih baik.
- 8) Program Penataan Organisasi dengan sasaran kinerja Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah di Bidang Penataan Organisasi dengan indikator kinerja Persentase Usulan Kebijakan Daerah di Bidang Penataan Organisasi yang disusun. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100 % dari target 80 % atau terealisasi sebesar 80 %
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- a. Kegiatan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahun
 - b. Terjalannya kerjasama yang baik antar bagian-bagian di Biro
 - c. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kegiatan sudah memadai
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- a. Masih perlu di tingkatkan lagi koordinasi dengan bagian-bagian di Biro
 - b. Nilai RB tidak lagi dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah, sesuai dengan perubahan aturan yang berlaku
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :
- a. Penyusunan perencanaan program kerja disusun secara lebih matang
 - b. Pelaksanaan Program kerja dilakukan secara terencana sesuai rencana pelaksanaan anggaran yang ditetapkan.
- 9) Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan dengan indikator kinerja:
- a. Nilai tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan dibawah 5%. Capaian kinerja untuk indikator ini tahun 2023 adalah dibawah angka 3% dari target 5%;
 - b. Level Capaian Maturitas SPIP. Capaian kinerja untuk indikator ini tahun 2023 adalah level 3 dari target level 3 (Hasil penilaian capaian maturitas SPIP oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Kinerja Pimpinan, Auditor, P2UPD serta seluruh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- a. Kepatuhan terhadap hasil audit masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terutama bila terkait dengan pihak ketiga (rekanan).
 - b. Saat ini masih banyak kepala OPD yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi.
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- a. Melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- b. Melaksanakan evaluasi kebijakan pengawasan terkait pengembangan pengawasan berbasis risiko;
 - c. Mengoptimalkan pelaksanaan *whistleblowing system*.
- 10) Program Kepegawaian Daerah, sasaran kinerja Terpenuhi Pegawai sesuai Kebutuhan dan Formasi dengan Indikator kinerja Persentase Pemenuhan Pegawai ASN Melalui Pengadaan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 85% atau sebesar 100%.
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- a. Regulasi yang ada;
 - b. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB.
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- c. Sarana dan prasarana CAT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendukung sehingga harus menggunakan fasilitasi CAT BKN.
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- a. Peremajaan sarana dan prasarana CAT.
- 11) Program Kepegawaian Daerah, sasaran kinerja Terpenuhi Pegawai sesuai Kebutuhan dan Formasi dengan indikator persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 66.97% dari target 24.42% atau sebesar 274%.
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah Arahan pimpinan untuk akselerasi implementasi sistem merit dan dukungan teknologi informatika dalam bentuk aplikasi Primadona yang memungkinkan pemetaan kompetensi penggunaan skor masif dan cepat.
- 12) Program Kepegawaian Daerah, sasaran kinerja Terpenuhi Pegawai sesuai Kebutuhan dan Formasi dengan indikator Persentase Pemenuhan Pegawai ASN Melalui Mutasi. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 94.11% dari target 94% atau sebesar 100.11%.
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah Sarana dan Prasaran yang mendukung.
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- a. Syarat administrasi yang banyak (Pertek BKN / Izin tertulis dari Kemendagri)
 - b. Adanya pergantian P.J. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di akhir tahun.
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- a. Perencanaan yang akan dilaksanakan di akhir tahun;
 - b. Membuat nota dinas telaah staf ke peserta secara berkala.
- 13) Program Kepegawaian Daerah dengan sasaran kinerja Terpenuhi Pegawai sesuai Kebutuhan dan Formasi dengan indikator persentase ASN yang Memiliki Kinerja Minimal Baik. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 99.95% dari target 99.85% atau sebesar 100%.
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- a. Tersedianya anggaran, sarana dan prasaran yang memadai;
 - b. Pelaksanaan diklat, bimtek dan sosialisasi.
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah Kesadaran ASN untuk meningkatkan kinerja dan disiplin.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Rutin melaksanakan sosialisasi;
- b. Reward dan punishment berimbang.

- 14) Program Pengembangan SDM, sasaran kinerja Meningkatkan Kompetensi ASN dengan indikator kinerja Persentase ASN yang Meningkatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Teknis. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 68% dari target 70% atau sebesar 97.14%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana yang memadai.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah Kesadaran ASN untuk meningkatkan Kompetensi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai adalah Kebijakan peraturan peningkatan IP ASN terhadap tambahan penghasilan pegawai.

- 15) Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

- a. Sasaran program Meningkatkan Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan dengan indikator Persentase Konsistensi Program Pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 100 %. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 100 %.

- b. Sasaran program Meningkatkan Kualitas Hasil Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti. Capaian indikator kinerja adalah 77 % dari target sebesar 75 %. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu sebesar 75 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2023 memberikan semangat bagi peserta Musrenbang untuk selalu berpartisipasi dalam penyampaian usulan-usulan yang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Kesadaran dan kemauan, Kemampuan dan kesempatan untuk berinteraksi, berdiskusi dan bertukar gagasan dengan orang lain;
- c. Dengan dukungan SDM perangkat daerah serta mitra Bappeda yang berkualitas membantu mewujudkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas;
- d. Dukungan sarana prasarana serta ketersediaan perangkat yang memudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi informasi;
- e. Dukungan dari stakeholder Kementerian/Lembaga/Instansi vertikal dalam pelaksanaan forum FGD bersama mitra PD;
- f. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- g. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam kesedianya narasumber maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- h. Adanya dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN;
- i. Adanya WhatsApp Grup Bappeda dan Perangkat Daerah sebagai salah satu alat komunikasi dan koordinasi.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Seringnya terjadi pergantian pejabat/personal pelaksana yang membidangi perencanaan sehingga perlu penyesuaian dan waktu pembelajaran bagi penggantinya;
- b. Banyak usulan-usulan dari perangkat daerah, kelompok masyarakat, stakeholder lainnya dari tahun sebelumnya yang belum diakomodir pemerintah provinsi sehingga ada keengganan untuk hadir dalam forum musrenbang;
- c. Revisi anggaran/Refocussing (Pengurangan dan Penambahan) secara bertahap, sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dan terdapat tambahan target output; sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dan terdapat tambahan target output;
- d. Adanya ketidakselarasan antara perencanaan dan ketersediaan anggaran sehingga menyebabkan program baru terlaksana di triwulan terakhir.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan proses *checks and balances* terhadap perencanaan dan penganggaran sehingga implementasi program lebih efektif;
- b. Melakukan perbaikan komunikasi publik agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan semakin baik.

16) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- a. Sasaran program Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan indikator Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 100 %. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 100 %.
- b. Sasaran program Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan indikator Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 100 %. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 100 %.
- c. Sasaran program Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan indikator Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 100 %. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 100 %.
- d. Sasaran program Meningkatnya Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan indikator Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Capaian indikator kinerja adalah 92% dari target sebesar 90 %. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu sebesar 90 %.
- e. Sasaran program Meningkatnya Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan indikator Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Capaian indikator kinerja adalah 92% dari target sebesar 90%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu sebesar 90%.

- f. Sasaran program Meningkatnya Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan indikator Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD bidang Infrastruktur dan Wilayah. Capaian indikator kinerja adalah 92% dari target sebesar 90%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu sebesar 90%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Dukungan anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Adanya komitmen dari pimpinan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan agar lebih baik;
- d. Dengan dukungan SDM perangkat daerah serta mitra Bappeda yang berkualitas membantu mewujudkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas;
- e. Perbaikan kualitas data dan informasi rutin dilakukan;
- f. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium jabatan fungsional baru;
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan forum-forum perencanaan pada bidang sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas perencanaan lintas sektor;
- c. Belum optimalnya hasil monitoring pelaksanaan kegiatan perangkat daerah sebagai rekomendasi untuk perencanaan selanjutnya;
- d. Administrasi penganggaran APBD-P yang agak terlambat mempengaruhi kepastian penjadwalan kegiatan sehingga mundur dari jadwal semula.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Menyusun peta jabatan baru;
- b. Mengoptimalkan penyelenggaraan forum-forum perencanaan pada bidang sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas perencanaan lintas sektor;
- c. Mengoptimalkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan perangkat daerah sebagai dasar rekomendasi untuk perencanaan selanjutnya.

17) Program penelitian dan pengembangan daerah

- a. Sasaran program Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah dan Sistem Inovasi Daerah dengan indikator Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan sebagai Bahan Perumusan Kebijakan. Capaian indikator kinerja adalah 82% dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu sebesar 80%.
- b. Sasaran program Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah dan Sistem Inovasi Daerah dengan indikator Persentase Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan. Capaian indikator kinerja adalah 88% dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu sebesar 75%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri RI dalam memfasilitasi penginputan dan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) serta

koordinasi yang baik juga dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didalam penginputan data didalam aplikasi IPKD.

- b. Koordinasi yang baik juga dengan Universitas Bangka Belitung dalam hal mendukung dan memfasilitasi didalam penerbitan jurnal KAMIKAWA dan sekaligus sebagai Peer Review.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Minimnya jumlah peneliti sesuai dengan bidangnya;
- b. Hasil penelitian, kajian-kajian, dan rekomendasi kebijakan tidak bisa tidak bisa digunakan dalam rekomemdsasi perencanaan;
- c. Keberadaan lembaga penelitian belum dianggap sebagai sebuah lembaga litbang daerah itu dapat menjadi partner dalam perumusan kebijakan;
- d. Tidak ada komitmen dari perumus kebijakan untuk mempertimbangkan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pemerintah;
- e. Minimnya jumlah peneliti dan rendahnya tingkat kemampuan peneliti akan berdampak pada kurangnya kualitas hasil penelitian dan kajian.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perekrutan jabatan fungsional peneliti ahli (minimal ahli pertama) perlu segera dilakukan oleh lembaga litbang daerah, karena peneliti merupakan ujung tombak dari lembaga litbang untuk menghasilkan kajian-kajian riset;
- b. Peneliti ahli yang direkrut dari berbagai bidang untuk memberikan variasi hasil-hasil kajian / riset;
- c. Perlunya adanya usaha untuk menambah anggaran penelitian dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta;
- d. Perlu adanya regulasi yang mengatur dalam perumusan kebijakan harus dilakukan kajian-kajian kebijakan sebelum diterbitkan untuk memberikan kesadaran kepada formulator kebijakan untuk menggunakan hasil-hasil riset yang dihasilkan dari Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- 18) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Pengelolaan aplikasi Informatika dengan sasaran program Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi dengan indikator Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE. Capaian indikator kinerja adalah 3,14 dari target sebesar 2,7. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 3,01.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kemampuan dan komitmen pelaksana program yaitu pejabat eselon serta PPTK yang memiliki kompetensi dan ketrampilan yang memadai untuk melaksanakan program tersebut.
- b. Ketersediaan anggaran yang ada sehingga dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan dan pengembangan kapasitas pelaksana program.
- c. Kebijakan dan regulasi yang sangat mendukung sehingga menciptakan capaian yang optimal berupa kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat, kebijakan yang meningkatkan peran swasta, dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pelaksana program.
- d. Dukungan masyarakat berupa partisipasi dalam pelaksanaan program, penerimaan terhadap program, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
- e. Ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi yang beraneka ragam, serta keinginan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi tersebut, sehingga meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Peningkatan koordinasi dan sinergi antar pihak untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan saling mendukung seperti melakukan rapat koordinasi secara rutin.
- b. Peningkatan kualitas tata kelola kebijakan internal yaitu manajemen dan audit TIK.
- c. Peningkatan terhadap pelayan public.

- 19) Program Penyelenggaraan Statistik dengan sasaran program Termanfaatkannya Data dan Informasi Statistik Sektorial dengan indikator Laju Pemanfaatan Data Sektorial (%). Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 55%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 35%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kemampuan dan komitmen pelaksana program yaitu pejabat eselon serta PPTK yang memiliki kompetensi dan ketrampilan yang memadai untuk melaksanakan program tersebut.
- b. Kebijakan dan regulasi yang sangat mendukung sehingga memudahkan konsolidasi baik internal maupun eksternal yang memberikan kemudahan bagi pelaksana program.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Memperbanyak survey yang direkomendasi BPS terkait dengan pelayanan publik, kepuasan masyarakat.
- b. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas metadata terkait survey dan pengumpulan data diatas
- c. Peningkatan alokasi anggaran agar program yang dilaksanakan lebih optimal.

- 20) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan sasaran program Terwujudnya Keamanan Informasi dalam Mendukung Penyelenggaraan SPBE dengan indikator Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI). Capaian indikator kinerja adalah sebesar 367 atau 56,89%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 230 atau 35,65%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kemampuan dan komitmen pelaksana program yaitu pejabat eselon serta PPTK yang memiliki kompetensi dan ketrampilan yang memadai untuk melaksanakan program tersebut.
- b. Kebijakan dan regulasi yang sangat mendukung sehingga memudahkan konsolidasi baik internal maupun eksternal yang memberikan kemudahan bagi pelaksana program.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Optimalisasi Aspek -aspek penilaian dalam Indeks KAMI.
- b. Meningkatkan kualitas penerapan Sistem manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
- c. Optimalisasi Assesment keamanan informasi Sistem Elektronik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung.

- 21) Program Pelayanan Penghubung, sasaran kinerja Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian kinerja untuk indikator ini 84,58% dari target 80% atau sebesar 105,73%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pelayanan kelembagaan aparatur dan Masyarakat, diantaranya yaitu: terkait pelayanan

- di rumah singgah, pelayanan di asrama mulai tertata dengan baik.
- b. Pelayanan Fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya yang mulai banyak diselenggarakan pasca masa pandemi Covid19, dan
- c. Mulai terlatihnya pelayanan terkait Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Sarana dan prasarana khususnya Gedung rumah singgah dan Gedung asrama yang masih sewa, sehingga keterbatasan dalam pelayanan kenyamanan.
- b. Masih kurang kolaborasi dari unsur SKPD terkait pelayanan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya.
- c. Kurangnya ketersediaan SDM yang berkompeten, khususnya pada jabatan-jabatan tertentu sehingga mempengaruhi pelayanan terkait koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Berupaya mempertahankan yang sudah tertulis di RENSTRA terkait Pengadaan Gedung Rumah Singgah dan Gedung Asrama.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi terkait pelayanan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya baik dalam bidang perencanaan dan penganggaran.
- c. Meningkatkan pelatihan dan kompetensi SDM untuk meningkatkan pelayanan.

- 22) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan sasaran kinerja Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga DPRD dengan indikator kinerja Persentase Meningkatnya Fungsi Legislasi Lembaga DPRD. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 82% atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kinerja pimpinan dan anggota DPRD yang selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan sehingga kebutuhan anggaran yang harus tersedia juga semakin maksimal.
- b. Pencapaian realisasi kinerja pada perjalanan dinas luar daerah lintas provinsi dan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka fasilitasi tugas pimpinan dan anggota DPRD selalu optimal dalam pelaksanaannya akan tetapi untuk pencapaian realisasi anggarannya sangat terhambat dikarenakan anggaran yang harus selalu tersedia.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mendorong pejabat eselon terkait dan para PPTK di Sekretariat DPRD untuk mengintensifkan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan sehingga realisasi anggaran/keuangan serta realisasi fisik kegiatan pada tahun anggaran 2023 dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan bersama dalam rangka pencapaian optimalisasi program,
- b. Meningkatkan konsolidasi internal terhadap Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan pencapaian target program pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan menyesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan.
- c. Meningkatkan dan memaksimalkan Standart Operasional Procedure (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal dalam rangka mengantisipasi tingginya standar

pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.

- 23) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran kinerja Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan APBD Perubahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja Persentase Kesesuaian Anggaran terhadap Perencanaan dan Pengalokasian Belanja dalam APBD. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100 atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Penyusunan APBD dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga penetapan APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- b. Penyusunan LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disampaikan tepat waktu, sehingga dapat diaudit oleh BPK sesuai jadwal yang ditentukan;
- c. Pembinaan pengelolaan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik sehingga seluruh kabupaten/kota mendapatkan predikat WTP atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Evaluasi terhadap perubahan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, sehingga ada beberapa program dan kegiatan pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 tidak maksimal pelaksanaannya.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melaksanakan peningkatan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga capaian target program dan Kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.

- 24) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran kinerja Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Nilai Kepatuhan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 2 dari target 2 atau sebesar 100%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Sumber daya penatausahaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat kompetensinya sehingga penatausahaan barang milik daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan;
- b. Penyusunan Laporan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat dilaksanakan pemenuhan syarat administratif terhadap proses tersebut.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi kepada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penatausahaan barang milik daerah,
- b. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan / audit BPK RI terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan dengan berkoordinasi dan berkonsolidasi pada semua perangkat daerah.

- 25) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran kinerja Terlaksananya Peningkatan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Pertumbuhan PAD. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah -8,79 % dari target 8,5 %. Faktor tercapainya target indikator program ini adalah:
- Penetapan target retribusi daerah tidak sesuai dengan kondisi potensi yang ada, sehingga pencapaian target tidak sesuai dengan yang diharapkan.
 - Kurangnya dukungan anggaran terhadap program dan kegiatan teknis pada masing-masing DPD yang mengelola retribusi daerah dalam rangka pencapaian target retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah
 - Menurunnya harga beberapa komoditas utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- Penetapan target pendapatan asli daerah (PAD) disesuaikan dengan potensi yang ada;
 - Mengalokasikan dana pengelolaan retribusi pada organisasi perangkat daerah teknis agar dapat melaksanakan pengelolaan retribusi daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah
 - Diperlukan adanya campur tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, sektor swasta, masyarakat dan semua pihak dalam mengendalikan beberapa harga komoditas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik dan normal

12. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur

Kinerja sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur diukur dengan indikator Persentase Ketersediaan Infrastruktur. Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 19,89 atau sebesar 78,00 dari target 25,50. *(Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah).*

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- Tercapai 19,89, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 78% tidak tercapai.
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Persentase ketersediaan infrastruktur tercapai 19,89 %
- Tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022, karena Persentase Ketersediaan Infrastruktur merupakan indikator baru berdasarkan indikator sasaran yang ada di dokumen Rencana Pembangunan Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan sasaran kinerja Menurunkan Luas Kawasan yang Terdampak Daya Rusak Air di WS Kewenangan Provinsi dan Meningkatkan Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan System Irigasi Primer dan Sekunder yang dikembangkan dan dikelola dengan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah dari target 21,20% atau sebesar 81,33%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Dukungan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat yang terkena dampak oleh Pemerintah Daerah setempat, baik sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan;

- b. Rekayasa teknik dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek dan penyelesaian kendala teknis pelaksanaan di lapangan;
- c. Tersedianya dana penganggaran dan dukungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada perencanaan/pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung/penampung air lainnya

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air terjadi lebih cepat dibanding kemampuan melakukan perbaikan.,
- b. Akibat kerusakan lingkungan terutama pada Daerah Tangkapan Air bagian hulu (hutan), aliran permukaan semakin besar dan menimbulkan erosi yang pada akhirnya terjadi sedimentasi di sungai, sehingga berdampak mengurangi daya tampung sungai yang dapat menyebabkan banjir;
- c. Penggunaan bantaran sungai/daerah sempadan untuk permukiman menyulitkan kegiatan pengerukan/pembersihan sedimentasi tersebut
- d. Terbatasnya data pendukung dan masukan proposal usulan dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan embung/ penampung air lainnya

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi di secara rutin untuk meningkatkan kinerja jaringan;
- b. Pemeliharaan sungai dengan menggunakan alat berat secara swakelola;
- c. Membuat dan memprioritaskan usulan kegiatan masing-masing kabupaten/kota terkait perencanaan dan pembangunan embung/ penampung air lainnya;
- d. Mengoptimalkan kegiatan perencanaan dan pembangunan embung/ penampung air lainnya sesuai dengan program rencana tahunan.

- 2) Program Penyelenggaraan Jalan dengan sasaran program Meningkatnya Persentase Kemantapan Jalan dengan indikator Persentase Kemantapan Jalan. Capaian indikator kinerja adalah 92.86% dari target sebesar 90.13%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 91.67%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk karena dengan dana yang memadai, pihak penyelenggara jalan dapat melakukan pengembangan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemeliharaan efektif dan fungsional jalan dan jembatan sehingga bisa menjadi kunci dalam mencapai target indicator program penyelenggaraan jalan,
- b. Proses perencanaan yang matang dan terarah yang mencakup identifikasi kebutuhan jalan, penentuan prioritas, dan perencanaan anggaran secara efektif

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Terbatasnya pengalokasian anggaran program penyelenggaraan jalan terbatas, hal ini dapat membatasi kemampuan untuk melakukan pengembangan infrastruktur jalan, pemeliharaan efektif dan fungsional jalan dan jembatan yang diperlukan;
- b. Cuaca ekstrem, bencana alam, atau kondisi iklim yang tidak mendukung dapat menghambat pelaksanaan proyek penyelenggaraan jalan dan berpotensi merusak infrastruktur yang sudah ada;
- c. Perencanaan yang tidak matang, termasuk identifikasi kebutuhan yang tidak akurat dalam penentuan prioritas yang kurang tepat dan perencanaan anggaran yang tidak sesuai, dapat menghambat pencapaian target indikator.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran program penyelenggaraan jalan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibutuhkan,
- b. Memastikan perencanaan yang lebih matang dengan melakukan studi yang cermat tentang kebutuhan infrastruktur Jalan dan Jembatan baik dalam hal prioritas dan penyusunan anggaran yang akurat,
- c. Mengintegrasikan teknologi terkini dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan, seperti sistem manajemen lalu lintas, pemantauan kondisi jalan, dan sistem informasi geografis (GIS) untuk pengelolaan data infrastruktur jalan.

- 3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan sasaran kinerja Meningkatkan Tenaga Ahli yang Terlatih, Meningkatkan Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi dan Tersedianya Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan indikator kinerja Rasio Ketersediaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 23.59 % dari target 15.92 % atau sebesar diatas 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara stakeholder dengan masyarakat jasa konstruksi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Peningkatan kualitas assesor dan instruktur yang dimiliki oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga berdampak pada peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi yang kompeten.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi melalui sertifikasi tenaga kerja konstruksi didukung dengan kecukupan instruktur bidang konstruksi dan assesor kompetensi konstruksi;
- b. Meningkatkan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi melalui pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi
- c. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat jasa konstruksi terutama dalam penyediaan data rantai pasok (material dan peralatan konstruksi).

- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan sasaran kinerja Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Bersanitasi. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 3.55% dari target 6% atau sebesar 59 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Ketersedian ASN dengan background Teknik Sipil dengan kompetensi bidang sanitasi.
- b. Ketersedian anggaran untuk melengkapi dokumen perencanaan/readiness criteria (RC)
- c. Ketersediaan data primer dan sekunder yang update dari Kabupaten dan Kota sebagai data baku bidang sanitasi.
- d. Masuk dalam Renstra Dinas PUPRPRKP

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kurangnya ASN dengan background Teknik Sipil dengan kompetensi air minum, sanitasi, dan persampahan
- b. Keterbatasan anggaran untuk melengkapi dokumen perencanaan/readiness criteria (RC)

- c. Kurangnya data primer dan sekunder dari Kabupaten dan Kota sebagai data baku bidang air minum, sanitasi, dan persampahan
- d. Tidak masuk Renstra Dinas sehingga tidak menjadi program dinas PUPRPRKP setiap tahun

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Menyiapkan personil ASN dengan kompetensi air minum, sanitasi, dan persampahan;
- b. Menyiapkan anggaran secara rutin untuk melengkapi dokumen perencanaan/readiness criteria (RC) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Koordinasi dan pembinaan kepada Kabupaten dan Kota sebagai data baku bidang air minum, sanitasi, dan persampahan untuk melengkapi data primer dan sekunder;
- d. Menyampaikan rencana kerja dari perencanaan sampai pelaksanaan fisik pada Renstra Dinas PUPRPRKP.

- 5) Program Kawasan Permukiman dengan sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja persentase luas Kawasan kumuh yang tertangani. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 2,05% dari target 6% atau sebesar 34,1%.

Faktor pendukung indikator program ini adalah :

- a. adanya kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha, yang melaksanakan fasilitasi infrastruktur kebutuhan jalan lingkungan, perbaikan rumah tidak layak huni.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. terlambat melakukan penyesuaian terhadap target kinerja setelah ditetapkan anggaran.
- b. Kurangnya alokasi anggaran.
- c. SDM sebagai analis Kawasan belum kompeten.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Memberikan waktu yang cukup untuk penginputan target dalam system dan terkendali.
- b. Penambahan alokasi anggaran.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM analis Kawasan.

- 6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan sasaran kinerja Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan System Penyediaan Air Minum dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0% dari target 0% atau sebesar 0%.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2023 terkait Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota belum direalisasikan dikarenakan belum lengkapnya readiness criteria (RC).

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman akan melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Feasibility Study (FS) SPAM Regional Lintas Kabupaten Belitung/Belitung Timur untuk

melengkapi dokumen perencanaan.

- 7) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan sasaran kinerja Terselenggaranya Pengembangan System dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Pengelolaan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0% dari target 0% atau sebesar 0 %.
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Sudah tersusunnya dokumen rencana induk persampahan kewenangan provinsi pada tahun 2022.
 - Sudah tersusunnya Jakstrada persampahan untuk TPA/TPST Regional yang dilaksanakan oleh DLHK tahun 2019.
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- Belum diterbitkannya Raperda dari Dinas LHK perihal pengelolaan persampahan regional dan lokasi khusus TPST Regional untuk ditetapkan di DPRD.
 - Belum adanya MoU antara Kepala Daerah (Gubernur dan Kab/Kota) perihal kesepakatan lokasi Pembangunan TPST Regional dan pembagian beban pengelolaan persampahan untuk masing-masing Kepala Daerah.
 - Keterbatasan anggaran untuk Pembangunan sarana dan prasarana TPST Regional.
- 8) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan sasaran kinerja Terselenggaranya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator kinerja Persentase Pemukiman yang Terfasilitasi oleh PSU. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 25% dari target 25 % atau sebesar 100 %.
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Adanya dukungan anggaran
 - Masuk pada renstra
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- Definisi operasional indicator Program peningkatan PSU belum selaras dengan kewenangan
 - Perencanaan PSU belum terarah, belum adanya penetapan Kawasan PSU berdasarkan kewenangan.
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- Diperlukan penetapan batas Kawasan permukiman
 - Menyusun dokumen perencanaan yang baik
 - Perlu dukungan SDM yang kompeten
- 9) Program Pengembangan Perumahan dengan sasaran Terselenggaranya Pengembangan Perumahan dengan indikator kinerja Persentase Pengembangan Perumahan Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 0% dari target 25 % atau sebesar 0 %.
- Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:
- Indikator belum mengakomodir jika tidak terjadi bencana
 - Belum adanya kebutuhan relokasi karena program provinsi
- 10) Program Penataan Bangunan Gedung dengan sasaran Terselenggaranya Penataan Bangunan Gedung dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang Terselenggara. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 64.71% dari target 23.53 % atau sebesar lebih 100 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan anggaran yang ditetapkan
- b. Kebutuhan pemakaian gedung

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. SDM yang terbatas
- b. Dokumen perencanaan kebutuhan gedung yang belum ada

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Penetapan Gedung strategis
- b. Perencanaan Gedung strategis
- c. Sertifikasi SDM Teknis bangunan gedung

13. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang diukur dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 0,6 atau sebesar 92,31% dari target 0,65. *(Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah).*

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Capaian 0,6, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 92,31 % tidak tercapai.
- b. Dikarenakan pada tahun 2022 belum adanya indikator sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang maka target dan realisasi pada tahun 2022 tidak ada.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja 0,8 tercapai 75 %

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan sasaran kinerja Terselenggaranya Kegiatan Penataan Ruang dengan indikator kinerja Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang formula perhitungan indikator ini adalah Kesesuaian Rencana tata Ruang dibagi Realisasi Pemanfaatan ruang dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 85 % dari target 85 % atau sebesar 100 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan tata ruang di Indonesia;
- b. Proses integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mendekati tahapan akhir untuk disahkan menjadi peraturan daerah;
- c. Forum Penataan Ruang telah terbentuk di provinsi maupun di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum sinkronnya dokumen perencanaan provinsi dengan kabupaten/kota;
- b. Belum menjadi prioritas oleh pemerintah daerah untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran di masyarakat mengenai tata ruang. Selain itu, diperlukan ekstra sumber daya

yang intens dan berkelanjutan hingga masyarakat paham, sadar, dan mandiri serta dapat berperan dalam mewujudkan tertib tata ruang;

- c. Kurang optimalnya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (PPNS-PR) dikarenakan berasal dari struktur kerja yang sama dengan perangkat pelaksana tata ruang di daerah. Selain itu, belum adanya peraturan yang lebih rinci mengenai kelembagaan dan status kepegawaian PPNS-PR yang berada di pusat maupun di daerah, fasilitas (sarana dan prasarana) secara khusus tidak ada, program kerja yang tidak terencana, minimnya pendidikan dan pembinaan anggota PPNS serta belum adanya kemitraan strategis dengan aparat kepolisian dan instansi lainnya;
- d. Belum adanya peraturan di daerah khusus di sektor tata ruang yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), misalnya yang mengatur insentif dan disinsentif, garis sempadan pantai, pengawasan dan pengendalian tata ruang.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mensinkronkan dokumen perencanaan provinsi dengan kabupaten/kota;
- b. Mendorong untuk percepatan penyusunan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Menggiatkan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat, dewan perwakilan rakyat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang perlu disinergikan untuk mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
- d. Mengoptimalkan peran serta Forum Penataan Ruang sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- e. Mempersiapkan personil/anggota PPNS-PR yang profesional dengan bekal pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan dan berkualitas;
- f. Fasilitas (sarana dan prasarana) dan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang;
- g. Menjalin kemitraan strategis dengan pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dinas terkait, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi dalam upaya penegakan hukum bidang penata ruang.
- h. Mendorong percepatan penyusunan peraturan daerah tentang insentif dan disinsentif yang aplikatif di lapangan baik di provinsi maupun di kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan sasaran program Terselenggaranya Kegiatan Pertanahan dengan indikator Presentase program pengadaan tanah untuk Kepentingan umum formula perhitungan indikator ini adalah Luasan Pengadaan Tanah dibagi Luasan Kebutuhan Tanah untuk Kepentingan Umum dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 33.33 % dari target sebesar 20%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya peraturan dan petunjuk teknis dari kementerian ATR/BPN terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- b. Adanya kesediaan dari Masyarakat yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk menghibahkan tanahnya dengan sukarela tanpa ganti rugi.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Adanya sengketa tanah antar pihak di masyarakat, yang saling mengakui pemilik dari sebidang tanah yang sama, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikannya;
- b. Terdapat masyarakat yang belum bersedia melepaskan tanahnya yang terkena obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

- c. Belum tersedianya dokumen perencanaan terkait kebutuhan tanah dari instansi yang membutuhkan tanah;
- d. Harga pasaran yang jauh melebihi taksiran harga yang wajar.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Inventarisasi kebutuhan tanah secara komprehensif;
- b. Membuat skala prioritas pengadaan tanah .
- c. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan sasaran program Terselenggaranya Kegiatan Pertanahan dengan indikator Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah kasus yang terselesaikan dibagi jumlah kasus yang diinventarisasi dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 14.29 % dari target sebesar 15%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya Kerjasama yang baik dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung terkait dukungan data kepemilikan tanah.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Adanya pemilik tanah yang alamat tempat tinggalnya tidak diketahui/berubah;
- b. Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terdokumentasi dengan baik.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Mensertifikatkan asset tanah yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Inventarisasi tanah yang masih bersengketa.
- c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan sasaran program Terselenggaranya Kegiatan Pertanahan dengan indikator Presentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah ganti rugi dan santunan Tanah yang terselesaikan dibagi Jumlah Daftar Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 25% dari target sebesar 80%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya anggaran yang cukup untuk membayarkan ganti kerugian yang masih belum terselesaikan;
- b. Koordinasi yang baik antar instansi terutama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait prosedur penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Nilai ganti kerugian yang belum disepakati anantara kedua belah pihak;
- b. Adanya pemilik tanah yang alamat tempat tinggalnya tidak diketahui/berubah;
- c. Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terdokumentasi dengan baik.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Menggunakan tim penilai tanah yang berlisensi untuk menilai obyek pengadaan tanah dengan komprehensif.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bisa terlaksana dengan baik sesuai rencana.

14. Menurunkan Risiko Bencana

Kinerja sasaran Menurunnya Risiko Bencana diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana. Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 158,52 atau sebesar 101,24% dari target 160,48. (*Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah*).

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Indeks Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai (158,52*), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101,24 % (tercapai).
- b. Tidak dapat dibandingkan dengan data realisasi tahun lalu karena data tahun 2023 belum rilis.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja 158,08 tercapai 99,71%.

Keberhasilan capaian indikator tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1) Program Penanggulangan Bencana dengan sasaran kinerja :

- 1) Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana bencana, dengan indikator kinerja Persentase Penanganan Pra Bencana formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana/ Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi) x 100 %. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(7/7) \times 100\% = 100\%$ dari target 42,86 atau sebesar 612%.
- 2) Meningkatnya upaya kedaruratan dan penyiapan Logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana dengan indikator Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana. Formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana/ Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi) x 100 %. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(7/7) \times 100\% = 100\%$ dari target 100 % atau sebesar 100%.
- 3) Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana dengan indikator kinerja Persentase pelayanan kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang di intervensi dalam kedaruratan. Formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana/ Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang terkena dampak bencana) x 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(7/7) \times 100\% = 100\%$ dari target 85,71 atau sebesar 139,86%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Telah tersusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, dan dokumen Rencana Kontijensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Melibatkan multistakeholders dalam memecahkan permasalahan terkait kebencanaan.
- c. Penanggulangan bencana menjadi salah satu sasaran RPD Provinsi Kep. Bangka Belitung

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai,
 - b. Belum optimalnya koordinasi dan pembagian peran antar multistakeholders terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana.
 - c. Masing kurangnya kuantitas dan kualitas SDM terkait teknis pananggulangan bencana
- Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:
- a. Memaksimalkan peran dari unsur pentahelix dalam ketangguhan bencana.
 - b. Melakukan koordinasi dan harmonisasi intensif baik secara internal BPBD maupun

- eksternal dengan multistakeholders lainnya.
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM penganggulagn bencana

Perbandingan dengan Realisasi Nasional Tahun 2023

PROVINSI / NASIONAL	Indeks Resiko Bencana
Provinsi	158,52
Nasional	158,52

15. Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kinerja sasaran Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun. Capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 0,721 % atau sebesar 100,00 % dari target 0,721 %. (*Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah*).

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran "Indeks Desa Membangun" adalah sebagai berikut:

- Capaian 0,721 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,00 %.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 0,710 % , terhadap target tahun lalu sebesar 0,710 % adalah sama
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Persentase Angka Kemiskinan tercapai 96,39 %.

Keberhasilan capaian indikator tersebut didukung dari program-program sebagai berikut Program Penataan Desa dengan sasaran kinerja Meningkatnya Penataan Desa yang Dibina dengan indikator kinerja Persentase Penataan Desa yang dibina. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100,00 % dari target 3 yang sudah ditetapkan.

- Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan sasaran Meningkatnya kerjasama Desa, dengan Indikator Persentase Kerjasama Desa yang dilaksanakan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100,00 % dari target 1 yang sudah ditetapkan.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan sasaran Meningkatnya Penataan Desa, dengan Indikator Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Dibina. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100,00 % dari target 19 yang sudah ditetapkan.
- Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan sasaran Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang aktif, dengan Indikator Persentase lembaga masyarakat yang aktif. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100,00 % dari target 7 yang sudah ditetapkan..

Faktor pendukung tercapainya target indikator program-program ini adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 27 Oktober 2023 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- b. Proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan hubungan erat antara kemampuan pembiayaan perangkat daerah dan penerimaan/pendapatan pemerintah daerah, hal ini berpengaruh kepada konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Belum kuatnya komitmen atau dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau *cost sharing* serta penguatan/pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian *outcome* kegiatan belum berjalan maksimal;
- d. Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level Pusat - Provinsi, Provinsi - Kabupaten, lintas sektor maupun lintas program / bidang, hal ini menyebabkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi kurang maksimal baik efektifitas dan juga pemanfaatannya;

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perbandingan dengan Realisasi Nasional Tahun 2023

PROVINSI / NASIONAL	Indeks Desa Membangun
Provinsi	0,721
Nasional	0,721

16. Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Kinerja sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 1,39 atau sebesar 122,34% dari target 1,79. (*Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah*).

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah sebagai berikut:

- a. Capaian 1,39, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 122,34% tercapai.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 1,52%, terhadap target tahun lalu sebesar 2,08% terdapat kenaikan sebesar 0,13%
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tercapai 120,86%.

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Penduduk dengan sasaran kinerja Meningkatnya Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, dengan indikator yaitu Persentase Pembinaan Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten/Kota. Capaian indikator kinerja adalah 57,14% dari target sebesar 57,14%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih rendah dari tahun 2022 yaitu sebesar 100%, rendahnya capaian tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, disebabkan adanya perbedaan perhitungan indikator pada tahun 2022.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan dan komitmen mitra kerja program Bangga kencana dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi program Bangga kencana;
- b. Tersedianya system informasi dalam penyediaan data dan informasi program bangga kencana.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Penyediaan data dan informasi program bangga kencana belum real time;
- b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pengelola data dan informasi dalam pengolahan dan penyediaan data/informasi program bangga kencana.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Monitoring dan evaluasi data dan informasi program bangga kencana secara periodik dan berkesinambungan;
- b. Mendorong upaya pembinaan, pendidikan dan pelatihan pengelola data dan informasi program bangga kencana.

- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan sasaran kinerja Meningkatnya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator Persentase Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten/Kota. Capaian indikator kinerja adalah 100%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah provinsi serta mitra kerja terkait dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. Tersedianya pengelola dan tenaga lini lapangan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pelaksanaan program KB dan Kesehatan reproduksi yang membantu pembinaan program di lapangan;
- c. Terjalannya kemitraan dan jejaring kerja yang baik dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih rendahnya peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dan kab/kota dalam pembinaan program KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Masih rendahnya pemahaman mitra kerja dalam program KB dan Kesehatan reproduksi.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meningkatkan peran serta organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

- b. Meningkatkan pemahaman mitra kerja melalui advokasi dan KIE program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan sasaran kinerja Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kampung KB dengan indikator Persentase Pembinaan Kampung KB. Capaian indikator kinerja adalah 50,84% dari target sebesar 50%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 85% karena ada perubahan indikator program antara tahun 2022 dan 2023.
- Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :
- Adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - Tersedianya pengelola dan tenaga lini lapangan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
 - Meningkatnya kelembagaan kampung keluarga berkualitas di tingkat kabupaten/kota.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Masih rendahnya pemahaman mitra kerja dalam program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- Kurangnya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan kampung keluarga berkualitas;
- Masih rendahnya peran serta kelompok kerja bangga kencana dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Meningkatkan peran serta dan sinergi lintas sektor melalui penguatan pokja bangga kencana;
- Meningkatkan pemahaman mitra kerja dalam program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

- 4) Program Pendaftaran Penduduk dengan sasaran kinerja Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk (KK, KTP, KIA). Capaian indikator kinerja adalah 101,09% dari target sebesar 88,07%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 101,3%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- Sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak baik secara klasikal, baliho, flyer, maupun media sosial;
- Pelaksanaan pelayanan jemput bola dilaksanakan lebih masif dari tahun sebelumnya;
- Pelayanan secara *online* pada Dinas Dukcapil kabupaten/kota masih tetap dilakukan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- Pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah, masih sulit menjangkau anak-anak yang akan direkam;
- Masih ada keterbatasan alat rekam dan cetak serta bahan pendukungnya pada Dinas Dukcapil kabupaten/kota.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- Perlu kerja sama dari pihak kepala sekolah dan guru-guru, untuk lebih tegas dalam menggiring anak-anak;
- Provinsi dapat memberikan bantuan berupa pinjaman alat rekam mobile yang lebih banyak.

- 5) Program Pencatatan Sipil dengan sasaran kinerja Meningkatnya Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase Masyarakat yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan). Capaian indikator kinerja adalah 116,09% dari target sebesar 86,00%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 114,82%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak baik secara klasikal, baliho, flyer, maupun media sosial;
- b. Pelaksanaan pelayanan jemput bola dilaksanakan lebih masif dari tahun sebelumnya;
- c. Pelayanan secara *online* pada Dinas Dukcapil kabupaten/kota masih tetap dilakukan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kematian masih rendah;
- b. Masih ada masyarakat yang sudah memiliki buku nikah belum melaporkan atau memutakhirkan status perkawinannya ke Dinas Dukcapil.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Kegiatan sosialisasi harus tetap dilakukan, sehingga perlu anggaran yang cukup agar sosialisasi ini akan lebih masif dan dengan beragam media.

- 6) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sasaran kinerja Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh PD dan Sektor Lain dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dan Sektor Lain yang Mengadakan Pejanjian Kerjasama. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 31,43%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini sama jika dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Data kependudukan yang cukup penting bagi perangkat daerah sudah tersedia dalam SIAK terpusat;
- b. Prosedur pemanfaatan data kependudukan sudah sangat jelas untuk dilaksanakan;
- c. Jaringan komunikasi dan data sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini dari Dinas Kominfo.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Beberapa perangkat daerah masih enggan dalam pemanfaatan data melalui hak akses;
- b. Ada regulasi yang mewajibkan perangkat daerah pengguna data kependudukan melalui hak akses harus memiliki standar nasional indonesia atau ISO 270001;
- c. Perangkat daerah pengguna harus menyediakan anggaran sendiri jika akan menerapkan SNI atau ISO 270001.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perangkat Daerah diharapkan memiliki kesadaran dan kemauan untuk dapat memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses;
- b. Kewajiban memiliki SNI atau ISO 270001 diharapkan hanya diterapkan kepada Dinas Kominfo yang memiliki jaringan komunikasi saja, tidak kepada PD pengguna;
- c. Mendorong agar PD pengguna data kependudukan dapat menanggarkan anggaran yang cukup untuk menerapkan SNI dan ISO 270001.

- 7) Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan sasaran kinerja Meningkatnya Penyajian Data Kependudukan Tingkat Provinsi dengan indikator Persentase Penyediaan Penyajian Data Kependudukan Tingkat Provinsi. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini sama dibandingkan pada tahun 2022 yaitu

sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Data kependudukan sudah tersedia dalam SIAK;
- b. Ada regulasi atau aturan terkait pedoman dan tata cara pembuatan profil kependudukan dan buku agregat;
- c. Tersediannya anggaran yang cukup untuk pembuatan buku profil dan buku agregat.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Data Konsolidasi Bersih per semester yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri masih memerlukan waktu cukup lama;
- b. Proses penyusunan profil kependudukan dan buku agregat masih secara manual.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Meminta kepada Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat merilis Data Konsolidasi Bersih lebih cepat;
- b. Mendorong agar Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membuat aplikasi penyusunan profil kependudukan dan agregat.

Perbandingan dengan Realisasi Nasional Tahun 2023

PROVINSI / NASIONAL	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Provinsi	1,39%
Nasional	1,39%

17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Kinerja sasaran menurunkan tingkat kemiskinan diukur dengan indikator persentase angka kemiskinan. Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 4,30 atau sebesar 100,00 % dari target 4,30. (*Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah*).

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran "Menurunkan Tingkat Kemiskinan" adalah sebagai berikut:

- a. Capaian 4,30 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,00 %.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 4,40 %, terhadap target tahun lalu sebesar 4,40 % adalah naik sebesar 0,10 dari tahun 2022.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Persentase Angka Kemiskinan tercapai 93,26 %.

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- l) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan sasaran kinerja Meningkatnya PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Indikator Kinerja Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 99,83 % dari target 205.753 atau sebesar 28,11 %.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersediannya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi;
- b. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf;
- c. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;

- e. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- f. Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 27 Oktober 2023 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
- b. Proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan hubungan erat antara kemampuan pembiayaan perangkat daerah dan penerimaan/pendapatan pemerintah daerah, hal ini berpengaruh kepada konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Belum kuatnya komitmen atau dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau *cost sharing* serta penguatan/pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian *outcome* kegiatan belum berjalan maksimal;
- d. Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level Pusat - Provinsi, Provinsi - Kabupaten, lintas sektor maupun lintas program / bidang, hal ini menyebabkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi kurang maksimal baik efektifitas dan juga pemanfaatannya;
- e. Untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem terjadi pengurangan pada SK yang ditetapkan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/539/KEP/DSPPPA/ 2023 dan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-597 setelah penganggaran, sehingga terjadi pengurangan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perbandingan dengan Realisasi Nasional Tahun 2023

PROVINSI / NASIONAL	Persentase Angka Kemiskinan
Provinsi	4,30
Nasional	9,36

18. Meningkatkan Kesempatan Kerja

Kinerja sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja diukur dengan indikator Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja/Jumlah Penduduk Angkatan Kerja x 100. Realisasi kinerja indikator sasaran ini adalah 4,56 dari target 4,47 atau persentase capaian kinerja sebesar 102%. (*Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah*).

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Capaian 4,56, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 102%;
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 4,77, terdapat kenaikan sebesar 0,21.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja 4,19% tercapai 91,89%.

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- 1) Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran Strategi Meningkatnya Pencari Kerja yang dilatih dan/ atau ditempatkan dengan indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja yang dilatih dan/ atau ditempatkan. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 56,95%. *(IKU perubahan Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang pertama tahun anggaran 2023)*

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Peningkatan Kompetensi SDM Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri
- b. Peningkatan Informasi Pasar Kerja
- c. Pemasaran Tenaga Kerja

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kurangnya Investasi
- b. Kurangnya SDM Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri
- c. Kurangnya Kompetensi Pencari Kerja

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja.
- b. Pemasaran Tenaga Kerja (Job Canvassing).
- c. Peningkatan Investasi.

- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Faktor pendukung tercapainya target indikator ini adalah :

- a. Pengetahuan.

Dari pengetahuan seseorang akan memperoleh keterampilan seperti daya pikir dan daya juang, untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan;

- b. Keterampilan.

Perusahaan lebih menyukai orang-orang yang memiliki keterampilan daripada yang sama sekali tidak punya. Sebab, akan membuat aktivitas kerja menjadi lebih lancar;

- c. Kemampuan.

Jika tenaga kerja memiliki kemampuan yang baik, akan mudah untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan;

- d. Sikap.

Sikap baik dapat ditunjukkan dengan masuk kantor tepat waktu, disiplin, dan tidak pernah telat. Tentu saja ini menjadi ciri tenaga kerja yang baik;

- e. Perilaku.

Jika perilaku baik, akan berdampak positif terhadap produktivitas kerja sehingga juga akan berdampak baik pada peningkatan penjualan produk.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Sarana dan Prasarana yang belum memadai dalam penunjang program kegiatan;
- b. Kurangnya Inovasi dalam pembuatan Program Pelatihan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Sejauh ini upaya yang dilakukan masih sebatas pemberian program pelatihan kejuruan secara umum;
- b. Sedangkan dari segi faktor penghambat seperti sarana dan prasarana, upaya yang dilakukan masih sebatas evaluasi program setiap tahunnya dan pengajuan tambahan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- 3) Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sasaran Strategi Meningkatnya Perusahaan yang Memahami dan /atau Mematuhi Peraturan Ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Perusahaan yang Memahami dan/atau Mematuhi Peraturan Ketenagakerjaan. Capaian indikator kinerja adalah 4,9% dari target sebesar 26%. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 7,64%. *(IKU perubahan Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang kedua tahun anggaran 2023)*

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya dukungan dari Kepala Dinas dan Kepala Bidang.
- b. Adanya dukungan dari Kepala Seksi terkait Kegiatan.
- c. Adanya tim yang solid.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kurangnya Anggaran.
- b. Kurangnya Jumlah SDM.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- a. Penambahan Anggaran.
- b. Penambahan jumlah dan peningkatan SDM.

- 4) Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Anggaran untuk Program Pengawasan Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2023;
- b. Sumber Daya Manusia di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Anggaran yang belum memadai dan rasionalisasi anggaran;
- b. Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi;
- c. Sarana dan Prasana yang belum begitu memadai.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai yaitu :

- a. Peningkatan kompetensi SDM bidang Pengawasan yang harus mencukupi;
- b. Anggaran yang memadai dan mencukupi.

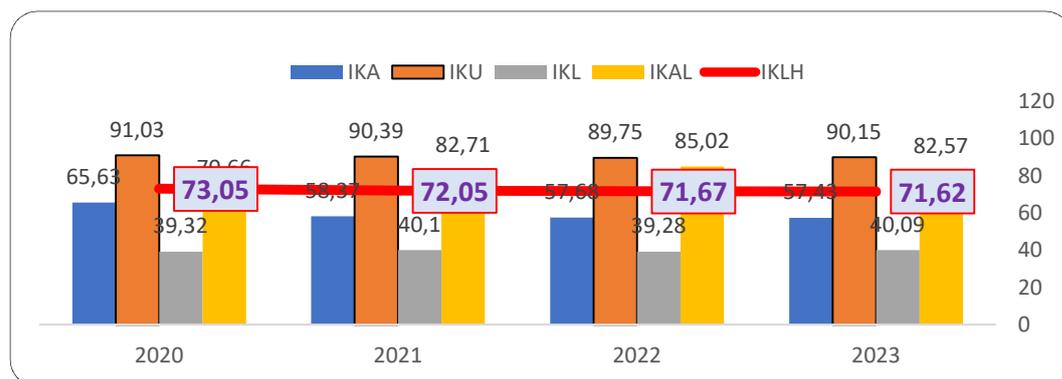
Perbandingan dengan Realisasi Nasional Tahun 2023

PROVINSI / NASIONAL	Tingkat pengangguran terbuka
Provinsi	4,56
Nasional	5,3

19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

Kinerja sasaran Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 71,64 atau sebesar 94,98% dari target 75,43. Nilai IKLH merupakan agregasi dari perhitungan data pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Gambar. 2.3.2
Trend IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020-2023



Tabel 2.3.3
Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Kategori	Angka Rentang
(1)	(2)	(3)
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x \leq 90$
3	Sedang	$50 \leq x \leq 70$
4	Kurang	$25 \leq x \leq 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x \leq 25$

Sumber : Permen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebagai berikut:

- Capaian 71,64, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 94,98%
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 71,67, terdapat penurunan sebesar 0,03
- Dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 77,5 indikator kinerja Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) tercapai 71,64 atau sebesar 92,44%.

Nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dicapai adalah 71,64. Jika dilihat perkomponen IKLH, Indeks Kualitas Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan sebesar 0,81 poin ini berkorelasi dengan berbagai kegiatan pemulihan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilakukan pada tahun 2022-2023. Indeks Kualitas Udara mengalami kenaikan sebesar 0,4 poin naik dari tahun 2022, Untuk Indeks Kualitas Air mengalami penurunan 0,25 poin dari tahun 2022 sedangkan Indeks Kualitas Kualitas Air Laut mengalami penurunan sebesar 2,54 poin dari tahun 2022. Secara umum indeks kualitas lahan masih

dalam kategori kurang, indeks kualitas udara berada dalam kategori sangat baik, Indeks kualitas air dalam kategori sedang dan indeks kualitas air laut masih dalam kategori baik.

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan sasaran kinerja Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Dokumen Pendukung Inventarisasi Lingkungan Hidup sebanyak 2 dokumen;
- b. Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terdiri dari KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2044 serta KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 sebanyak 2 dokumen;
- c. Terlaksananya validasi KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota;

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Secara umum tidak terdapat kendala yang signifikan, mengacu pada Permen ATR Nomor 5 Tahun 2022 tentang Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang mengamanatkan penyusunan Materi Teknis dan KLHS disusun secara bersamaan, namun materi teknis dari pemakarsa (tim pokja tata ruang) mengalami berbagai perubahan (iteratif) seiring dengan tahapan proses penyusunan materi teknis RTRW, sehingga proses penyusunan KLHS harus menyesuaikan target dan tahapan penyusunan dari tim penyusun RTRW.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Agar materi teknis dapat matang dipersiapkan oleh pemrakarsa sebelum disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan untuk pembahasan.

- 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan sasaran kinerja Peningkatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Pengujian Sampel Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani (Laboratorium Lingkungan). Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(2.460 \text{ sampel}) / (2.000 \text{ sampel}) \times 100\% = 123\%$ dari target 100% atau sebesar 123%.
- b. Persentase Dokumen Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 4 rekomendasi yang tersusun dari target 4 rekomendasi atau sebesar 100%.
- c. Persentase Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(61 \text{ sampling}) / (109 \text{ sampling}) \times 100\% = 56\%$ dari target 62% atau sebesar 90,32%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Tersedianya alat dan SDM serta pembiayaan yang diperlukan,
- b. Terinputnya data hasil inventarisasi emisi gas rumah kaca kewenangan provinsi di sektor Energi, IPPU, AFOLU dan limbah yang diolah dalam aplikasi signsmart KLHK sebagai bahan rekomendasi pengendalian emisi gas rumah kaca sektor Energi, IPPU, AFOLU dan limbah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Sarana dan Prasana Laboratorium yang memadai, Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Kompeten, dan Peningkatan kinerja pelayanan kepada pelanggan/stakeholders

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Data aktivitas sektor Energi, IPPU, AFOLU dan limbah yang terkumpul dalam kegiatan inventarisasi emisi gas rumah kaca kewenangan provinsi masih terbatas.
- b. Pengurangan anggaran yang menyebabkan pelaksanaan pemantauan tidak sesuai dengan rencana teknis yang telah direncanakan .

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan pengumpulan data aktivitas sektor Energi, IPPU, AFOLU dan limbah ke lembaga penyedia data sesuai sektornya lebih lengkap dan detil baik dari pusat, daerah ataupun dunia usaha.
- b. Pelaksanaan pemantauan menyesuaikan dengan rencana teknis yang telah direncanakan.

- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dengan sasaran kinerja Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(2 \text{ dokumen}) / (2 \text{ dokumen}) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan dan kepedulian orang/lembaga dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Lingkup kajian inventarisasi keanekaragaman hayati yang cukup luas,
- b. Belum terkoordinasikan dengan baik lembaga – lembaga pengelola keanekaragaman hayati yang ada.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Pelibatan dan koordinasi seluruh stakeholder dalam mendukung dan komitmen bersama dalam upaya pengelolaan keanekaragaman hayati.

- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan sasaran kinerja Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Persentase Pengendalian Bahan Bahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3). Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(14.350 \text{ kg} / 16.204 \text{ kg}) \times 100\% = 88,56\%$ dari target 100% atau sebesar 88,565%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan Bahan Bahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan pengelolaan Bahan Bahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3).

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Menyebarluaskan informasi pengelolaan Bahan Bahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) dalam berbagai bentuk media pengantar (surat, sosialisasi, bmtk, *zoom meeting* dll).

- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan sasaran kinerja Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Persentase Ketaatan

Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(75 \text{ Usaha/Kegiatan} / 100 \text{ Usaha/Kegiatan}) \times 100\% = 75\%$ dari target 60% atau sebesar 125%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya SDM Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Adanya sistem pelaporan secara online melalui sistem SIMPEL (KLHK RI)
- c. Adanya peraturan perundangan bidang lingkungan hidup yang mengatur kewajiban pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup
- d. Adanya Dokumen pelaporan pelaksanaan Pemantauan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan oleh Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang disampaikan setiap 6 bulan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Kurangnya SDM PPLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rasio antara SDM PPLH dengan jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan tidak terpenu.
- b. Kurangnya kesediaan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Kurangnya dukungan anggaran, sarana dan prasarana dalam mendukung pengawasan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM PPLH serta penambahan jumlah PPLH dan Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan PPLH Kabupaten/Kota.
- b. Memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran dan memberikn reward bagi yang mentaati ketentuan.

- 6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHAa), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH dengan sasaran kinerja Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Persentase Penyusunan Rekomendasi Pengakuan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH. Capaian kinerja untuk indikator ini 100% dari target 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan DLH Kabupaten/Kota, Desa memfasilitasi ketersediaan lokasi dan SDM.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Perbedaan sasaran lokasi penyelenggaraan, SDM penyuluh yang terbatas.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Membuat pemetaan/identifikasi terhadap sasaran pembinaan dan pendampingan.

- 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan sasaran kinerja Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Persentase Kelompok Swadaya Masyarakat yang Aktif dan Mandiri. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 60%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan DLH Kabupaten/Kota, Desa memfasilitasi ketersediaan lokasi dan SDM.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Perbedaan sasaran lokasi penyelenggaraan, SDM penyuluh yang terbatas.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Membuat pemetaan/identifikasi terhadap sasaran pembinaan dan pendampingan.

- 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan sasaran kinerja Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan. Capaian kinerja untuk indikator

ini adalah 100% dari target 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

a. Dukungan DLH Kabupaten/Kota, Desa memfasilitasi ketersediaan lokasi dan SDM.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

a. Perbedaan sasaran lokasi penyelenggaraan, SDM penyuluh yang terbatas.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

a. Membuat pemetaan/identifikasi terhadap sasaran pembinaan dan pendampingan.

9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan sasaran kinerja Meningkatkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator kinerja Persentase Penanganan Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Terferifikasi. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

a. Pentingnya aduan sebagai upaya untuk pemberantasan tindak pidana/kegiatan illegal di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, serta jelasnya identitas dan uraian mengenai fakta serta dugaan tindak pidana.

10) Program Pengelolaan Hutan; dengan sasaran kinerja :

a. Sasaran Kinerja Meningkatkan Pengelolaan Hutan dengan indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Hutan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 42,42% dari target 35,69% atau sebesar 118%.

b. Sasaran kinerja Meningkatkan Perlindungan dan Pengamanan Hutan dengan indikator kinerja Persentase Luas Kerusakan Hutan. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 88,56% dari target 20%.

c. Sasaran Kinerja Meningkatkan Luas Rehabilitasi Lahan Kritis, dengan indikator kinerja Persentase Lahan Kritis yang direhabilitasi. Capaian kinerja untuk indikator ini 88,56% dari target 13,17%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

a. Minat investasi usaha bidang kehutanan dan pemberian akses lebih luas kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial, sebagai upaya turut mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

a. Kepatuhan terhadap peraturan dan upaya penegakan kegiatan illegal belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dengan dukungan pihak terkait.

b. Kecepatan penurunan tutupan hutan lebih tinggi dari upaya rehabilitasi akibat aktivitas illegal dari alih fungsi penggunaan kawasan hutan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

a. Penegak hukum secara sungguh-sungguh atas kegiatan illegal dan berupaya mengubah kepada aktivitas legal yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

b. Upaya lebih masiv dan menjadikan upaya rehabilitasi sebagai budaya baru untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

11) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan sasaran kinerja Meningkatkan Jumlah Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang dikonservasi dengan indikator kinerja Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan dan kepedulian Pemerintah Kabupaten / Lembaga dalam pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem untuk pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial.
- b. Dukungan dan kepedulian orang / Lembaga dalam perlindungan tumbuhan dan satwa liar.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Penetapan lokasi Kawasan Ekosistem Esensial dalam pengelolaan KSDAE membutuhkan sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kabupaten.
- b. Tahapan dari proses identifikasi, pengusulan dan penetapan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang sama.
- c. Ketidaktahuan Masyarakat terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten terkait rencana Kawasan ekosistem esensial.
- b. Meningkatkan sosialisasi kepada Masyarakat terkait perlindungan tumbuhan dan satwa liar.

- 12) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sasaran kinerja Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Persentase Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 34,78% dari target 30% atau sebesar 115%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan optimal kinerja sumberdaya yang tersedia.
- b. Mulai meningkatnya pemahaman masyarakat atas pentingnya akses legal dalam pengelolaan kawasan hutan.
- c. Dukungan stakeholder maupun pokja Percepatan Perhutanan Sosial di tingkat tapak maupun provinsi yg mulai membaik.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Perlunya upaya peningkatan sinergi antar stakeholder.
- b. Perlunya upaya peningkatan pembinaan pasca izin oleh semua stakeholder yang terkait.

- 13) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan sasaan kinerja Meningkatkan Luas Das yang dipertahankan dan ditingkatkan Daya Dukungnya dengan indikator kinerja Persentase Luas DAS yang dikelola. Capaian kinerja untuk indikator ini 1,50% dari target 1,64% atau sebesar 91%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi dan pembinaan kepada pelaksana kewajiban pihak pemegang PZKH diwilayah Daerah Aliran Sungai.
- b. Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan peningkatan kesadaran Masyarakat melalui kelembagaan Forum DAS yang beranggotakan stakeholder ditingkat Provinsi maupun inisiasi pembentukan Forum DAS di Kabupaten / Kota.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Masih adanya kegiatan yang belum tertib dan sadar dalam Daerah Aliran Sungai.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Peningkatan kesadaran seluruh pihak dalam menjaga dan mengelola Daerah Aliran Sungai dan Peningkatan keterlibatan berbagai pihak / stakeholder dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
 - a) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c) UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 - g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023;
 - h) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 tentang Pelimpahan dalam Rangka Tugas Pembantuan terhadap lingkup urusan Pemerintah Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - i) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023;
 - j) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - k) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas Pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban pertanggungjawaban kepada yang menugaskannya.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan pemerintahan tersebut terpilah menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 100 Dokumen;
- b. Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) 5.105 Km;
- c. Terlaksananya Preservasi Rutin Jembatan 44.540 m;
- d. Meningkatnya Prasarana Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) 0.90 Km;
- e. Meningkatnya Prasarana Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) 1.070 m;
- f. Terlaksananya Layanan Umum 100 Layanan;
- g. Terlaksananya Layanan Perkantoran 100 Layanan;
- h. Meningkatnya Persentase Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara 80.00 Km;
- i. Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 100 Layanan;
- j. Terlaksananya Layanan Perkantoran 100 Layanan;
- k. Tersedianya Sarana Pemasaran Hortikultura 200 Unit;
- l. Tersedianya Sarana Pascapanen Hortikultura 100 Unit;
- m. Tersedianya Sarana Pengolahan Hortikultura 100 Unit;
- n. Tersedianya Prasarana Pascapanen Hortikultura 100 unit;
- o. Tersedianya Kawasan Sayuran Lain 5 Unit;
- p. Tersedianya Kawasan Bawang Merah 00.00 Unit;
- q. Tersedianya Kawasan Aneka Cabai 2.000 Unit;
- r. Tersedianya Kawasan Durian. 5.000 Unit;
- s. Terlaksananya Layanan Perencanaan Satker Daerah 100 Layanan;
- t. Terlaksananya Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah 100 Layanan;
- u. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 100 kegiatan;
- v. Terpenuhinya Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan 200 layanan;
- w. Terpenuhinya Sertifikat Produk Tanaman Pangan 200 produk;
- x. Tersedianya Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 300 Unit;
- y. Tersedianya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 100 Unit;
- z. Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi 100 Kegiatan;
- aa. Tersedianya Kawasan Padi 10.000 Hektar;
- bb. Tersedianya Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) 75.000 Hektar;
- cc. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 100 kegiatan;
- dd. Tersedianya Area penyaluran benih padi 190.000 Hektar;
- ee. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 100 Dokumen;
- ff. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 100 Dokumen;

- gg. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 100 Layanan;
- hh. Tersedianya Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 5.000 Hektar;
- ii. Tersedianya Kawasan Lada 35.000 Hektar;
- jj. Terlaksananya Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan 500 produk;
- kk. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan 200 Kegiatan;
- ll. Terlaksananya Promosi Produk Hasil Perkebunan 100 Promosi;
- mm. Terpenuhinya Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat 78.500 Produk;
- nn. Terlaksananya Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan 400 Rekomendasi Kebijakan;
- oo. Tersedianya Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 100 Hektar;
- pp. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 100 Dokumen;
- qq. Tersedianya Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor 100 Lembaga;
- rr. Terpenuhinya Hijauan Pakan Ternak 300 Unit;
- ss. Terlaksananya Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan 3000 Produk;
- tt. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan 1.365.500 layanan;
- uu. Terlaksananya Ternak Yang Didata dan Ditandai 264.300 Unit;
- vv. Terlaksananya Optimalisasi Reproduksi 120.000 Ekor;
- ww. Terlaksananya Ternak Ruminansia Potong 4000 Ekor;
- xx. Terlaksananya Sertifikasi Unit Usaha 600 Lembaga;
- yy. Terpenuhinya Keamanan dan Mutu Produk Hewan 25.00 Produk;
- zz. Terlaksananya Layanan BMN 100 Layanan;
- aaa. Terlaksananya Jaringan Layanan Data dan Informasi 100 Layanan;
- bbb. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 100 Dokumen;
- ccc. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 100 Dokumen;
- ddd. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 200 Dokumen;
- eee. Tersedianya Irigasi Perpipaan 400 Unit;
- fff. Tersedianya Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat 300 Unit;
- ggg. Tersedianya Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat 400 unit;
- hhh. Terpenuhinya Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian 0.10 Rekomendasi Kebijakan;
- iii. Tersedianya Lahan Pertanian Pangan Produktif 1.80 km²;
- jjj. Optimasi Lahan 0.01 km²;
- kkk. Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 100 Kegiatan;
- lll. Terlaksananya Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi 5.303.000 Orang;
- mmm. Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup Pembiayaan Pertanian 100 Kegiatan;
- nnn. Tersedianya Asuransi Pertanian 0.01 unit;
- ooo. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen;
- ppp. Terlaksananya Permasalahan Tanah Transmigrasi yang Difasilitasi Penyelesaiannya 100 Perkara;
- qqq. Terlaksananya Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 3600 Orang;

- rrr. Terlaksananya Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi 3000 Orang;
- sss. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan;
- ttt. Terpenuhinya SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan 100 Orang;
- uuu. Terlaksananya SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan 100 Orang;
- vvv. Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional 1.00 Kegiatan;
- www. Terlaksananya Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan) 1.00 Kegiatan;
- xxx. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota);

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi Pagu Anggaran sebesar **Rp. 30.674.031.000,00,-** dengan realisasi **Rp. 30.225.693.798,00,-** atau **98,54%**.

3.1.1. Target Kinerja

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Infrastruktur Konektivitas	1. Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 1,00 Dokumen; 2. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) 51.05 Km; 3. Preservasi Rutin Jembatan 445.40 m; 4. Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) 0.90 Km; 5. Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) 10.70 m.	8.904.683.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Umum 1.00 Layanan; 2. Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	888.394.000,00
3	Program Ketahanan Sumber Daya Air	1. Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara 80.00 Km.	3.117.790.000,00
4	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan; 2. Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	576.262.000,00

2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Pemasaran Hortikultura 2.00 Unit; 2. Sarana Pascapanen Hortikultura 1.00 Unit; 3. Sarana Pengolahan Hortikultura 1.00 Unit; 4. Sarana Pengolahan Hortikultura 1.00 Unit. 	520.000.000,00
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Sayuran Lain 5 Unit; 2. Kawasan Bawang Merah 00.00 Unit; 3. Kawasan Aneka Cabai 20.00 Unit; 4. Kawasan Durian. 50.00 Unit. 	620.500.000,00
3	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Perencanaan Satker Daerah 1.00 Layanan; 2. Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah 1.00 Layanan. 	80.000.000,00
4	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 1.00 kegiatan; 2. Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan 2.00 layanan; 3. Sertifikat Produk Tanaman Pangan 2.00 produk; 4. Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 3.00 Unit; 5. Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 1.00 Unit. 	728.902.000,00
5	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi 1.00 Kegiatan 2. Kawasan Padi 100.00 Hektar; 3. Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) 750.00 Hektar; 	2.171.875.000,00

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 1.00 kegiatan; 5. Area penyaluran benih padi 1900.00 Hektar. 	
6	Program Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen; 3. Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan. 	564.865.000,00
7	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 50.00 Hektar; 2. Kawasan Lada 350.00 Hektar; 3. Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan 5.00 produk; 4. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan 2.00 Kegiatan; 5. Promosi Produk Hasil Perkebunan 1.00 Promosi 6. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat 785.00 Produk; 7. Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan 4.00 Rekomendasi Kebijakan; 8. Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 1.00 Hektar. 	2.713.254.000,00
8	Program Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen. 	188.940.000,00
9	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor 1.00 Lembaga. 	25.000.000,00

10	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hijauan Pakan Ternak 3.00 Unit; 2. Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan 30.00 Produk; 3. Pelayanan Kesehatan Hewan 13655.00 layanan; 4. Ternak Yang Didata dan Ditandai 2643.00 Unit; 5. Optimalisasi Reproduksi 1200.00 Ekor; 6. Ternak Ruminansia Potong 40.00 Ekor; 7. Sertifikasi Unit Usaha 6.00 Lembaga; 8. Keamanan dan Mutu Produk Hewan 25.00 Produk. 	3.706.283.000,00
11	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan BMN 1.00 Layanan; 2. Jaringan Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan; 3. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen; 5. Layanan Manajemen Keuangan 2.00 Dokumen. 	240.673.000,00
12	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irigasi Perpipaan 4.00 Unit; 2. Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Barat 3.00 Unit; 3. Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Barat 4.00 unit; 4. Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian 0.10 Rekomendasi Kebijakan; 5. Lahan Pertanian Pangan Produktif 1.80 km²; 6. Optimasi Lahan 0.01 km²; 7. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 1.00 Kegiatan; 	3.530.944.000,00

		8. Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi 53030.00 Orang; 9. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup Pembiayaan Pertanian 1.00 Kegiatan; 10. Asuransi Pertanian 0.01 unit	
13	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	513.750.000,00

3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1. Permasalahan Tanah Transmigrasi yang Difasilitasi Penyelesaiannya 1.00 Perkara; 2. Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 36.00 Orang; 3. Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi 30.00 Orang.	434.556.000,00
2	Program Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perkantoran 1.00 Layanan	62.360.000,00

4) Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan 1.00 Orang; 2. SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja	975.000.000,00

		<p>melalui Tugas Pembantuan 1.00 Orang;</p> <p>3. Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional 1.00 Kegiatan;</p> <p>4. Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan) 1.00 Kegiatan.</p>	
2	Program Dukungan Manajemen	1. Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota).	110.000.000,00

3.1.2. Realisasi

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	Program Infrastruktur Konektivitas	<p>1. Meningkatnya Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 1.00 Dokumen;</p> <p>2. Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) 51.05 Km;</p> <p>3. Terlaksananya Preservasi Rutin Jembatan 445.40 m;</p> <p>4. Meningkatnya Prasarana Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) 0.90 Km;</p> <p>5. Meningkatnya Prasarana Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) 10.70 m.</p>	8.902.497.890,00
2	Program Dukungan Manajemen	<p>1. Terlaksananya Layanan Umum 1.00 Layanan;</p> <p>2. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.</p>	800.709.512,20
3	Program Ketahanan Sumber Daya Air	1. Meningkatnya Persentase Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara 80.00 Km.	3.087.504.856,80
4	Program Dukungan Manajemen	<p>1. Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan;</p> <p>2. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.</p>	572.906.000,00

2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sarana Pemasaran Hortikultura 2.00 Unit; 2. Tersedianya Sarana Pascapanen Hortikultura 1.00 Unit; 3. Tersedianya Sarana Pengolahan Hortikultura 1.00 Unit; 4. Tersedianya Prasarana Pascapanen Hortikultura 1.00 unit. 	518.928.557,69
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Kawasan Sayuran Lain 5 Unit; 2. Tersedianya Kawasan Bawang Merah 00.00 Unit; 3. Tersedianya Kawasan Aneka Cabai 20.00 Unit; 4. Tersedianya Kawasan Durian. 50.00 Unit. 	613.590.000,00
3	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Layanan Perencanaan Satker Daerah 1.00 Layanan; 2. Terlaksananya Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah 1.00 Layanan. 	80.000.000,00
4	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 1.00 kegiatan; 2. Terpenuhinya Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan 2.00 layanan; 3. Terpenuhinya Sertifikat Produk Tanaman Pangan 2.00 produk; 4. Tersedianya Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 3.00 Unit; 5. Tersedianya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 1.00 Unit. 	712.269.172,00
5	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi 1.00 Kegiatan; 2. Tersedianya Kawasan Padi 100.00 Hektar; 	2.161.776.720,00

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) 750.00 Hektar; 4. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 1.00 kegiatan; 5. Tersedianya Area penyaluran benih padi 1900.00 Hektar. 	
6	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 2. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen; 3. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan. 	563.667.468,00
7	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 50.00 Hektar; 2. Tersedianya Kawasan Lada 350.00 Hektar; 3. Terlaksananya Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan 5.00 produk; 4. Terlaksananya Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan 2.00 Kegiatan; 5. Terlaksananya Promosi Produk Hasil Perkebunan 1.00 Promosi; 6. Terpenuhinya Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat 785.00 Produk; 7. Terlaksananya Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan 4.00 Rekomendasi Kebijakan; 8. Tersedianya Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 1.00 Hektar. 	2.577.408.291,31
8	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen. 	185.927.900,00
9	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor 1.00 Lembaga. 	25.000.000,00

10	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhi Hijauan Pakan Ternak 3.00 Unit; 2. Terlaksananya Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan 30.00 Produk; 3. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan 13655.00 layanan; 4. Terlaksananya Ternak Yang Didata dan Ditandai 2643.00 Unit; 5. Terlaksananya Optimalisasi Reproduksi 1200.00 Ekor; 6. Terlaksananya Ternak Ruminansia Potong 40.00 Ekor; 7. Terlaksananya Sertifikasi Unit Usaha 6.00 Lembaga; 8. Terpenuhi Keamanan dan Mutu Produk Hewan 25.00 Produk. 	3.624.075.000,00
11	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Layanan BMN 1.00 Layanan; 2. Terlaksananya Jaringan Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan; 3. Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.00 Dokumen; 4. Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen; 5. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 2.00 Dokumen. 	239.690.000,00
12	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Irigasi Perpipaan 4.00 Unit; 2. Tersedianya Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat 3.00 Unit; 3. Tersedianya Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat 4.00 unit; 4. Terpenuhi Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian 0.10 Rekomendasi Kebijakan; 5. Tersedianya Lahan Pertanian Pangan Produktif 1.80 km²; 6. Optimasi Lahan 0.01 km²; 	3.529.318.606,00

		<p>7. Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 1.00 Kegiatan;</p> <p>8. Terlaksananya Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi 53030.00 Orang;</p> <p>9. Terlaksananya Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup Pembiayaan Pertanian 1.00 Kegiatan;</p> <p>10. Tersedianya Asuransi Pertanian 0.01 unit.</p>	
13	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen	513.544.306,00

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	<p>1. Terlaksananya Permasalahan Tanah Transmigrasi yang Difasilitasi Penyelesaiannya 1.00 Perkara;</p> <p>2. Terlaksananya Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi 36.00 Orang;</p> <p>3. Terlaksananya Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi 30.00 Orang.</p>	430.921.000,00
2	Program Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan	61.308.500,00

4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Terpenuhinya SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan 1.00 Orang;	920.723.708,00

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Terlaksananya SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan 1.00 Orang; 3. Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional 1.00 Kegiatan; 4. Terlaksananya Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan) 1.00 Kegiatan. 	
2	Program Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota) 	103.926.310,00

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Infrastruktur Konektivitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8.904.683.000,00	8.902.497.890,00	99,98	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100	APBN TA. 2023
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8.904.683.000,00	8.902.497.890,00	99,98	Peningkatan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Dukungan Teknis								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	150.000.000,00	149.790.000,00	99,86	1,00 Dokumen	100	APBN TA. 2023
			2. Output : DM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)								
			1. Rincian Kegiatan : Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.557.564.000,00	3.555.785.218,00	99,95	51,05 Km	100	APBN TA. 2023
			3. Output : DM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)								

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			I. Rincian Kegiatan : Preservasi Rutin Jembatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	490.820.000,00	490.623.672,00	99,96	445.40 m	100	APBN TA. 2023
			4. Output : DM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)								
			I. Rincian Kegiatan : Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.221.986.000,00	4.221.986.000,00	100,00	0.90 Km	100	APBN TA. 2023
			5. Output : DM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)								
			I. Rincian Kegiatan : Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	484.313.000,00	484.313.000,00	100,00	10.70 m	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	888.394.000,00	800.709.512,20	90,13	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100	APBN TA. 2023
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	888.394.000,00	800.709.512,20	90,13	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Umum	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	464.138.000,00	418.327.579,40	90,13	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	424.256.000,00	382.381.932,80	90,13	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2023
3.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketahanan Sumber Daya Air	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.117.790.000,00	3.087.504.856,80	99,03	Terwujudnya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana pada Prgram Ketahanan Sumber Daya Air	100	APBN TA. 2023
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.117.790.000,00	3.087.504.856,80	99,03	Meningkatnya Persentase Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : DM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air								
			1. Rincian Kegiatan : Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.117.790.000,00	3.087.504.856,80	99,03	80.00 Km	100	APBN TA. 2023
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	576.262.000,00	572.906.000,00	99,42	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	576.262.000,00	572.906.000,00	99,42	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	460.582.000,00	457.226.000,00	99,27	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2023
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	115.680.000,00	115.680.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	520.000.000,00	518.928.557,69	99,79	Terwujudnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang baik	100	APBN TA. 2023
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	520.000.000,00	518.928.557,69	99,79	Meningkatnya akses pasar hortikultura, jaminan mutu produk hortikultura nasional, dan nilai tambah produk hortikultura	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Sarana Pemasaran Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70.000.000,00	69.990.000,00	99,99	2.00 Unit	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Sarana Pascapanen Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	110.000.000,00	109.484.980,77	99,53	1.00 Unit	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Rincian Kegiatan : Sarana Pengolahan Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000,00	99.986.346,15	99,99	1.00 Unit	100	APBN TA. 2023
			3. Output : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Prasarana Pascapanen Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	240.000.000,00	239.467.230,77	99,78	1.00 unit	100	APBN TA. 2023
6	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	620.500.000,00	613.590.000,00	98,89	Terwujudnya Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat serta Produksi Buah dan Florikultura	100	APBN TA. 2023
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	295.500.000,00	290.790.000,00	98,41	Meningkatnya Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Sayuran Lain	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	55.000.000,00	54.216.412,86	98,58	5 Unit	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Bawang Merah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	500.000,00	492.876,48	98,58	0.00 Unit	100	APBN TA. 2023
			2. Rincian Kegiatan : Kawasan Aneka Cabai	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	240.000.000,00	236.080.710,66	98,37	20.00 Unit	100	APBN TA. 2023
			2. Kegiatan : Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	325.000.000,00	322.800.000,00	99,32	Meningkatnya Produksi Buah dan Florikultura	100	APBN TA. 2023
			1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Durian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	325.000.000,00	322.800.000,00	99,32	50.00 Unit	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	Terpenuhinya Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	100	APBN TA. 2023
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	Terlaksananya dan Meningkatnya Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Perencanaan dan Penganggaran								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan Satker Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19.100.000,00	19.100.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2023
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60.900.000,00	60.900.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	728.902.000,00	712.269.172,00	97,72	Terwujudnya peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2023
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	728.902.000,00	712.269.172,00	97,72	Meningkatnya kualitas komoditas tanaman pangan untuk mendukung ekspor	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	239.080.000,00	233.780.429,53	97,78	1.00 kegiatan	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Data dan Informasi Publik								
			1. Rincian Kegiatan : Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30.000.000,00	29.397.745,05	97,99	2.00 layanan	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Output : Sertifikasi Produk								
			1. Rincian Kegiatan : Sertifikat Produk Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	121.000.000,00	118.070.905,02	97,58	2.00 produk	100	APBN TA. 2023
			4. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	208.822.000,00	204.129.863,87	97,75	3.00 Unit	100	APBN TA. 2023
			2. Rincian Kegiatan : Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	130.000.000,00	126.890.228,54	97,61	1.00 Unit	100	APBN TA. 2023
9	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.171.875.000,00	2.161.776.720,00	99,54	Terwujudnya Pengelolaan Produksi Tanaman Serealisa Tanaman Pangan serta Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.502.625.000,00	1.493.227.495,00	99,37	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	133.500.000,00	132.298.349,94	99,10	1.00 Kegiatan	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Padi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	174.000.000,00	172.585.489,81	99,19	100.00 Hektar	100	APBN TA. 2023
			2. Rincian Kegiatan : Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.195.125.000,00	1.188.343.655,24	99,43	750.00 Hektar	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	669.250.000,00	668.549.225,00	99,90	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dengan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih	100	APBN TA. 2023
			1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000,00	99.970.000,00	99,97	1.00 kegiatan	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Area penyaluran benih padi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	569.250.000,00	568.579.225,00	99,88	1900,00 Hektar	100	APBN TA. 2023
10	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	564.865.000,00	563.667.468,00	99,79	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	564.865.000,00	563.667.468,00	99,79	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30.409.000,00	30.398.366,04	99,97	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2023
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	217.056.000,00	216.480.096,01	99,73	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2023
			3. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	317.400.000,00	316.789.005,95	99,81	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.713.254.000,00	2.577.408.291,31	94,99	Terwujudnya Penguatan Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah, dan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan serta Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	99	APBN TA. 2023
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Penguatan Perlindungan Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	107.480.000,00	105.059.120,00	97,75	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan serta layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BPTP Pontianak	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	107.480.000,00	105.059.120,00	97,75	50.00 Hektar	100	APBN TA. 2023
			2. Kegiatan : Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.420.395.000,00	1.389.222.308,00	97,81	Terlaksananya Kegiatan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah (Produksi Kayu Manis)	100	APBN TA. 2023
			1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Kawasan Lada	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.420.395.000,00	1.389.222.308,00	97,81	350.00 Hektar	100	APBN TA. 2023
			3. Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	915.210.000,00	846.672.446,31	92,51	Terlaksananya Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan serta meningkatnya Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	98	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Output : Standarisasi Produk								
			1. Rincian Kegiatan : Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76.420.000,00	70.722.335,02	92,54	5.00 produk	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	178.200.000,00	164.611.884,51	92,37	2.00 Kegiatan	95	APBN TA. 2023
			3. Output : Promosi								
			1. Rincian Kegiatan : Promosi Produk Hasil Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	209.700.000,00	194.065.344,85	92,54	1.00 Promosi	95	APBN TA. 2023
			4. Output : Standarisasi Produk								
			1. Rincian Kegiatan : Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	450.890.000,00	417.272.881,93	92,54	785.00 Produk	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			4. Kegiatan : Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	270.169.000,00	236.454.417,00	87,52	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunann serta layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBP2TP Ambon	100	APBN TA. 2023
			1. Output : Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan								
			1. Rincian Kegiatan : Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	186.190.000,00	162.955.216,55	87,52	4.00 Rekomendasi Kebijakan	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	83.979.000,00	73.499.200,45	87,52	1.00 Hektar	100	APBN TA. 2023
12	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	188.940.000,00	185.927.900,00	98,41	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	188.940.000,00	185.927.900,00	98,41	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan serta Kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	188.940.000,00	185.927.900,00	98,41	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2023
13	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Terwujudnya Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Fasilitas dan Pembinaan Lembaga								
			1. Rincian Kegiatan : Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	1.00 Lembaga	100	APBN TA. 2023
14	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.706.283.000,00	3.624.075.000,00	97,78	Terwujudnya Peningkatan Produksi Pakan Ternak, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak, serta Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	98	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	460.000.000,00	458.566.000,00	99,69	Meningkatnya penggunaan hijauan pakan berkualitas (dalam BK)	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Bantuan Peralatan / Sarana								
			1. Rincian Kegiatan : Hijauan Pakan Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	400.000.000,00	398.753.043,48	99,69	3.00 Unit	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Penyidikan dan Pengujian Produk								
			1. Rincian Kegiatan : Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60.000.000,00	59.812.956,52	99,69	30.00 Produk	100	APBN TA. 2023
			2. Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.215.875.000,00	1.145.508.000,00	94,21	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan serta peningkatan kemanfaatan sarana kesehatan hewan	95	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Output : Pelayanan Publik Lainnya								
			1. Rincian Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Hewan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.215.875.000,00	1.145.508.000,00	94,21	13655.00 layanan	95	APBN TA. 2023
			3. Kegiatan : Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.702.708.000,00	1.696.213.000,00	99,62	Peningkatan Produksi Ternak serta Peningkatan kemanfaatan sarana perbibitan dan produksi ternak	100	APBN TA. 2023
			1. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Ternak Yang Didata dan Ditandai	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	242.560.000,00	241.634.751,98	99,62	2643.00 Unit	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Bantuan Hewan								
			1. Rincian Kegiatan : Optimalisasi Reproduksi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	820.148.000,00	817.019.535,66	99,62	1200.00 Ekor	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Rincian Kegiatan : Ternak Ruminansia Potong	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	640.000.000,00	637.558.712,36	99,62	40.00 Ekar	100	APBN TA. 2023
			4. Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	327.700.000,00	323.788.000,00	98,81	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Rasio produk telur yang berstatus sehat, aman, dan bermutu terhadap total produksi telur yang dihasilkan	100	APBN TA. 2023
			1. Output : Sertifikasi Lembaga								
			1. Rincian Kegiatan : Sertifikasi Unit Usaha	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	266.200.000,00	263.022.171,50	98,81	6.00 Lembaga	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Penyidikan dan Pengujian Produk								
			1. Rincian Kegiatan : Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	61.500.000,00	60.765.828,50	98,81	25.00 Produk	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	240.673.000,00	239.690.000,00	99,59	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	100	APBN TA. 2023
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	240.673.000,00	239.690.000,00	99,59	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan BMN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	23.057.000,00	22.962.826,45	99,59	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2023
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Data dan Informasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30.249.000,00	30.125.451,59	99,59	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60.000.000,00	59.754.937,20	99,59	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2023
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	13.000.000,00	12.946.903,06	99,59	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2023
			3. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	114.367.000,00	113.899.881,71	99,59	2.00 Dokumen	100	APBN TA. 2023
16	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.530.944.000,00	3.529.318.606,00	99,95	Terwujudnya Peningkatan Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian, Kemanfaatan Alsintan, Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida, dan Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	47.000.000,00	46.975.000,00	99,95	Peningkatan Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Irigasi Perpipaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12.000.000,00	11.993.617,02	99,95	4.00 unit	100	APBN TA. 2023
			2. Rincian Kegiatan : Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15.000.000,00	14.992.021,28	99,95	3.00 unit	100	APBN TA. 2023
			3. Rincian Kegiatan : Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Barat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20.000.000,00	19.989.361,70	99,95	4.00 unit	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Kegiatan : Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.943.835.000,00	2.942.949.703,00	99,97	Meningkatnya Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	100	APBN TA. 2023
			1. Output : Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan								
			1. Rincian Kegiatan : Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.385.000,00	4.383.681,30	99,97	0.10 Rekomendasi Kebijakan	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Prasarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Lahan Pertanian Pangan Produktif	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.781.100.000,00	2.780.263.642,16	99,97	1.80 km ²	100	APBN TA. 2023
			2. Rincian Kegiatan : Optimasi Lahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	158.350.000,00	158.302.379,54	99,97	0.01 km ²	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	145.000.000,00	144.815.062,00	99,87	Peningkatan Tingkat kemanfaatan alsintan	100	APBN TA. 2023
			1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	145.000.000,00	144.815.062,00	99,87	1.00 Kegiatan	100	APBN TA. 2023
			4. Kegiatan : Fasilitas Pupuk dan Pestisida	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	83.420.000,00	83.420.000,00	100,00	Peningkatan Pelayanan Publik kepada masyarakat dengan memberikan Pupuk Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi	100	APBN TA. 2023
			1. Output : Pelayanan Publik kepada masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	83.420.000,00	83.420.000,00	100,00	53030.00 Orang	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			4. Kegiatan : Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	311.689.000,00	311.158.841,00	99,83	Peningkatan Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian	100	APBN TA. 2023
			1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup Pembiayaan Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	272.440.000,00	271.976.600,53	99,83	1.00 Kegiatan	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Asuransi Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39.249.000,00	39.182.240,47	99,83	0.01 unit	100	APBN TA. 2023
17	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	513.750.000,00	513.544.306,00	99,96	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	100	APBN TA. 2023
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	513.750.000,00	513.544.306,00	99,96	Meningkatnya Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	513.750.000,00	513.544.306,00	99,96	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2023
18	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	434.556.000,00	430.921.000,00	99,16	Terwujudnya suatu Kawasan Transmigrasi yang merupakan Prioritas Nasional	100	APBN TA. 2023
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	434.556.000,00	430.921.000,00	99,16	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan adanya Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Perkara Hukum Kelompok Masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Permasalahan Tanah Transmigrasi yang Difasilitasi Penyelesaiannya	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	24.800.000,00	24.420.000,00	98,47	1.00 Perkara	100	APBN TA. 2023
			2. Output : Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	382.956.000,00	380.721.000,00	99,42	36.00 Orang	100	APBN TA. 2023
			3. Output : Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	26.800.000,00	25.780.000,00	96,19	30.00 Orang	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62.360.000,00	61.308.500,00	98,31	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2023
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62.360.000,00	61.308.500,00	98,31	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62.360.000,00	61.308.500,00	98,31	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	975.000.000,00	920.723.708,00	94,43	Terpenuhinya Dukungan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100	APBN TA. 2023
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	87.500.000,00	80.344.326,00	91,82	Terlaksananya Pelatihan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan								
			1. Rincian Kegiatan : SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	87.500.000,00	80.344.326,00	91,82	1.00 Orang	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	87.500.000,00	79.855.776,00	91,26	Terlaksananya Pelatihan di Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	100	APBN TA. 2023
			1. Output : Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif								
			1. Rincian Kegiatan : SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	87.500.000,00	79.855.776,00	91,26	1.00 Orang	100	APBN TA. 2023
			3. Kegiatan : Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	300.000.000,00	281.862.157,00	93,95	Meningkatnya tata kelola destinasi dan pariwisata berkelanjutan yang siap diimplementasikan dengan Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	300.000.000,00	281.862.157,00	93,95	1.00 Kegiatan	100	APBN TA. 2023
			4. Kegiatan : Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	500.000.000,00	478.661.449,00	95,73	Terlaksananya event nasional dan internasional untuk menarik wisman serta dukungan Event Daerah Lainnya	100	APBN TA. 2023
			1. Output : Konferensi dan Event								
			1. Rincian Kegiatan : Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	500.000.000,00	478.661.449,00	95,73	1.00 Kegiatan	100	APBN TA. 2023
21	Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	110.000.000,00	103.926.310,00	94,48	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen dan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	100	APBN TA. 2023

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	110.000.000,00	103.926.310,00	94,48	Terlaksananya Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	100	APBN TA. 2023
		3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Output : Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
			1. Rincian Kegiatan : Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	110.000.000,00	103.926.310,00	94,48	1.00 Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	APBN TA. 2023
JUMLAH TOTAL ANGGARAN DAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023						30.674.031.000,00	30.225.693.798,00	98,54		100	APBN TA. 2023

- 3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota
Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dilaksanakan dikarenakan tidak tersedianya anggaran
- 3.2.1 Target Kinerja
Tidak ada
- 3.2.2 Realisasi
Tidak ada
- 3.3 Permasalahan dan Kendala
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 1. Faktor alam, yaitu kondisi cuaca mengakibatkan perubahan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 2. Adanya penyesuaian volume pekerjaan terhadap kondisi di lapangan.

 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan telah dilaksanakan vaksinasi di lapangan sebanyak 11.520 dosis;
 2. Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak telah dilaksanakan dan Dimanfaatkan dengan realisasi penandaan dan pendataan di lapangan sebanyak 2.659 unit;
 3. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner telah dilaksanakan dan dimanfaatkan serta penerbitan sertifikat NKV terhadap 8 lembaga;
 4. Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian terdapat tambahan anggaran pada Revisi DIPA ke-II tanggal 2 November 2023 Untuk Kegiatan SID Mendukung Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa dan Kering TA. 2023;
 5. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida terdapat pengurangan anggaran pada revisi DIPA ke-6 per 19 Mei 2023, Terdapat Revisi Pedum per 21 Juni 2023 terkait pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi.

 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 1. Kurangnya SDM dalam rangka Optimalisasi Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi;
 2. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam mengoptimalkan Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi.

 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 1. Kurangnya SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja;
 2. Kurangnya SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja.
- 3.4 Saran dan Tindak Lanjut
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan Mengakselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;

2. Memacu, mengawal, dan monitoring pengendalian setiap proses tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan antara lain dengan membuat rencana jadwal percepatan.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 1. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi dengan maksimal pada pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 1. Melakukan Koordinasi dengan Disnaker dan Diknas Kabupaten/Kota terkait kebutuhan SDM dalam rangka mengoptimalkan Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi;
 - Dinas Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 1. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Diknas Kabupaten/Kota terkait kebutuhan SDM dalam rangka mengoptimalkan Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan pendidikan antara lain:

- a. Pendidikan menengah dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
- b. Pendidikan khusus dengan indikator pencapaian jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pencapaian SPM untuk urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Satuan	Target	Persentase Target
I.	Pendidikan Menengah		Orang	55.073	100
	SMA				
	1.	Angka partisipasi kasar	Persentase	94,19	100
	2.	Angka partisipasi sekolah	Persentase	100	100
	3.	Angka partisipasi murni	Persentase	61,89	100
	4.	Kemampuan literasi	Nilai	2,23	100
	5.	Kemampuan numerasi	Nilai	2,08	100
	6.	Perbedaan skor literasi	Nilai	2,67	100
	7.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	100
	8.	Indeks iklim keamanan	Nilai	2,48	100
	9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2,36	100
	10.	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase	38	100
	11.	Indeks distribusi guru	Persentase	0,4	100
	12.	Proporsi PTK bersertifikat	Persentase	47,79	100
	13.	Proporsi PTK penggerak	Persentase	0,23	100
	14.	Pengalaman pelatihan guru	Persentase	80	100
	SMK				
	1.	Angka partisipasi kasar	Persentase	94,19	100
	2.	Angka partisipasi sekolah	Persentase	100	100
	3.	Angka partisipasi murni	Persentase	61,89	100
	4.	Kemampuan literasi	Persentase	2,2	100
	5.	Kemampuan numerasi	Nilai	2,03	100
	6.	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	80	100

	7.	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	80	100
	8.	Perbedaan skor literasi	Nilai	3	100
	9.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	100
	10.	Indeks iklim keamanan	Nilai	2,52	100
	11.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2,4	100
	12.	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase	39	100
	13.	Indeks distribusi guru	Persentase	0,35	100
	14.	Proporsi PTK bersertifikat	Persentase	46,66	100
	15.	Proporsi PTK penggerak	Persentase	0,18	100
	16.	Pengalaman pelatihan guru	Persentase	80	100
III.	Pendidikan Khusus		Orang	1.265	100
	1.	Angka partisipasi kasar	Persentase	87,42	100
	2.	Angka partisipasi sekolah	Persentase	100	100
	3.	Angka partisipasi murni	Persentase	54,49	100
	4.	Kemampuan literasi	Nilai	2,36	100
	5.	Kemampuan numerasi	Nilai	2,43	100
	6.	Perbedaan skor literasi	Nilai	0	100
	7.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	100
	8.	Indeks iklim keamanan	Nilai	80,89	100
	9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	80,89	100
	10.	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase	32	100
	11.	Indeks distribusi guru	Persentase	0,42	100
	12.	Proporsi PTK bersertifikat	Persentase	5,5	100
	13.	Proporsi PTK penggerak	Persentase	0,22	100
	14.	Pengalaman pelatihan guru	Persentase	80	100

4.1.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian %
I.	URUSAN PENDIDIKAN					
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			98,98 %
1.	Pendidikan Menengah		Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah			99,15
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	55.073	55.073	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,15
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	95,73

SMA						
1.	Angka partisipasi kasar	Persentase	94,19	87,66	6,53	93,07
2.	Angka partisipasi sekolah	Persentase	100	68,42	31,58	68,42
3.	Angka partisipasi murni	Persentase	61,89	60,72	1,17	98,11
4.	Kemampuan literasi	Nilai	2,23	2,63	-0,4	100
5.	Kemampuan numerasi	Nilai	2,08	2,15	-0,07	100
6.	Perbedaan skor literasi	Nilai	2,67	5,34	-2,67	100
7.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	2,8	0,2	93,33
8.	Indeks iklim keamanan	Nilai	2,48	2,48	0	100
9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2,36	2,36	0	100
10.	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase	38	38	0	100
11.	Indeks distribusi guru	Persentase	0,4	0,4	0	100
12.	Proporsi PTK bersertifikat	Persentase	47,79	91,65	-43,86	100
13.	Proporsi PTK penggerak	Persentase	0,23	0,23	0	100
14.	Pengalaman pelatihan guru	Persentase	80	80	0	100
SMK						
1.	Angka partisipasi kasar	Persentase	94,19	87,66	6,53	93,07
2.	Angka partisipasi sekolah	Persentase	100	68,42	31,58	68,42
3.	Angka partisipasi murni	Persentase	61,89	60,72	1,17	98,11
4.	Kemampuan literasi	Persentase	2,2	2,24	-0,04	100
5.	Kemampuan numerasi	Nilai	2,03	1,85	0,18	91,13
6.	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	80	87,35	-7,35	100
7.	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	80	54,7	25,3	68,38
8.	Perbedaan skor literasi	Nilai	3	6,06	-3,06	100
9.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	9,85	-6,85	100
10.	Indeks iklim keamanan	Nilai	2,52	2,52	0	100
11.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2,4	2,4	0	100
12.	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase	39	39	0	100

	13.	Indeks distribusi guru	Persentase	0,35	0,35	0	100
	14.	Proporsi bersertifikat PTK	Persentase	46,66	88,05	-41,39	100
	15.	Proporsi penggerak PTK	Persentase	0,18	0,18	0	100
	16.	Pengalaman pelatihan guru	Persentase	80	80	0	100
2.	Pendidikan Khusus			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus			98,81
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR 80 %			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani			1.265	1.265	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						18,81
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barabg/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	94,07
	1.	Angka partisipasi kasar	Persentase	87,42	87,42	0	100
	2.	Angka partisipasi sekolah	Persentase	100	58,83	41,17	58,83
	3.	Angka partisipasi murni	Persentase	54,49	54,49	0	100
	4.	Kemampuan literasi	Nilai	2,36	2,2	0,16	93,22
	5.	Kemampuan numerasi	Nilai	2,43	2,35	0,08	96,71
	6.	Perbedaan skor literasi	Nilai	0	2,03	-2,03	100
	7.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	5,87	-5,87	100
	8.	Indeks iklim keamanan	Nilai	80,89	70,24	10,65	86,83
	9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	80,89	75,42	5,47	93,24
	10.	Kecukupan formasi guru ASN	Persentase	32	32	0	100
	11.	Indeks distribusi guru	Persentase	0,42	0,85	-0,43	100
	12.	Proporsi bersertifikat PTK	Persentase	5,5	89,2	-83,7	100
	13.	Proporsi penggerak PTK	Persentase	0,22	0,28	-0,06	100
	14.	Pengalaman pelatihan guru	Persentase	80	80	0	100

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan pendidikan sebesar **98,98 %** dengan kategori **tuntas utama**. Untuk indikator pendidikan menengah realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 99,15 %. Sedangkan indikator pendidikan khusus, realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 98,81 %.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2023:

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Program SPM Pendidikan Menengah		98.089.204,154	97.365.788,481	99,26	
1.	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SMK/SMK/Pake C/MA/MAK)		19.526.518,400	19.526.518,400	100	
	a.	Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta Didik	0	0	0
	b.	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	2.000.000,000	2.000.000,000	100
	c.	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	17.526.518,400	17.526.518,400	100
	d.	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	0	0	0
2.	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)		54.137.247,800	54.117.621,394	99,96	
	a.	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	68.821,600	64.198,480	93,28
	b.	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	68.426,200	53.422,914	78,07
	c.	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	54.000.000,000	54.000.000,000	100
	d.	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0

	e.	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0
	f.	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0
	g.	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0
3.	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)			544.779.000	413.284.636	75.86
	a.	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas	0	0	0
	b.	Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	544.779.000	413.284.636	75.86
4.	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)			17.327.892.300	17.327.892.300	100.00
	a.	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0
	b.	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	50.000.000	50.000.000	100.00
	c.	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	16.803.278.500	16.803.278.500	100.00
	d.	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	474.613.800	474.613.800	100
5.	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)			552.766.654	552.766.654	100.00
	a.	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	150.000.000	150.000.000	100
	b.	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	402.766.654	402.766.654	100
	c.	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti	Kegiatan	0	0	0

		pendidikan dan pelatihan guru penggerak				
	6.	Tingkat penyerapan lulusan (SMK)		4,000,000,000	4,000,000,000	100
		a. Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan	Lulusan	2,000,000,000	2,000,000,000	1000
		Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	Lembaga sertifikasi	2,000,000,000	2,000,000,000	1000
	7.	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)		2,000,000,000	1,427,705,097	71.39
		a. Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.	Kegiatan	2,000,000,000	1,427,705,097	71.39
2.	Program SPM Pendidikan Khusus			5,847,877,000	5,591,250,594	95.61
	8.	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus		1,061,722,600	824,722,600	77.68
		a. Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0
		b. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	474,000,000	237,000,000	50
		c. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	587,722,600	587,722,600	100
		d. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0
	9.	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus		500,000,000	500,000,000	100
		a. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas	0	0	0
		b. Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	500,000,000	500,000,000	100
	10.	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan		2,648,906,600	2,648,906,600	100
		a. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0
		b. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	10,000,000	10,000,000	100
		c. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	2,638,906,600	2,638,906,600	100

	d.	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0
	11.	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan		1.137.247,800	1.117.621.394	98.27
	a.	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	68.821,600	64.198.480	93.28
	b.	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	68.426,200	53.422,914	78.07
	c.	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	1.000.000,000	1.000.000,000	100
	d.	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	0
	e.	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0
	f.	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0
	g.	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0
	12.	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus		50.000,000	50.000,000	100
	a.	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	50.000,000	50.000,000	100
	b.	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0
	c.	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0
TOTAL				103,937,081,154	102,957,039,075	99.06

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pendidikan tahun 2023, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	4.949
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	252

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan pendidikan pada tahun 2023 adalah perubahan pada skala indikator pada rapor pendidikan juga refocusing anggaran di bidang pendidikan.

4.2 Urusan Kesehatan

SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan kesehatan antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan indikator jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 ditampilkan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Persentase Target
I.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Orang	407	100
	1. Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	407	100
	2. Petugas kesehatan	Orang	28	100
II.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Orang	298	100
	1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Unit	68	100
	2. Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Unit	5.365	100
	3. Wadah pengiriman specimen (Specimen Carrier)	Unit	39	100
	4. Tempat sampai biologis	Unit	7	100
	5. Formulir: Form Penyelidikan Epidemiologi Form/Lembar KIE Alat Tulis yang Diperlukan	*	25	100
	6. Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit	Unit	432	100
	7. Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	12.300	100
	8. Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	7	100
	9. Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	7	100
	10. Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	3	100
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	2	100
	12. Tenaga Kesehatan: Tenaga Laboratorium	Orang	17	100
	13. Tenaga Kesehatan: Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	4	100
	14. Tenaga Kesehatan: Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	21	100

4.2.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 ditampilkabn pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian %
II.	Urusan Kesehatan					
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	407	407	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					20
	Jumlah Muti Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100
1.	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	407	407	0	100
2.	Petugas kesehatan	Orang	28	28	0	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi		Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	298	298	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					20
	Jumlah Muti Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100
1.	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Unit	68	68	0	0
2.	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Unit	5.365	5.365	0	97.47
3.	Wadah pengiriman specimen (Specimen Carrier)	Unit	39	39	0	100
4.	Tempat sampai biologis	Unit	7	7	0	0
5.	Formulir: Form	*	25	25	0	100

		Penyelidikan Epidemiologi Form/Lembar KIE Alat Tulis yang Diperlukan					
6.		Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit	Unit	432	432	0	100
7.		Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	12.300	12.300	0	100
8.		Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	7	7	0	100
9.		Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	7	7	0	100
10.		Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	3	3	0	100
11.		Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	2	2	3	25
12.		Tenaga Kesehatan: Tenaga Laboratorium	Orang	17	17	0	100
13.		Tenaga Kesehatan: Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	4	4	0	100
14.		Tenaga Kesehatan: Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	21	21	0	100

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan kesehatan sebesar **100 %** dengan kategori **tuntas paripurna**. Untuk indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100 %. Sedangkan indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100 %.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan kesehatan pada Tahun Anggaran 2023.

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		75,015,800	54,985,883	73,30
	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		75,015,800	54,985,883	73,30
	a. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	27,500,000	13,731,840	49,93
	b. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang	47,515,800	41,254,043	86,82
2.	Program lainnya		71,127,245	59,695,464	83,93
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan SPM bidang Kesehatan lintas Kabupaten/Kota		71,127,245	59,695,464	83,93
TOTAL			146,143,045	114,681,347	78,47

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan kesehatan tahun 2023, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100 orang

	dan/atau berpotensi bencana provinsi	yang mendapatkan layanan kesehatan	
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	44 orang

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

- a. Masih terlambatnya pengumpulan data SPM Provinsi Bidang Kesehatan dari bidang terkait;
- b. Masih sulitnya untuk menentukan Target SPM;
- c. Anggaran terlalu minim.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan pekerjaan umum antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Persentase Target
I.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum regional lintas kabupaten/kota	orang	n/a	100
	I. Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	jumlah kab/kota	n/a	100
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	orang	332	100

	1.	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota	2	100
--	----	--	-----------------	---	-----

4.3.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian %
III.	Urusan Pekerjaan Umum					
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Tuntas Paripurna			100
I.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Terlayani	Orang	n/a	n/a	n/a	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	1. Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	n/a	n/a	n/a	100
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Terlayani	Orang	332	332	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20

	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100
	1. Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	2	2	0	100

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan pekerjaan umum sebesar **100 %** dengan kategori **Tuntas Paripurna**. Untuk indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum regional lintas kabupaten/kota realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100 %. Sedangkan indikator penyediaan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100 %.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2023.

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		0	0	0
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		0	0	0
	a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0
	b. Supervisi pembangunan/peningkatan /perluasan/ perbaikan SPAM	Liter/Detik	0	0	0
	c. Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	Liter/Detik	0	0	0
	d. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	SR	0	0	0
	e. Perluasan SPAM jaringan perpipaan	Dokumen	0	0	0

	f.	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan	SR	0	0	0
	g.	Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0	0
	h.	Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota	0	0	0
	i.	Operasi dan pemeliharaan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0
	j.	Survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	k.	Penyediaan lahan untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Ha	0	0	0
	l.	Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	0	0	0
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			2,558,248,519	2,444,091,625	95.54
	2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		2,558,248,519	2,444,091,625	95.54
	a.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	399,999,019	334,796,380	83.70
	b.	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cubluk	Dokumen	2,064,590,300	2,025,549,645	98.11
	c.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Rumah Tangga	0	0	0
	d.	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik regional	Rumah Tangga	0	0	0
	e.	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Dokumen	0	0	0
	f.	Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	93,659,200	83,745,600	89.42
	g.	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0
	h.	Fasilitasi kerja sama Pengelolaan Air Limbah Domestik lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0

		i	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0
TOTAL					2,558,248,519	2,444,091,625	95.54

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum tahun 2023, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	-
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	PNS 12 orang PHL 5 orang

4.3.6 Permasalahan

Permasalahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

1. Data Prediksi Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi tidak memiliki data update dari kabupaten/kota dan belum tersedianya dokumen EHRA yang terbaru di masing-masing Kabupaten/Kota
2. Data eksisting asumsi kebutuhan Kabupaten/Kota belum tersedia

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan perumahan rakyat antara lain:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Orang	n/a	100
	I. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/ Kota	n/a	100
II.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Orang	n/a	100
	I. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	Rumah	n/a	100
	2. Subsidi uang sewa	Rumah	n/a	100
	3. Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	n/a	100

4.4.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian (Persentase) %
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100
IV.	Urusan Perumahan Rakyat					
I.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Orang	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	n/a	n/a	n/a	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus	Jumlah yang	Jumlah yang Belum	100

			Dilayani	Terlayani	Terlayani		
	1.	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/Kota	n/a	n/a	n/a	100
	II.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi			100
		PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
		Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	n/a	n/a	n/a	100
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					20
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100
	1.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	Rumah	n/a	n/a	n/a	100
	2.	Subsidi uang	Rumah	n/a	n/a	n/a	100
	2.	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	n/a	n/a	n/a	100

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan perumahan rakyat sebesar **100 %** dengan kategori **tuntas paripurna**. Untuk indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 100 %. Sedangkan indikator fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 100 %.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM perumahan rakyat Tahun Anggaran 2023.

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
I.	Program Pengembangan Perumahan		388,798,700	318,229,540	81.85
	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		388,798,700	318,229,540	81.85
	a. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	52,999,800	49,317,000	93.05
	b. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	242,199,500	219,223,700	90.51
	c. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0
	d. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0
	e. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	0	0	0
	f. Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	93,599,400	49,688,840	53.09
	2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		0	0	0
	a. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0
	b. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi	Dokumen	0	0	0
	c. Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0
	d. Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0
	e. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program	Unit Rumah	0	0	0

		Provinsi				
	f.	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Provinsi	Unit Rumah	0	0	0
TOTAL				388,798,700	318,229,540	81.85

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan perumahan rakyat tahun 2023, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Dukungan Personil
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	8 orang PNS 2 orang PHL
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	8 orang PNS 2 orang PHL

4.4.6 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM urusan perumahan rakyat adalah belum adanya program pemerintah yang menimbulkan realokasi perumahan.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	orang	545	100
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	246	100
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	21	100
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	247	100
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	5	100

4.5.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian (Persentase) %
V.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99,33
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi		Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			99,33
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80

	Jumlah yang harus dilayani	Orang	545	545	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19,33
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	96,66
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit	246	240	6	97,56
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	21	21	0	100
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang	247	220	27	89,07
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	5	5	0	100

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum sebesar **99,33 %** dengan kategori **tuntas utama**. Capaian indikator pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 99,33 %.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)		8,262,238,764	7,478,638,840	90.52
	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		7,913,238,764	7,203,569,512	71.55
	a. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kasus	6,504,484,640	6,065,859,162	93.26
	b. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	132,879,838	32,803,213	24.69
	c. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Dokumen	50,000,000	46,072,802	92.15
	d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	259,953,946	181,606,108	69.86
	e. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	195,007,400	184,162,500	94.44
	f. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen	0	0	0
	g. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	742,939,940	693,065,727	93.29
	h. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	11,979,000	0	0
	i. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	15,994,000	0	0
	2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		109,000,000	104,996,860	96.33

	a.	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
	b.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	109.000.000	104.996.860	96.33
	c.	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
	3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		240.000.000	170.072.468	70.86
	a.	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	195.000.000	136.014.208	69.75
	b.	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan pelaksanaan sidang ditempat, Penguatan sekretariat bersama PPNS	Dokumen	45.000.000	34.058.260	75.69
2.	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)			0	0	0
	4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	0	0	0
	a.	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Orang	0	0	0
	b.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Dokumen	0	0	0
	c.	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0
	d.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	Dokumen	0	0	0
	e.	Pengelolaan risiko bencana	Kawasan	0	0	0
	f.	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		0	0	0
	g.	Penanganan pascabencana Provinsi		0	0	0
	h.	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana		0	0	0
	i.	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0
	j.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan	0	0	0
	k.	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0
	5.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		0	0	0
	a.	Penyusunan kajian risiko bencana Provinsi	Dokumen	0	0	0

		b.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Provinsi (per jenis bencana)	Orang	0	0	0	
	6.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			0	0	0	
		a.	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0	
		b.	Respon cepat penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0	
		c.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Laporan	0	0	0	
		d.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	0	0	0	
		e.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0	
		f.	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Laporan	0	0	0	
	7.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			0	0	0	
		a.	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah	Dokumen	0	0	0	
		b.	Penguatan kelembagaan bencana daerah	Dokumen	0	0	0	
		c.	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Dokumen	0	0	0	
		d.	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0	
		e.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	Laporan	0	0	0	
		f.	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0	
		g.	Penanganan pasca bencana Provinsi	Dokumen	0	0	0	
	3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)				1,505,624,504	1,401,300,494	93.07
	8.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			1,430,624,916	1,341,713,544	93.79	
		a.	Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Dokumen	55,999,800	38,480,890	68.72	
		b.	Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk Sistem Proteksi	Dokumen	0	0	0	

		Kebakaran				
	c.	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	978.000.000	950.094.179	97.15
	d.	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dokumen	91.999.608	78.368.220	85.18
	e.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	174.625.800	159.250.755	91.20
	f.	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0	0	0
	g.	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0
	h.	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0
	i.	Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	129.999.708	115.519.500	88.86
	j.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dokumen	0	0	0
	k.	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi	Kab/Kota	0	0	0

		l.	Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan	Dokumen	0	0	0
		m.	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga		0	0	0
	9.		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		74.999,588	59,586,950	79.45
			Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Laporan	74,999,588	59,586,950	79.45
			Pengawasan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Laporan	0	0	0
TOTAL					9,767,863,268	8,879,939,334	90.91

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2023, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	74 orang PNS 113 orang PHL Bantuan Polisi 20 rang Damkar

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Pengumpulan data:

- a. Kesulitan dalam pengumpulan data dari bidang-bidang terkait SOP, sarana prasarana, orang yang terdampak;
- b. Belum adanya pemetaan peta rawan ketertiban umum dan peta kebakaran;

Penghitungan kebutuhan:

- a. Dalam sub kegiatan pelayanan bagi warga yang terdampak belum optimal karena belum ada juru taksir yang dibentuk untuk menentukan nominal kerugian ringan, berat dan kerugian sangat berat;
- b. Update terkait SIP belum dilaksanakan masing-masing bidang terkait.

Perencanaan dan Penganggaran;

- a. Penyediaan layanan terdampak belum bisa dilaksanakan karena PPTK masih takut dalam membelanjakannya;
- b. Terkait orang yang terkena pelayanan dampak Perda hanya dibuat sebagai laporan. Dalam pelaksanaan Perda tidak dilaksanakan pendataan satu persatu;

Pelaksanaan

- a. Belum adanya tindak lanjut dari pelaksanaan SOP bidang-bidang untuk diperbaharui sesuai dengan keadaan sekarang;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada untuk melaksanakan trantibumlinmas
- c. Pelaksanaan diklat peningkatan kapasitas Satpol PP, Linmas dan Damkar belum diakomodir sesuai dengan kebutuhan OPD;
- d. Jumlah jabatan yang ada pada Damkar masih belum dipenuhi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki provinsi.

4.6 Urusan Sosial

SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan sosial antara lain:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial dengan indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;

- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;
- e. Perlindungan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 ditampilkan pada table berikut ini :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Persentase Target (%)
I.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Orang	45	100
	1. Penyediaan Permakanan	Orang	45	100
	2. Penyediaan Sandang	Orang	45	100
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses **	Unit	3	100
	4. Penyediaan alat bantu **	Orang	29	100
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	74	100
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	95	100
	7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	30	100
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	100
	9. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	8	100
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang	19	100
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	18	100
II.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Orang	405	100
	1. Pengasuhan	Orang	105	100
	2. Penyediaan Permakanan	Orang	12	100
	3. Penyediaan Sandang	Orang	105	100

	4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	24	100
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	Orang	35	100
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Orang	400	100
	7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	40	100
	8.	Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	100
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	100
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Orang	0	100
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	0	100
	12.	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang	0	100
III.		Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Orang	35	100
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	35	100
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	30	100
	3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	3	100
	4.	Penyediaan Alat bantu	Orang	40	100
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial	Orang	25	100
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Orang	140	100
	7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	8	100
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk	Orang	0	100
	9.	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	3	100
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Orang	3	100
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	0	100
	12.	Pemulasaran	Orang	17	100
IV.		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Orang	25	100
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	25	100
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	0	100
	3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	10	100
	4.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	Orang	0	100
	5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Orang	10	100
	6.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari	Orang	0	100

	7.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Orang	8	100
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	8	100
	9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	9	100
	10	Pemulangan ke daerah asal**	Orang	8	100
V.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi		Orang	213	100
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	160	100
	2.	Penyediaan sandang	Orang	0	100
	3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	8	100
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	20	100
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	25	100

4.6.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian %
VI.	Urusan Sosial					
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			91,73
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			98,09
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani		45	48	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18,09
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	90,43
	1. Penyediaan Permakanan	Orang	45	48	0	100
	2. Penyediaan Sandang	Orang	45	48	0	100
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses **	Unit	3	3	0	100
	4. Penyediaan alat bantu **	Orang	29	44	0	100
	5. Penyediaan perbekalan	Orang	74	77	0	100

		kehatan didalam Panti					
	6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	95	98	0	100
	7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	30	33	0	100
	8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0
	9.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	8	8	0	100
	10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang	19	21	0	100
	11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	18	18	1	94,74
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			Jumlah Anak Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			91,46
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani			405	455	16	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						11,45
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	57,29
	1.	Pengasuhan	Orang	105	155	0	100
	2.	Penyediaan Permakanan	Orang	12	12	0	100
	3.	Penyediaan Sandang	Orang	105	105	0	100
	4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	24	24	0	100
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	Orang	35	42	0	100
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Orang	400	400	0	100
	7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	40	35	5	87,50
	8.	Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	0
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan dan	Orang	0	0	0	0

		kehatan dasar					
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Orang	0	0	0	0
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	0	0	0	0
	12.	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang	0	0	0	0
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial			96,36
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani			35	35	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						16,36
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	81,82
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	35	35	0	100
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	30	30	0	100
	3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	3	3	0	100
	4.	Penyediaan Alat bantu	Orang	40	40	0	100
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial	Orang	25	25	0	100
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Orang	140	140	0	100
	7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	8	8	0	100
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	0	0	0	0
	9.	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	3	3	0	100
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Orang	3	3	0	100
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	0	0	0	0
	12.	Pemulasaran	Orang	17	0	0	11,75
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti			Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			77,74
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	67,20
	Jumlah yang Harus Dilayani			25	21	4	84

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						10,54
Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
1.	Penyediaan Permakanan	Orang	25	21	4	84
2.	Penyediaan Sandang	Orang	0	0	0	0
3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	10	10	0	100
4.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	Orang	0	0	0	0
5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Orang	10	10	0	100
6.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari	Orang	0	0	0	0
7.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Orang	8	7	1	87,50
8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	8	0	8	0
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	9	5	4	55,56
10.	Pemulangan ke daerah asal**	Orang	8	19	0	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi		Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			95
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
Jumlah yang Harus Dilayani			213	213	0	100
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						15
Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	75
1.	Penyediaan Permakanan	Orang	160	160	0	100
2.	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0
3.	Penyediaan Tempat Penampungan	Unit	8	9	0	100

		Pengungsi					
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	20	19	1	95
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	25	25	0	100

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan sosial sebesar **98,73 %** dengan kategori **tuntas utama**. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 98,09 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 91,46 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 96,36 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 77,74 %. Capaian SPM untuk indikator perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 95,00 %.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan sosial Tahun Anggaran 2023.

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Rehabilitasi Sosial		2.257.899.000	2.017.780.089	89.37
	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti		1.136.130.100	1.051.160.082	92.52
	a. Penyediaan permakanaan	Orang	313.253.700	252.540.385	80.62
	b. Penyediaan sandang	Orang	66.932.900	63.708.559	95.18
	c. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	6.000.000	5.910.000	98.50
	d. Penyediaan alat bantu	Orang	27.099.500	26.529.000	97.89
	e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	50.231.200	47.627.188	94.82
	f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	243.200.100	236.130.009	97.09

		g.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	14,033,100	13,632,000	97.14	
		h.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	0	0	0	
		i.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	305,600,000	304,680,000	99.70	
		j.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	20,000,000	17,502,053	87.51	
		k.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	25,000,000	23,448,576	93.79	
		l.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Dokumen	64,779,600	59,452,312	91.78	
	2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				545,503,500	473,326,667	86.77
		a.	Pengasuhan	Orang	194,731,800	187,198,100	96.13	
		b.	Penyediaan makanan	Orang	54,679,400	29,145,100	53.30	
		c.	Penyediaan sandang	Orang	58,451,000	56,200,949	96.15	
		d.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	85,877,200	76,408,633	88.97	
		e.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	23,351,100	17,492,600	74.91	
		f.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	34,550,000	33,635,000	97.35	
		g.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	14,463,600	2,915,970	20.16	
		h.	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	
		i.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	
		j.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0	
		k.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	
		l.	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	0	0	0	
		m.	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar	Dokumen	79,399,400	70,330,315	88.58	

		di dalam panti				
	3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		434,696,700	391,241,840	90.00
		a. Penyediaan permakanaan	Orang	150,075,700	147,103,950	98.02
		b. Penyediaan sandang	Orang	107,664,600	103,315,622	95.96
		c. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	8,000,000	7,623,700	95.30
		d. Penyediaan alat bantu	Orang	12,921,500	12,618,400	97.65
		e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	27,555,000	26,754,722	97.10
		f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	52,913,700	45,741,700	86.45
		g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	3,158,200	3,120,543	98.81
		h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	0	0	0
		i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	6,000,000	5,973,500	99.56
		j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5,068,900	4,990,000	98.44
		k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0
		l. Pemulasaraan	Orang	23,749,500	2,000,000	8.42
		m. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	37,589,600	31,999,703	85.13
	4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		141,568,700	102,051,500	72.09
		a. Penyediaan permakanaan	Orang	40,430,200	19,839,700	49.07
		b. Penyediaan sandang	Orang	0	0	0
		c. Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	Orang	2,010,600	1,780,000	88.53
		d. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	0	0	0
		e. Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	2,800,000	1,800,000	64.29 %
		f. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	0	0	0

		g.	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	34,095,000	31,380,000	92.04
		h.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang	400	0	0
		i.	Akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	6,150,000	2,950,000	47.97
		j.	Pemulangan ke daerah asal	Orang	15,727,900	9,546,600	60.70
		k.	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	39,955,000	34,755,200	86.99
2.	Program Penanganan Bencana				1,464,055,600	1,364,041,710	93.17
	5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			1,464,055,600	1,364,041,710	93.17
		a.	Penyediaan Permakanan	Orang	705,087,600	658,849,800	93.44
		b.	Penyediaan Sandang	Orang	0	0	0
		c.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	183,351,900	165,268,650	90.14
		d.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	42,709,500	37,768,470	88.43
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	532,906,600	502,154,790	94.23
TOTAL					3,721,954,600	3,381,821,799	90.86

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan sosial tahun 2023, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	ASN 9 orang Non ASN 20 orang
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	ASN 23 orang Non ASN 15 orang
3.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di	

	dan	dalam panti	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	ASN 13 orang Non ASN 5 orang
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	ASN 5 orang Non ASN 460 orang

4.6.6 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan sosial antara lain :

1. Kendala utama yang terjadi adalah karena faktor regulasi, yaitu adanya penetapan DPPA Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 27 Oktober 2023 yang berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat, ada beberapa program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target, yang dampaknya akan memberian pelayanan kepada masyarakat serta tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dengan yang telah direncanakan;
2. Proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan hubungan erat antara kemampuan pembiayaan perangkat daerah dan penerimaan/pendapatan pemerintah daerah, hal ini berpengaruh kepada konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Belum kuatnya komitmen atau dukungan terhadap program dan kegiatan yang memiliki hubungan perencanaan dan penganggaran dalam bentuk dana pendampingan atau cost sharing serta penguatan/pengembangan program dalam APBD, sehingga pelaksanaan capaian outcome kegiatan belum berjalan maksimal;
4. Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level Pusat - Provinsi, Provinsi - Kabupaten, lintas sektor maupun lintas program / bidang, hal ini menyebabkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi kurang maksimal baik efektifitas dan juga pemanfaatannya;
5. Pada belanja perjalanan dinas, terdapat sisa dana yang tidak terealisasi, karena selisih harga hotel/penginapan dan harga tiket pesawat yang at cost;
6. Pada beberapa belanja, terdapat sisa dana yang tidak terealisasi, karena perbedaan Harga/SBU dan belanja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;

7. Pada belanja Honorarium narasumber, terdapat sisa dana yang tidak terealisasi, karena honor narsum internal yang dibayarkan hanya 50%;
8. Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti di Sub Kegiatan Pemulangan ke Daerah Asal, sisa pagu yang tidak terealisasi karena Sisa dana yang tidak terealisasi karena Kegiatan ini bersifat respon kasus;
9. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan antar bidang teknis pada dilingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Urusan Pendidikan

Penerapan dan pencapaian SPM urusan pendidikan dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- I. Program SPM Pendidikan Menengah
 1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SMK/SMK/Paket C/MA/MAK)
 - a. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus
 - b. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
 2. Kegiatan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)
 - a. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - b. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
 - c. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)
 - a. Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
 4. Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)

- a. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - b. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat
 - c. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
5. Kegiatan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)
- a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
 - b. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
6. Kegiatan Tingkat penyerapan lulusan (SMK)
- a. Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan
 - b. Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik
7. Kegiatan Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)
- a. Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.
- II. Program SPM Pendidikan Khusus
8. Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus
- a. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus
 - b. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
9. Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus
- a. Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
10. Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan
- a. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - b. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat
- II. Kegiatan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
- a. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 - b. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
 - c. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

12. Kegiatan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus
 - a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan

4.7.2 Urusan Kesehatan

Penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- I. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - a. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- II. Program lainnya
 2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan SPM bidang Kesehatan lintas Kabupaten/Kota

4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan dan pencapaian SPM urusan pekerjaan umum dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- I. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
 - a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - b. Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cubluk
 - c. Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan dan pencapaian SPM urusan perumahan rakyat dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- I. Program Pengembangan Perumahan
 1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - a. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi
 - b. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
 - c. Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus

4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan dan pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- I. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)
 1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawasan
 - b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
 - c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi
 - d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
 - e. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - f. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
 2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - a. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - a. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
 - b. Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan pelaksanaan sidang ditempat, Penguatan sekretariat bersama PPNS

- II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
 - a. Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran
 - b. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - e. Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
 9. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

4.7.6 Urusan Sosial

Penerapan dan pencapaian SPM urusan sosial dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- I. Program Rehabilitasi Sosial
 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti
 - a. Penyediaan permakanan
 - b. Penyediaan sandang
 - c. Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - d. Penyediaan alat bantu
 - e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti
 - f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas
 - i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 - k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - l. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar
 2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
 - a. Pengasuhan
 - b. Penyediaan makanan

- c. Penyediaan sandang
 - d. Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti
 - f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - h. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
- a. Penyediaan permakanan
 - b. Penyediaan sandang
 - c. Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - d. Penyediaan alat bantu
 - e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial
 - f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - h. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - i. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 - j. Pemulasaraan
 - k. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti
4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
- a. Penyediaan permakanan
 - b. Penyediaan sandang
 - c. Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses
 - d. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti
 - e. Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial
 - f. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - g. Pemberian bimbingan keterampilan dasar
 - h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
 - i. Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - j. Pemulangan ke daerah asal
 - k. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti
- II. Program Penanganan Bencana
5. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
- a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - c. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - d. Pelayanan Dukungan Psikososial

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 mencapai kinerja baik namun harus disadari bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai keterbatasan baik dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, regulasi maupun anggaran. Meskipun demikian dengan segala kekurangan tersebut Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu menunjukkan hasil kerjanya, yaitu dengan memperoleh penghargaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah status baik dari pemerintah pusat. Perolehan penghargaan tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras dan kerjasama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan support dan partisipasi dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan harapan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat menjadi referensi dan sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun yang akan datang menjadi lebih baik, sehingga apa yang dikerjakan oleh pemerintah semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 13 Maret 2024

Kepada

Yth. Presiden Republik Indonesia
c.q. Menteri Dalam Negeri
di-

Jakarta

Nomor : 120/ 022 /1
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian LPPD
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2023

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat bersama ini terlampir Kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (buku dan *sofffile* melalui SILPPD).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri diucapkan terima kasih.



Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. SYAFRIZAL ZA, M.Si